



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(P-RKPD) KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2020**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2020**



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Daerah, perlu menyusun perubahan RKPD karena pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Stabilitas Sistem Keuangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Ragka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
10. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

P-RKPD Kabupaten Madiun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan untuk memadukan dan mensinergikan rencana program dan kegiatan P-RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020.

Pasal 3

- (1) P-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.
- (2) P-RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) P-RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci P-RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan P-RKPD Tahun 2020 dan menjabarkannya ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan P-RKPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Juli 2020

BUPATI MADIUN

ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd
TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 32

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I - 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I - 6
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I - 6
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I - 7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020	II - 1
2.1. Prioritas Pembangunan	II - 1
2.1.1. Prioritas Pembangunan Nasional	II - 1
2.1.2. Prioritas Pembangunan Jawa Timur Tahun 2020.	II - 1
2.1.3. Prioritas Pembangunan Kab. Madiun Tahun 2020 ...	II - 1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II - 2
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II - 3
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II - 3
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	II - 5
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III - 1
3.1.1. Keterkaitan RKP, RKPD Provinsi Jatim, Dan Perubahan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020	III - 1
3.1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	III - 2
3.1.3. Perkembangan Penanaman Modal (Investasi).....	III - 5
3.1.4. Perkembangan Perdagangan	III - 6
3.1.5. Potensi dan Permasalahan Ekonomi Daerah ...	III - 7

3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III – 13
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III – 13
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III – 15
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III – 17
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV – 1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV – 1
4.2.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019.....	IV – 4
4.2.1.	Isu Strategis Internasional	IV – 4
4.2.2.	Isu Strategis Regional.....	IV – 6
4.2.3.	Isu Strategis Nasional.....	IV – 7
4.2.4.	Isu Strategis Provinsi Jawa Timur	IV – 10
4.2.5.	Isu Strategis Kabupaten Madiun	IV – 11
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V - 1
BAB VI	PENUTUP	VI - 1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kegiatan s/d 2.35	
	RKPD dan Realisasi RPJMD Kabupaten Madiun sampai Tahun 2019 Triwulan II	II - 7
Tabel 3.1	Keterkaitan Prioritas Pembangunan antara RKP tahun 2020, RKPD Provinsi Jatim Tahun 2020, dan perubahan RKPD Kabupaten Madiun tahun 2020	III - 2
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun 2018 s.d 2019 ...	III - 3
Tabel 3.2	Nilai Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Tahun 2015-2019 Kabupaten Madiun	III - 5
Tabel 3.3	Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Madiun Tahun 2015-2019	III - 5
Tabel 3.4	Perkembangan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun 2015-2019	III - 6
Tabel 3.5	Tabel Indikator Kemiskinan Kabupaten Madiun Periode 2015-2019.....	III - 9
Tabel 3.7	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015-2018 dan Target APBD Tahun Anggaran 2019	III - 12
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	IV - 3
Tabel 5.1	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Kabupaten Madiun Tahun 2020	V - 2

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 3.1	Prosentase Kemiskinan Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.....	III- 8
Gambar 3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018.....	III- 10
Gambar 4.1	Keterkaitan Tema RKP 2020, Tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2020 dan Tema RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020.....	IV- 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat dengan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan Perubahan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023, RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 RKP Tahun 2020. Sehingga tema yang diangkat dalam RKPD ini merupakan kolaborasi antar berbagai dokumen yang terkait untuk menjamin keselarasannya.

Keterkaitan antar dokumen RKPD Kabupaten Madiun tahun 2020 dengan dokumen lainnya dijabarkan dalam program-program pembangunan dan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan, pedoman dan arah dalam memmanifestasikan kegiatan pembangunan bagi Perangkat Daerah dalam Renja Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (renstra).

Selanjutnya, program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA – PPAS (Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Madiun Tahun 2020, yang selanjutnya akan dijadikan landasan dalam penyusunan R-APBD untuk kemudian menjadi APBD Tahun Anggaran 2020.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Presiden No 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
18. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019

- Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
 30. Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 32. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Stabilitas Sistem Keuangan;
 33. Instruksi Peraturan Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 34. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Ragka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/ Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, RPJM Nasional Tahun 2019-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Timur. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. Adapun KUA dan PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020 adalah sebagai arah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dari RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Madiun yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan amanat RPJPD Kabupaten Madiun yang dilaksanakan dengan :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

2. Menjadikan RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan KUA - PPAS, RAPBD dan APBD;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2020;
4. Menjadikan RKPD sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJMD Provinsi, RKP, dan RKPD Provinsi.

1.4. Maksud Dan tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

- 2.1. Prioritas Pembangunan
 - 2.1.1. Prioritas Pembangunan Nasional
 - 2.1.2. Prioritas Pembangunan Jawa Timur Tahun 2020
 - 2.1.3. Prioritas Pembangunan Kab. Madiun Tahun 2020
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1. Keterkaitan RKP, RKPD Provinsi Jatim, Dan Perubahan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020
 - 3.1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
 - 3.1.3. Perkembangan Penanaman Modal (Investasi)
 - 3.1.4. Perkembangan Perdagangan
 - 3.1.5. Perkembangan Pariwisata
 - 3.1.6. Potensi dan Permasalahan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan konsistensi nomenklatur rencana program dan kegiatan RKPD-P dengan RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

Menyampaikan berbagai informasi mengenai pelaksanaan dokumen RKPD apabila diperlukan.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Madiun tahun 2020 disusun dengan menyelaraskan antara prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Madiun.

2.1.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas pembangunan nasional sebagaimana terdapat dalam RKP tahun 2020 difokuskan pada 5 (lima) Prioritas nasional, antara lain;

- a. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
- b. Konektivitas dan Pemerataan
- c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
- d. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- e. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

2.1.2. Prioritas Pembangunan Jawa Timur Tahun 2020

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang pada RKPD Provinsi Jatim Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan
- b. Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta Manajemen Kebencanaan
- c. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan kerja
- d. Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- e. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

2.1.3. Prioritas Pembangunan Kab. Madiun Tahun 2020

Prioritas Pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2020, tidak lepas dari keterkaitan antara Tema Pembangunan nasional dalam RKP tahun 2020, tema Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2020, dan Tema RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020.

Tema RKP Tahun 2020	: Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas
Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berdaya Saing
Tema RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020	: Standarisasi Pelayanan Dasar

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Madiun di tahun 2020 dan perlu mendapatkan perhatian dan kebijakan penanganan. Pengambilan kebijakan penanganan covid-19 mengacu pada regulasi pemerintah pusat dimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi pencapaian target program kegiatan termasuk program-program prioritas daerah.

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penanganan Covid-19 antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, yang secara otomatis mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 yang akan diakomodir dalam RKPD Perubahan.

Sehubungan dengan hal tersebut tema pembangunan dalam perubahan RKPD tahun 2020 disesuaikan menjadi **“Optimalisasi Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam menghadapi Pandemi COVID-19”**, yang mana akan berpengaruh terhadap program kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020 .

Fokus program kegiatan adalah penanganan COVID -19 yang terdiri dari 3 bidang yaitu:

1. Kesehatan
2. Pemulihan Ekonomi
3. Jaring Pengaman Sosial

Berikut ini adalah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Kabupaten Madiun sampai Tahun 2020 Triwulan II.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Perubahan RKPD 2020 disusun berdasarkan dokumen RPJMD 2018-2023. Sehingga permasalahan pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2020 terkait erat dengan Isu Strategis, Prioritas dan sasaran Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2020 yang tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2018-2023. Namun demikian, perubahan RKPD 2020 juga disusun berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini yaitu dengan munculnya pandemi Covid-19 yang mulai merebak pada akhir Tahun 2019 lalu dan saat ini telah tersebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia dan Madiun pada khususnya. Seiring dengan perkembangan situasi dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Madiun saat ini, maka diperlukan penyesuaian tema dalam Perubahan RKPD 2020 ini, yaitu **“Optimalisasi Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam menghadapi Pandemi COVID-19”** yang mengisyaratkan bahwa daerah harus responsive COVID-19.

Isu strategis yang diangkat pada RKPD Tahun 2020 awal adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
- b. Tingginya kesadaran/kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan;
- c. Masih terdapat bantuan untuk masyarakat miskin atau rentan miskin tidak tepat sasaran;
- d. Tingginya angkatan kerja yang belum punya keahlian;
- e. Masih kurangnya daya dukung sarpras wilayah permukiman;
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh;
- g. Masih kurangnya daya dukung sarpras keselamatan jalan;
- h. Pengembangan potensi wisata Lereng Gunung Wilis belum Optimal;
- i. Pangsa pasar komoditas perdagangan dan perindustrian masih terbatas dalam wilayah Kabupaten Madiun;
- j. Rendahnya pendapatan Petani;
- k. Pengelolaan persampahan masih belum optimal;
- l. Masih kurangnya kemampuan penanganan bencana;
- m. Belum optimalnya pencegahan, penanganan konflik dan pasca konflik;
- n. Minimnya fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- o. Minimnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor;

Dengan timbulnya Pandemi Covid-19 memunculkan issue baru yaitu :

- a. Kesiapsiagaan tenaga medis, Sarana prasarana, fasilitas dan pelayanan kesehatan dalam mencegah dan menangani pandemi Covid-19;
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya preventif penyebaran Covid-19;
- c. Dampak sosial Covid-19 terhadap masyarakat, utamanya masyarakat miskin dan rentan miskin;
- d. Terganggunya roda perekonomian masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan dan daya beli masyarakat;

Merujuk pada isue strategis Kabupaten Madiun yang disinkronkan dengan prioritas Pusat, prioritas Provinsi Jawa Timur maka penekanan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 dengan tetap mendasar pada upaya pengamanan dan pemulihan COVID 19, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat, melalui :
 - a. Peningkatan Mutu Pendidikan SD, SMP Penurunan angka Stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi;
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Gerakan Masyarakat hidup sehat (GERMAS);
 - c. Verifikasi dan validasi data melalui optimalisasi peran SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu), PKH (Program Keluarga Harapan), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan);
 - d. Peningkatan kompetensi tenaga kerja.
2. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, melalui :
 - a. Peningkatan jalan dan jembatan;
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
 - c. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;
 - d. Peningkatan Sarana Keselamatan Jalan.
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, melalui :
 - a. Pengembangan pariwisata Lereng Gunung Wilis;
 - b. Peningkatan Intensitas promosi produk Usaha Mikro.
4. Terjaminnya Ketersediaan Pangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup, melalui :
 - a. Peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian;
 - b. Pembudayaan 3R (Reduse, Reuse, Recycle) di masyarakat

5. Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan ASN, melalui :
 - a. Pembentukan Desa tangguh bencana, Tim Jitu Pasna (Pengkajian Penghitungan Pasca Bencana);
 - b. Peningkatan Kewaspadaan daerah dengan optimalisasi pengamanan terpadu Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan dan masyarakat;
 - c. Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Secara umum, Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dapat disampaikan sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kekurangan Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) meliputi Guru, Pengawas dan Penilik. 2. Belum adanya Pemerataan Guru antar sekolah maupun antar wilayah, khususnya GTT. 3. Perlunya standarisasi dan kesetaraan kualitas sekolah antar wilayah kecamatan 4. Perlunya peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan Kepribadian Berkelanjutan (PKB) 5. Perlunya pengembangan pembinaan karakter siswa, salah satunya dengan menambah ekstrakurikuler Baca Tulis Al Quran pada sekolah negeri. 6. Belum optimalnya fasilitasi dan apresiasi untuk siswa-siswa yang berprestasi
2	Urusan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal 2. Rasio dokter /tenaga medis & Paramedis masih kurang 3. Cakupan pelayanan rujukan masih rendah 4. Belum semua puskesmas terakreditasi 5. Pemanfaatan alkes belum optimal 6. Kondisi/bangunan fisik puskesmas dan jaringannya masih ada yang tidak memenuhi syarat
3a	Urusan Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jalan dalam kondisi rusak yang belum tertangani masih cukup banyak. 2. Masih banyak jembatan rusak yang belum tertangani akibat belum terinventarisir atau belum masuk dalam database (Dok SK Bupati). 3. Terbatasnya tenaga pekarya (jalan dan Irigasi) atau operator alat berat serta laborat, karena tidak adanya penambahan pegawai

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		4. Perlu penambahan alat berat sebagai penunjang pembangunan infrastruktur (Alat berat yang ada sudah terlalu tua dan memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi)
		5. Revitalisasi kota mejayan sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan masyarakat
		6. Perlunya penanganan / pemeliharaan drainase jalan terutama wilayah perkotaan.
3b	Urusan Penataan Ruang	1. Perlunya penyusunan RDTRK di kawasan jalur Tol Trans Jawa yang selaras dengan rencana pengembangan kawasan.
		2. Belum ada pemetaan secara definitif kawasan LP2B di Kabupaten Madiun
		3. Belum adanya penyusunan RDTRK yang terintegrasi untuk pengembangan Kawasan Pariwisata
		4. Belum seluruh kawasan strategis daerah memiliki RDTRK, sesuai kebijakan Perda RTRW Kab. Madiun No 9 tahun 2011
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh.
		2. Rendahnya daya dukung sarpras wilayah permukiman
		3. Belum terlembaganya sistim penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
		4. Belum tersedianya database kawasan perumahan dan permukiman
		5. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman
		6. Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan perumahan dan pemukiman.
5	Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang dijiwai oleh nilai keagamaan dan budaya lokal perlu dikembangkan lebih optimal.
6	Urusan Sosial/ Kesejahteraan Masyarakat	1. Perlunya peningkaan ketrampilan / lapangan kerja bagi fakir miskin (PMKS).
		2. Penanggulangan kemiskinan (PMKS) berbasis masyarakat masih relatif rendah.
		3. Perlunya penambahan kendaraan operasional pengiriman bantuan untuk pasca bencana.
		4. Kab. Madiun belum memiliki sarana pelayanan dan panti rehabilitasi sosial tingkat kabupate bagi PMKS.
		5. Kab. Madiun belum memiliki Kelembagan Sosial Persatuan Disabilitas tingkat kabupaten.

II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Tenaga Kerja	1. Perlunya optimalisasi pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan.
		2. Peningkatan layanan Perlindungan CTKI/TKI di daerah kantong-kantong TKI belum terkoordinasi dengan baik.

II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
		3. Pengangguran Terbuka di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan tahun 2013-2016
		4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Madiun mengalami penurunan pada tahun 2013-2016
		5. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) belum memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan hasil kerja mereka.
		6. Pemenuhan pelayanan sistem informasi ketenagakerjaan daerah.
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih dibawah Provinsi Jatim dan nasional.
		2. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan.
		3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak
		4. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi kabupaten layak anak.
3	Urusan Pangan	1. Implementasi program dan kesadaran masyarakat tentang KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) masih kurang maksimal.
		2. Ketersediaan bahan pangan (Sayur, buah dan ikan) belum mencukupi kebutuhan konsumsi / masih mendatangkan dari luar daerah.
		3. Belum terpenuhinya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
		4. Belum terkontrolnya peredaran komoditas bahan pangan utama dari / ke Kab. Madiun.
		5. Program Kelompok Lumbung Pangan masih banyak yang belum aktif.
		6. Belum optimalnya ketersediaan diversifikasi olahan pangan lokal (di kawasan pariwisata)
		7. Pola konsumsi beras sebagai konsumsi utama masyarakat masih cukup tinggi.
		8. Belum berkembangnya Teknologi Tepat Guna secara terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya.
4	Urusan Pertanahan	1. Belum tersedianya data secara menyeluruh mengenai kepemilikan tanah bersertifikat oleh masyarakat
		2. Masih adanya konflik pertanahan antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah daerah.
		3. Masih belum tertibnya pengadministrasian pertanahan
5	Urusan Lingkungan Hidup	1. Masih terdapat sampah sebesar 83% di masyarakat yang belum tertangani ke TPA yang berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, air dan udara.
		2. Pembuangan limbah industri dan limbah domestik sebagian masih dibuang ke sungai yang berdampak pada pencemaran sumber air
		3. Perlunya pengawasan terhadap asap cerobong pabrik, asap kendaraan bermotor dan aktivitas pertambangan yang dapat mencemari kualitas udara.
		4. Perlu adanya regulasi tentang penggunaan lahan baik untuk perumahan, gudang dan bangunan pabrik.
6	Urusan Pengendalian Kependudukan dan KB	1. Lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program KKBPK.
		2. Masih tingginya pasangan usia subur yang belum ber KB
		3. Masih rendahnya peserta KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
		4. Kurangnya kepedulian PUS dan remaja terhadap kesehatan reproduksi
		5. Tingginya perkawinan dengan usia Istri < 20 thn
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	1. Perlunya pembinaan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 di tingkat desa

II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
		2. Kompetensi SDM penyelenggara pemerintahan desa masih relatif rendah.
		3. Pengelolaan keuangan dan sistem yang mendukung pengelolaan keuangan masih belum optimal
		4. Hubungan kerja antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya.
		5. Regulasi yang menindaklanjuti pasca program PNPM MPd belum dapat ditindaklanjuti secara optimal. Belum adanya petunjuk teknis operasional yang secara spesifik dan mendetail terkait proses integrasi lembaga ekonomi ke dalam wadah BUMDesa.
		6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diharapkan sebagai sumber kekuatan ekonomi desa belum sepenuhnya mampu berjalan secara optimal.
		7. <i>Bimtek pengelolaan HIPPAM dari 84 Pokmas belum terpenuhi secara keseluruhan.</i>
		8. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi desa (SDA dan TTG)
		9. Pengembangan potensi atau produk unggulan desa (prokudes) belum maksimal
		10. Belum optimalnya database terpadu penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi di perdesaan.
		11. Validitas isian data dan pemanfaatan profil desa dan kelurahan belum berjalan secara optimal.
8	Urusan Perhubungan	1. Pembangunan PUSPEM baru di Mejayan sehingga membutuhkan perencanaan Sarpras transportasi yang baik
		2. Pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Madiun masih perlu didukung oleh Sarpras Lalu lintas yang memadai
		3. Tingginya angka laka lantas ditingkat pelajar yang membutuhkan penaganan kebijakan LLAJ yang tepat dan afirmatif
		4. Sarana Prasarana Lalu Lintas yang belum tersedia maksimal, karena wilayah pelayanan yang relatif luas.
9	Urusan Komunikasi & Informatika	1. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		2. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi masih belum maksimal
		3. Kelembagaan komunikasi dan informatika belum maksimal
		4. Masih terbatasnya sarana internet untuk diakses oleh masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan.
		5. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal
10	Urusan Koperasi	1. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi
		2. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga menyulitkan pengembangan usaha
		3. Keterbatasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan Usaha KUMKM.
11	Urusan Penanaman Modal	1. Investasi belum maksimal karena belum ada OPD teknis yang menangani urusan penanaman modal, mengingat KPPT hanya fokus terhadap pelayanan perizinan dan tidak penyusunan kebijakan teknis dan

II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
		pengembangan iklim investasi.
		2. Capaian realisasi investasi masih belum memenuhi target RPJMD (Investor yang mengajukan SIUP).
		3. Potensi dan peluang pengembangan investasi belum dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan secara luas kepada calon investor
		4. Regulasi teknis terkait penanaman modal belum disusun sebagai pedoman bagi calon investor untuk berinvestasi di Kab. Madiun
		5. Kurangnya kesadaran investor untuk memenuhi kewajiban dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		6. Sebagian investor masih belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya (LKPM) sehingga menghambat pengawasan.
		7. Belum maksimalnya pelaksanaan PTSP di Kab. Madiun.
12	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1. Relatif kecilnya kelompok atau grup kepemudaan. 2. Relatif rendahnya even dan prestasi kepemudaan dan olah raga daerah.
13	Urusan Statistik	1. Tupoksi pengelola data statistik sektoral belum terwadahi pada struktur kelembagaan OPD (setiap bidang/seksi) 2. Konsistensi data statistik sektoral belum maksimal 3. Publikasi data statistik sektoral melalui media komunikasi / multi media belum optimal
14	Urusan Persandian	1. Kualitas dan kapasitas SDM Persandian belum memadai 2. Sarana dan prasarana persandian masih perlu ditingkatkan. 3. Kesadaran mengenai keamanan informasi belum berkembang secara optimal di lingkungan ASN Kab Madiun.
15	Urusan Kebudayaan	1. Relatif terbatasnya jumlah dan kualitas sanggar seni di kab. Madiun. 2. Kurangnya Sarana Prasarana dan SDM Pembina kegiatan Seni dan budaya. 3. Banyaknya benda cagar budaya yang berada di kabupaten yang belum dikelola dengan optimal. 4. Masih relatif rendahnya partisipasi masyarakat terhadap even-even seni dan budaya daerah 5. Penerapan nilai-nilai dan seni budaya yang terus mengalami penurunan akibat adanya globalisasi.
16	Urusan Perpustakaan	n.a.
17	Urusan Kearsipan	n.a.

II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
II	URUSAN PILIHAN	
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Perlunya peningkatan kontribusi perikanan (darat) bagi perekonomian daerah.
2	Urusan Pariwisata	1. Pengembangan pariwisata belum terintegrasi dengan dengan sektor lain seperti Industri kreatif dan sektor lainnya. 2. Kurangnya daya dukung infrastruktur menuju destinasi wisata. 3. Relatif rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Madiun. 4. Strategi promosi pariwisata Kab Madiun perlu

		ditingkatkan.
3	Urusan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian. 2. Terbatasnya akses petani terhadap saprodi dan permodalan 3. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian 4. Pentingnya penyuluhan kepada petani dalam menghadapi anomali iklim dan ancaman hama serta penyakit tanaman. 5. Terjadinya penurunan daya dukung lahan dan sumberdaya air 6. Belum adanya pengawasan secara intensif terhadap keluar masuknya ternak. 7. Perlunya penyuluhan dalam mengatasi ancaman penyakit ternak yang dapat mengganggu produktivitas 8. Belum tercapainya swasembada daging sapi secara berkelanjutan. 9. Belum maksimalnya luas lahan perikanan produktif 10. Belum tercapainya swasembada ikan secara berkelanjutan. 11. Kurang optimalnya penerapan inovasi teknologi dan penyerapan informasi oleh petani 12. Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh 13. Rendahnya posisi tawar petani di pasar input dan output.
4	Urusan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan hutan yang terintegrasi dengan sektor lain yang terkait.
5	Urusan energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya penataan kegiatan usaha pertambangan mineral batuan bukan logam (Galian C) yang terkait pajak dan prosedur pertambangan. 2. Pengembangan Energi Baru Terbarukan belum berjalan secara optimal. 3. Energi kelistrikan di Bidang ESDM masih tahap rintisan, sehingga selalu koordinasi dengan ESDM Prov Jatim terkait pengembangan energi kelistrikan.
6	Urusan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta Belum Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa 2. Kurangnya sarana usaha dan modal usaha bagi pedagang kecil sektor informal dan perdagangan kaki lima 3. Kurang optimalnya perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri
7	Urusan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung daya saing industri di kab Madiun masih perlu ditingkatkan. 2. Diperlukan peningkatan SDM, ketrampilan dan penguasaan teknologi khususnya yang mendukung Industri Kecil
8	Urusan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penurunan Pagu Alokasi kegiatan perpindahan dan penempatan Transmigrasi di Kabupaten Madiun

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka substansi utama Bab III perubahan RKP 2020 adalah untuk menyajikan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah yang dikaitkan dengan perubahan RKP tahun 2020.

Arah kebijakan ekonomi daerah dipertegas dengan menunjukkan keterkaitan antara RKP tahun 2020, RKP Provinsi Jatim Tahun 2020, dan perubahan RKP Kabupaten Madiun tahun 2020, serta dukungan data yang relevan.

Arah kebijakan keuangan daerah menjelaskan tentang perubahan kebijakan penganggaran program dan kegiatan yang dikaitkan dengan arah kebijakan ekonomi daerah. Sub bab ini akan mendukung perubahan anggaran dalam perubahan RKP tahun 2020.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Keterkaitan RKP, RKP Provinsi Jatim, Dan Perubahan RKP Kabupaten Madiun Tahun 2020

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Madiun tahun 2020, tidak lepas dari keterkaitan antara Tema Pembangunan nasional dalam RKP tahun 2020, tema Pembangunan RKP Provinsi Jawa Timur tahun 2020, dan Tema RKP Kabupaten Madiun Tahun 2020.

Tema RKP Tahun 2020	: Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas
Tema RKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing
Tema RKP Kabupaten Madiun Tahun 2020	: Standarisasi Pelayanan Dasar

Berdasarkan keterkaitan tersebut maka arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Madiun tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan
antara RKP tahun 2020, RKPD Provinsi Jatim Tahun 2020,
dan perubahan RKPD Kabupaten Madiun tahun 2020

NO	RKP 2020	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2020	RKPD KAB MADIUN 2020
1	Prioritas Pembangunan : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Prioritas Pembangunan : Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan	Prioritas Pembangunan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat
2	Prioritas Pembangunan: Konektivitas dan Pemerataan	Prioritas Pembangunan: Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta Managemen Kebencanaan	Prioritas Pembangunan: Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar
3	Prioritas Pembangunan: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Prioritas Pembangunan: Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja	Prioritas Pembangunan: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
4	Prioritas Pembangunan: Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Prioritas Pembangunan: Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Prioritas Pembangunan: Terjaminnya Ketersediaan Pangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup
5	Prioritas Pembangunan: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Prioritas Pembangunan: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Prioritas Pembangunan: Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan ASN

3.1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun mencapai 5,42%, atau mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,10%. Percepatan pertumbuhan ini terjadi karena pulihnya sektor

pertanian dimana tahun sebelumnya mengalami kontraksi hingga 2,26% yang mengakibatkan penurunan produksi terutama tanaman pangan. Mengingat nilai kontribusi dari sektor pertanian yang mencapai 28,85% maka kenaikan produksi tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Madiun. Disisi lain dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Madiun dapat mendorong percepatan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Madiun yang diakibatkan oleh sektor pertanian dapat mendorong pertumbuhan pada sektor industri dan perdagangan, sehingga dapat memberikan dampak percepatan kinerja pada perekonomian di Kabupaten Madiun.

Tabel 3.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun 2018 s.d 2019

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	
			2018	2019
1	PDRB (ADH Berlaku)	Rp.Juta	17,636,096.7	18,931,550.7
2	PDRB (ADH Konstan)	Rp.Juta	12,485,007.7	13,161,840.2
3	Inflasi	(%)	2.71	2.20
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	5.10	5.42
5	Pendapatan Perkapita	Rp.Ribu	25,882	27,730

Sumber Data : Bappeda Kab.Madiun (hasil koordinasi dengan BPS)

Pada tahun 2020 hampir semua wilayah di Kabupaten Madiun mengalami pandemi COVID 19 bahkan secara Nasional , dengan kondisi adanya pandemi tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada tahun 2020 diperkirakan mengalami penurunan hingga pada kisaran 3,18 %. Sektor pertanian dan perdagangan diperkirakan masih mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi disaat sektor lain mengalami tekanan, seiring dengan masa pandemi Covid 19 sektor pangan merupakan salah satu sektor yang harus dijaga dan sumbangan sektor pertanian di Kabupaten Madiun berada pada kisaran 28%, Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi di wilayah Kabupaten Madiun. Terkait dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi di Kabupaten Madiun masih dapat bertahan dan tidak sampai mengalami kontraksi, apalagi dengan banyaknya bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah sehingga masih dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Sentimen dari faktor eksternal maupun internal sebagai dampak dari pandemic Covid 19 menjadi pemicu melemahnya beberapa sektor ekonomi.

Sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan melambat hingga mencapai level 3,18 persen, mengingat peranan sektor ekonomi yang cukup dominan seperti perdagangan, industri serta jasa akan mengalami tekanan hingga menurunkan elastisitas tenaga kerja dan berdampak pada bertambahnya tingkat pengangguran, indikasi ini dapat dilihat dari banyaknya sector usaha yang sudah tidak dapat melangsungkan usahanya dan berdampak angkatan kerja pada kelompok usia 20 sampai dengan 34 tahun yang terserap pada lapangan kerja pada sektor-sektor yang terdampak pandemic Covid 19 tersebut.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Madiun perlu menjaga denyut usaha dengan strategi mengembangkan tatanan kegiatan ekonomi yang baru agar sektor penghasil barang (*tradables*) yang terdampak pandemi dapat terus berjalan. mengingat pertumbuhan sektor tersebut untuk menjaga daya beli sehingga dapat menjaga kemampuan PAD.

Percepatan pembangunan di Caruban dapat dijadikan episentrum aktivitas perekonomian di Kabupaten Madiun, dengan harapan berdampak pada ekspansi bisnis di wilayah sebagai pusat pemerintahan. Peningkatan pembangunan ekonomi seharusnya sejalan dengan optimalisasi penyerapan anggaran pemerintah daerah untuk kepentingan kemakmuran masyarakat seperti pembangunan infrastruktur. Namun bila kita lihat struktur belanja daerah Kabupaten Madiun yang masih didominasi oleh belanja pegawai dan barang jasa serta proporsi belanja modal masih relatif kecil, hal ini yang menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada perspektif jangka menengah perekonomian Kabupaten Madiun tetap membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam dekade mendatang, mengingat beberapa hal. Pertama, peranan sektor ekonomi yang dominan (pertanian) belum bisa meningkatkan elastisitas penciptaan lapangan pekerjaan, fenomena ini dapat diindikasikan dengan kurangnya minat angkatan kerja pada kelompok usia 20 sampai dengan 34 tahun yang mau bekerja pada sektor pertanian, sehingga masih tingginya kelompok usia tersebut yang merantau keluar Kabupaten Madiun.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Madiun perlu bekerja keras lagi mengingat dampak pandemi ini dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Madiun naik kembali, karena sebagian besar keluarga di Kabupaten Madiun masih hidup sedikit di atas garis kemiskinan akan kembali tererosok kedalam garis kemiskinan. Dinamika perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh intervensi pemerintah melalui instrumen distribusi dana perimbangan dan regulasi fiskal.

Tabel 3.2
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2015-2019
Kabupaten Madiun

Uraian	2015	2016	2017	2018*)	2019	Rata-rata Pertumbuhan
Inflasi	2,66	5,83	4,78	2,71	2,20	3,64

Sumber : Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2020

*)Angka Sementara proyeksi metode Bappenas

Indikator makro ekonomi yang penting untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi adalah tingkat inflasi. Artinya, tingkat pertumbuhan ekonomi semestinya masih lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan inflasinya. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari inflasi, maka secara nominal masyarakat meningkat pendapatan perkapitanya, namun secara riil tidak mengalami peningkatan kesejahteraan, karena harga-harga barang pokok mengalami kenaikan di atas kenaikan pendapatan. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,42% sedangkan inflasi sebesar 2,20%.

3.1.3. Perkembangan Penanaman Modal (Investasi)

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, adalah seberapa besar investasi dilaksanakan di daerah tersebut. Semakin besar investasi akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya. Dengan adanya investasi akan menambah lapangan kerja baru, perputaran uang di daerah dan akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya.

Tabel 3.3
Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Madiun
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	408	392	428	417	1.187
2.	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) (000)	78.107.209.381	78.107.209.381	58.908.800.000	376.938.367.000	644.879.310.587
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	3,77	2,79	9,37	6,04	6,46
4.	Lama proses perijinan (dalam hari)	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Madiun, Tahun 2020

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Madiun fluktuatif tetapi cenderung meningkat. Tahun 2019 jumlah investor mengalami kenaikan 284 % demikian pula nilai realisasi investasi naik tajam sebesar 171 % dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan perizinan / non perizinan, promosi investasi wisata serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang semakin baik. Sedangkan peningkatan jumlah realisasi investasi berbanding lurus dengan rasio Daya Serap Tenaga Kerja yang naik signifikan di tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya sejumlah usaha skala besar dan menengah yang cukup menyerap banyak tenaga kerja. Tenaga kerja yang terserap tahun 2019 tersebar pada 1.187 unit usaha baru.

3.1.4. Perkembangan Perdagangan

Perkembangan pelaksanaan bidang perdagangan, dapat dilihat melalui indikator Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perdagangan selama kurun tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada dibawah ini :

Tabel 3.4
Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2015-2019
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah)
Kabupaten Madiun

No	Kategori	2015		2016		2017		2018		2019*)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,367,835.3	31.46	3,453,728.5	30.65	3,492,699.3	29.40	3,413,896.4	27.34	3,489,565.93	26.51
2	Pertambangan dan Penggalian	110,832.3	1.04	115,318.8	1.02	121,489.8	1.02	124,515.2	1.00	125,121.78	0.95
3	Industri Pengolahan	1,073,653.6	10.03	1,138,654.0	10.10	1,231,189.3	10.36	1,351,346.6	10.82	1,448,367.99	11.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,777.6	0.10	11,044.1	0.10	11,496.4	0.10	12,583.6	0.10	13,433.87	0.10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,244.8	0.17	19,161.5	0.17	20,284.3	0.17	21,431.8	0.17	23,003.20	0.17
6	Konstruksi	1,183,270.8	11.05	1,267,430.8	11.25	1,396,635.7	11.76	1,535,716.0	12.30	1,626,630.42	12.36
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,712,335.0	16.00	1,829,452.9	16.23	1,962,850.0	16.52	2,129,366.3	17.06	2,304,013.04	17.51
8	Transportasi dan Pergudangan	169,467.5	1.58	180,612.7	1.60	194,410.6	1.64	211,184.5	1.69	230,613.88	1.75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	244,428.6	2.28	265,704.9	2.36	288,979.9	2.43	313,605.3	2.51	336,092.19	2.55
10	Informasi dan Komunikasi	834,418.4	7.79	898,123.2	7.97	963,749.6	8.11	1,040,986.0	8.34	1,115,302.78	8.47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	297,949.1	2.78	319,759.5	2.84	342,134.9	2.88	370,963.1	2.97	384,197.38	2.92

No	Kategori	2015		2016		2017		2018		2019*)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
12	Real Estate	189,978.8	1.77	201,692.5	1.79	216,238.7	1.82	232,646.7	1.86	246,753.62	1.87
14	Jasa Perusahaan	36,287.8	0.34	38,293.3	0.34	40,497.2	0.34	43,638.2	0.35	46,526.91	0.35
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	626,082.8	5.85	654,381.9	5.81	668,956.9	5.63	682,624.5	5.47	708,587.05	5.38
16	Jasa Pendidikan	467,964.5	4.37	495,871.2	4.40	525,804.1	4.43	560,189.0	4.49	594,679.30	4.52
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	93,666.2	0.87	99,110.2	0.88	104,394.9	0.88	112,549.2	0.90	120,729.96	0.92
18	Jasa lainnya	267,679.5	2.50	280,557.8	2.49	297,525.0	2.50	327,765.4	2.63	348,220.94	2.65
	PDRB	10,704,872.5	100	11,268,897.9	100	11,879,336.6	100	12,485,007.7	100	13,161,840.22	100

Sumber: Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2020

*)Angka Sementara

Tabel di atas merupakan gambaran PDRB dan kontribusi ekonomi menurut kategori selama tahun 2015 s/d 2019 atas dasar Harga Konstan Tahun 2010. Kategori Pertanian memberikan kontribusi yang paling tinggi yaitu sebesar 26,51 persen. Untuk kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi mencapai 17,51 persen kemudian disusul kategori Konstruksi mencapai 12,36 persen dan sektor Industri Pengolahan mencapai 11,00 persen. Dibanding tahun sebelumnya, sektor Pertanian tetap mengalami kenaikan dari sisi rupiah namun mengalami penurunan secara persentase. Hal ini mengisyaratkan bahwa di Kabupaten Madiun, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Konstruksi serta sektor Industri Pengolahan semakin bertumbuh seiring perkembangan pembangunan Ibu Kota Kabupaten Madiun di Caruban.

3.1.5. Potensi dan Permasalahan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah di Kabupaten Madiun didukung oleh potensi dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kemiskinan

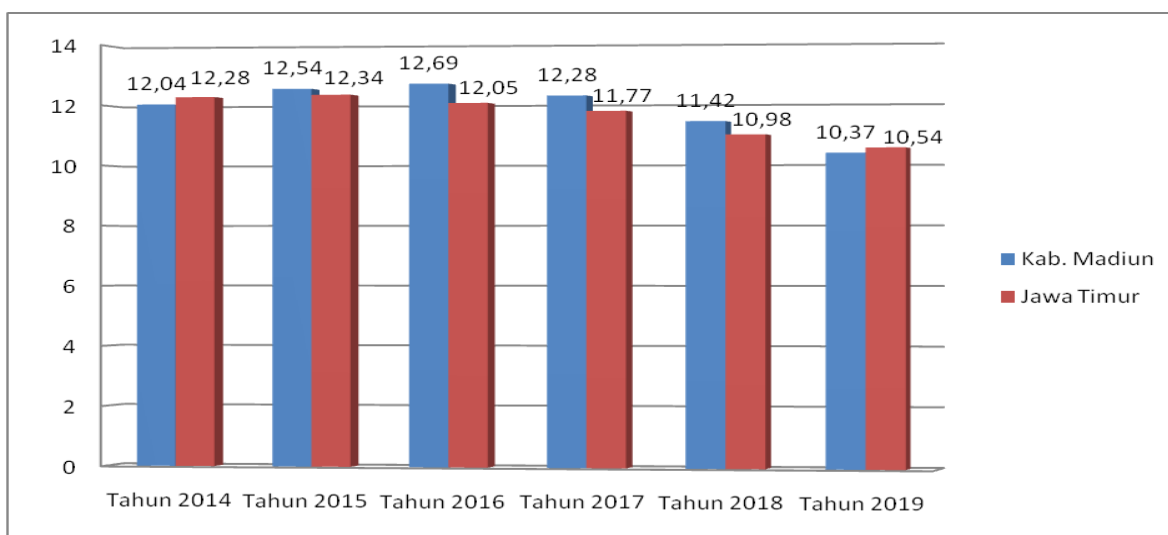
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional menargetkan menurunnya angka kemiskinan baik di tingkat nasional maupun daerah sebesar 8-10%.

Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang. Dibandingkan September 2018, jumlah penduduk miskin menurun 529,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2018, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 805,1 ribu orang. Persentase

penduduk miskin pada Maret 2019 tercatat sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen, terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen terhadap Maret 2018. Pada bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.112,25 ribu jiwa (10,37 %), berkurang sebesar 179,9 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang sebesar 4.292,15 ribu jiwa (10,85 %). Sedangkan di Kabupaten Madiun Jumlah penduduk miskin sebesar 71.910 jiwa dengan tingkat kemiskinan 10,54 %.

Gambar 3.1

**Prosentase Kemiskinan Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 – 2019**



Daerah/ Pembiayaan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin, Rastra, Program Keluarga Harapan, Jalinmatra, Anty Poverty Program, fasilitas koperasi, pemberdayaan UMKM, pemberdayaan pokmas tepian hutan, rehab RTLH, Bantuan Stimulan Jamban, Bhakti Sosial Terpadu, Program Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah, Pelayanan KB Gratis, Pemasangan Sambungan Air Rumah Tangga Untuk Masyarakat Miskin, Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Diniyah (BOSDAMADIN), Pelayanan Sunatan Masal dan Pengobatan Masal, Pelayan penguburan mayat tidak dikenal, Pemberdayaan fakir miskin dan Bina Swadaya serta Penanganan dan pembenahan bantuan korban bencana sosial.

Kemiskinan merupakan salah satu bagian dari masalah klasik pembangunan yang belum terpecahkan sampai sekarang karena bersifat kompleks dan membutuhkan penanganan lintas sektoral. Padahal di satu sisi, pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Miskin merupakan suatu kondisi belum terpenuhinya hak – hak dasar kebutuhan primer individu secara manusiawi dan belum mampu mengembangkan kehidupannya secara lebih bermartabat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, dan budaya.

Tabel 3.5
Tabel Indikator Kemiskinan Kab. Madiun Periode 2013-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	84.740	12,54	277.092	1,95	0,46
2016	85.970	12,69	294.451	2,08	0,56
2017	83.430	12,28	306.679	2,65	0,78
2018	77.750	11,42	327.536	1,60	0,34
2019	71.910	10,54	344.994	1,53	0,34

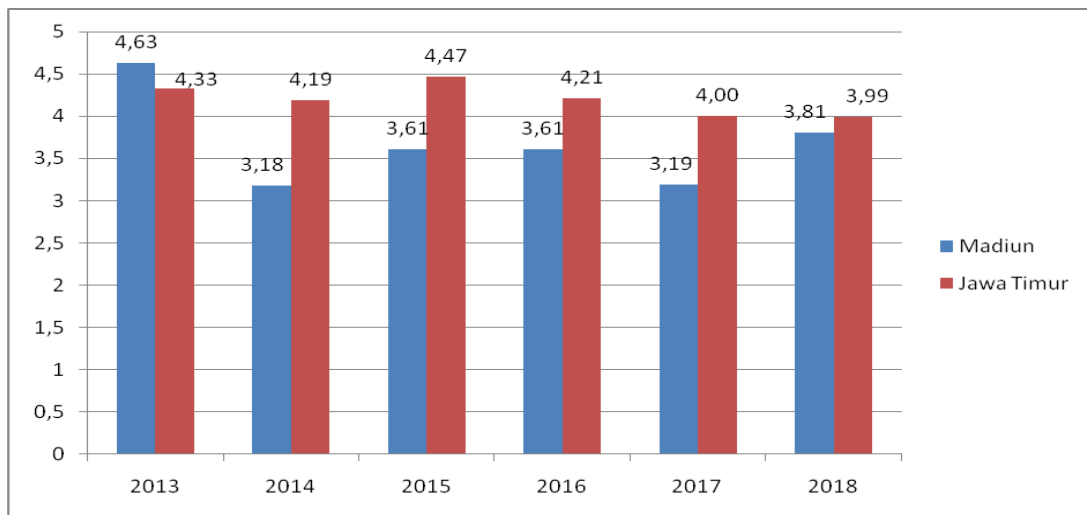
Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Madiun menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif sebagaimana tabel di atas. Jumlah penduduk miskin tahun 2015 sampai dengan 2016 yang cenderung mengalami kenaikan dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 dan 2019 Indeks kedalaman kemiskinan atau yang dikenal dengan istilah P1 mengalami penurunan dan indeks Keparahan (P2) di Kabupaten Madiun mengalami angka yang sama, hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan tetapi dengan tingkat keparahan yang sama. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman dan keparahan menunjukkan persoalan kemiskinan yang makin serius. Sejumlah faktor menjadi penyebab tingkat kemiskinan semakin dalam dan parah salah satunya tingkat inflasi. Laju inflasi Kabupaten Madiun tahun 2018 sebesar 2,71% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 2,20%.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Madiun tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 77.750 jiwa dari 83.430 jiwa pada tahun 2017. Garis kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2017 adalah Rp 306.769,00 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp 327.536. kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan Rp.344.994. Garis kemiskinan Kabupaten Madiun meningkat dari tahun ke tahun. Idealnya meningkatnya garis kemiskinan perlu diimbangi dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk, karena apabila tidak maka persentase jumlah penduduk miskin akan bertambah. Hal ini yang terjadi di Kabupaten Madiun, dimana pertumbuhan pendapatan per kapita tidak dapat mengimbangi naiknya garis kemiskinan sehingga penurunan angka kemiskinan menjadi lambat.

2. Pengangguran

Sejalan dengan fluktuasi rasio penduduk yang bekerja, maka tingkat pengangguran terbuka pun fluktuatif.

Gambar 3.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2013 – 2018



Sumber : BPS Kabupaten Madiun, Tahun 2019

Tingkat Pengangguran Terbuka Madiun secara umum lebih rendah dari pada Jawa Timur, tetapi mengalami fluktuasi. TPT di Kabupaten Madiun disebabkan karena semakin sempitnya Lapangan Pekerjaan dan Lowongan Pekerjaan di Kabupaten Madiun.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Dampak dari pandemic Covid 19 menjadi pemicu melemahnya beberapa sektor ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan melambat dari angka 5,42 hingga mencapai angka 3,18 persen , mengingat peranan sektor ekonomi yang cukup dominan seperti perdagangan, industri serta jasa akan mengalami tekanan hingga menurunkan elastisitas tenaga kerja dan berdampak pada bertambahnya tingkat pengangguran, indikasi ini dapat dilihat dari banyaknya sector usaha yang sudah tidak dapat melangsungkan usahanya dan berdampak angkatan kerja pada kelompok usia 20 sampai dengan 34 tahun

yang terserap pada lapangan kerja pada sektor-sektor yang terdampak pandemic Covid 19 tersebut.

4. Sumber Daya Alam

- a. Wilayah Kabupaten Madiun terdiri dari : 30,62% lahan sawah, 40,08% kawasan hutan dan 29,30% kawasan pemukiman dan lainnya.
- b. Cekungan air tanah kawasan Jawa Timur bagian barat di Kabupaten Madiun, berpotensi mengembangkan pengairan di kawasan kurang air.
- c. Kawasan berbukit wilayah bagian timur sepanjang pegunungan Wilis dan kawasan hutan berpotensi untuk tanaman industri.
- d. Geger, dolopo, dagangan, kebonsari (gedangsari) sebagai kawasan agropolitan.
- e. Keragaman komoditi pertanian berpotensi sebagai komoditi bahan baku industri.
- f. Sawah, hutan dan air adalah sumber penghidupan rakyat yang paling hakiki dan menuntut kesungguhan untuk menjaga kelestariaannya.

Pemanasan global menuntut pembangunan berwawasan lingkungan hidup sehingga perlindungan, penyelamatan SDA menjadi kebutuhan sepanjang masa.

- g. Pengembangan Pariwisata secara terpadu (desa wisata dan hutan wisata) yang didukung oleh komitmen Bupati beserta seluruh jajarannya, pemerintah (pusat, provinsi, dan kab/kota sekitar), swasta, masyarakat, akademisi, dan media massa).

5. Letak yang Strategis

- a. Kota Madiun sebagai salah satu pusat pertumbuhan Jawa Timur paling barat terletak di tengah wilayah Kabupaten Madiun.
- b. Caruban sebagai pusat pemerintahan, berada dalam lintasan Surabaya – Madiun – Solo berpotensi sebagai pusat pelayanan dan kota transit.
- c. Berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro daerah penghasil minyak, berpotensi sebagai *hinterland* pengembangan perekonomian.
- d. Pembangunan jalan tol berpengaruh terhadap percepatan pengembangan SSWP I

6. Sosial Ekonomi Kemasyarakatan

- a. kelistrikan dan sarana komunikasi masuk desa.
- b. meningkatnya jalan aspal di pedesaan.
- c. pasar terbuka lintas daerah.

- d. usaha skala kecil tidak memerlukan investasi besar namun memiliki ketahanan dan kemampuan menyerap tenaga kerja.
- e. kerukunan, gotong - royong dan religius.
- f. keamanan dan ketentraman.
- g. keswadayaan dalam pembangunan desa.

7. Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah penduduk yang terus berkembang (bonus demografi) memerlukan ketersediaan fasilitas infrastruktur, pelayanan dasar, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang memadai
- b. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar potensial namun belum dapat diandalkan karena kualitasnya rendah, sementara era global menuntut kemampuan kompetitif.
- c. Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing yang lebih berkompeten dan bersertifikat
- d. Lapangan pekerjaan menuntut SDM terampil dan menguasai teknologi.
- e. Pendidikan life skill berperan penting menghadapi persaingan.
- f. Jumlah masyarakat perempuan cukup besar perlu difasilitasi ruang geraknya

8. Iklim usaha

- a. Keragaman produksi pertanian berpotensi sebagai bahan baku industri namun kemampuan/ daya saingnya rendah
- b. Usaha mikro tidak memerlukan modal besar, namun memiliki ketahanan.
- c. Kemitraan dengan usaha besar dapat menyelesaikan kebutuhan teknologi permodalan dan pemasaran.
- d. Investor skala besar menuntut jaminan ketersediaan lahan, jaringan transportasi, keamanan lingkungan, hubungan industrial dan kepastian hukum.
- e. Rendahnya daya saing produk lokal dengan produk impor yang kualitasnya lebih baik, bersertifikat dan harganya lebih murah

9. Perubahan era pembangunan

- a. Perkembangan teknologi informasi dapat mempercepat proses kemajuan, namun juga menimbulkan eksek degradasi moral. Akulturasi budaya tidak dapat dihindari sebagai proses modernisasi, dalam hal ini perlu diantisipasi adanya penetrasi budaya asing yang kuat dan cepat dan pengaruhnya terhadap kelompok masyarakat generasi muda.

- b. Era reformasi menuntut agenda memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan sehingga masyarakat dapat terlayani kebutuhan hidupnya. Kemantapan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya perlu proses berkelanjutan seiring dinamika masyarakat yang semakin kritis dari waktu ke waktu.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya dan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai demokrasi dan peran serta masyarakat. Secara konkrit pengaturan ini dilakukan dengan telah diterbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Sebagai sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan anggaran, arah kebijakan penganggaran pada tahun 2020 disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang mempunyai lokus pada pencapaian hasil dari penggunaan input yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD dengan menggunakan pendekatan ***money follow programme***.

Melalui prinsip tersebut, mengandung makna program dan kegiatan strategis yang mempunyai daya ungkit yang besar terhadap pencapaian indikator kinerja utama daerah mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa pencapaian manfaat dari program dan kegiatan itu menjadi jelas, dan hal ini menjadi pedoman pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyusunan kerangka pendanaan pada tahun 2020.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Proyeksi keuangan daerah memiliki peran penting dalam menentukan daya dukung perencanaan pembangunan dalam RKPD di tahun berjalan. Dinamika

keuangan daerah di tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan acuan untuk memperkirakan posisi keuangan daerah di tahun perencanaan RKPD. Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang bisa dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berlakunya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah. Untuk itu, pengaturan alokasi sumber daya daerah yang dapat memberi kepuasan bagi masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja serta perwujudan layanan publik yang efisien, menjadi sangat penting.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan PAD yang sah
- b) Dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait konservasi lingkungan, penanganan bencana alam, dan perpindahan pusat kota Kabupaten Madiun ke Kecamatan Mejayan,
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur, SDM dan Kepariwisata Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya dan mensinergikan Potensi Daerah.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan,

pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dan pelayanan berbasis teknologi informasi.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat.

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja pegawai.

Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB, tambahan penghasilan PNS guru dan non guru tamsil bahaya radiasi, sertifikasi guru, dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian. Proyeksi belanja tahun 2020 sudah mengakomodir penggajian CPNS hasil penerimaan CPNS di tahun 2019 serta tunjangan Kinerja ASN yang baru diberlakukan pada tahun 2019.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dialokasikan

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dialokasikan stagnan

d. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemeritahan daerah, dalam hal ini berupa hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara

selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Belanja Bantuan Sosial diprediksi mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019-2023.

- f. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa diproyeksikan mengalami kenaikan.
- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, bantuan kepada partai politik dan bantuan keuangan ke desa/lembaga untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Mulai tahun 2020 diproyeksikan stagnan karena pada tahun 2020 Anggaran Dana Desa telah mencapai 20% dimana hal ini menjadi janji politik dari Bupati terpilih periode 2018-2023.
- h. Belanja Tak Terduga
Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2020 tertuang dalam tabel di bawah.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Madiun tahun 2020 diarahkan pada :

- a. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, ekonomi kreatif dan produktif, program prioritas pembangunan daerah yang tidak terlepas dari pencegahan dan penanganan Covid-19 beserta dampaknya;
- b. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif;
- c. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di pedesaan melalui pendekatan program padat karya;

- d. Stimulasi pertumbuhan sektor riil melalui penyediaan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro;
- e. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik.
- f. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.
- g. Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi, baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundangan;
- h. Melanjutkan proyek-proyek strategis yang bersifat (*multi years*) sesuai tahapan.
- i. Optimalisasi belanja daerah, meliputi:
 - 1) Peningkatan kompetensi dan produktifitas pegawai
 - 2) Penurunan prosentasi belanja tidak langsung melalui efisiensi belanja pegawai, program dan kegiatan terpadu kerjasama lintas PD
 - 3) Peningkatan alokasi anggaran belanja langsung untuk pengembangan bidang/sector yang produktif dan strategis (contohnya: infrastruktur dan sector pariwisata)
 - 4) Pengelolaan dana hibah secara efisien, tepat guna dan tepat sasaran
 - 5) Belanja penanganan bencana alam dan paska bencana alam dialokasikan dengan pola "ploting mengambang" yang sewaktu-waktu dapat dibelanjakan.
 - 6) Memenuhi prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada lokus tertentu serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
 - 7) Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi Pendapatan Asli Daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.

Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.912.892.978.077,18	1.704.928.076.925,00	(207.964.901.152,18)	(10,87)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	219.449.851.124,18	183.946.344.890,00	(35.503.506.234,18)	(16,18)
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	68.446.317.900,00	38.287.350.000,00	(30.158.967.900,00)	(44,06)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.861.335.590,00	7.537.987.375,00	(2.323.348.215,00)	(23,56)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.605.043.671,18	7.411.887.452,00	806.843.780,82	12,22
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134.537.153.963,00	130.709.120.063,00	(3.828.033.900,00)	(2,85)
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.290.525.673.000,00	1.147.176.609.000,00	(143.349.064.000,00)	(11,11)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	66.100.565.000,00	61.799.226.000,00	(4.301.339.000,00)	(6,51)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	917.406.266.000,00	826.600.103.000,00	(90.806.163.000,00)	(9,90)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	307.018.842.000,00	258.777.280.000,00	(48.241.562.000,00)	(15,71)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	402.917.453.953,00	373.805.123.035,00	(29.112.330.918,00)	(7,23)
1.3.1	Pendapatan Hibah	64.345.296.944,00	73.503.619.855,00	9.158.322.911,00	14,23
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	108.875.857.009,00	79.304.716.180,00	(29.571.140.829,00)	(27,16)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	162.591.055.000,00	160.451.269.000,00	(2.139.786.000,00)	(1,32)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.544.609.000,00	4.446.953.000,00	(97.656.000,00)	(2,15)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	62.560.636.000,00	56.098.565.000,00	(6.462.071.000,00)	(10,33)

2	BELANJA	1.981.478.483.890,97	1.774.513.582.738,79	(206.964.901.152,18)	(10,44)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.206.370.627.095,23	1.197.798.049.517,85	(8.572.577.577,38)	(0,71)
2.1.1	Belanja Pegawai	768.150.384.559,23	750.997.294.981,85	(17.153.089.577,38)	(2,23)
2.1.3	Belanja Subsidi	515.000.000,00	515.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	31.416.881.860,00	30.392.481.860,00	(1.024.400.000,00)	(3,26)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.895.000.000,00	8.895.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.886.281.000,00	3.408.665.000,00	(1.477.616.000,00)	(30,24)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	390.507.079.676,00	372.089.607.676,00	(18.417.472.000,00)	(4,72)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	31.500.000.000,00	29.500.000.000,00	1.475,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	775.107.856.795,74	576.715.533.220,94	(198.392.323.574,80)	(25,60)
2.2.1	Belanja Pegawai	27.624.844.662,00	26.027.374.940,00	(1.597.469.722,00)	(5,78)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	431.765.818.870,05	353.060.454.350,77	(78.705.364.519,28)	(18,23)
2.2.3	Belanja Modal	315.717.193.263,69	197.627.703.930,17	(118.089.489.333,52)	(37,40)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(68.585.505.813,79)	(69.585.505.813,79)	(1.000.000.000,00)	1,46
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	74.085.505.813,79	74.085.505.813,79	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.985.505.813,79	73.985.505.813,79	0,00	0,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00

3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.500.000.000,00	4.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(18,18)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	4.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(18,18)
	PEMBIAYAAN NETTO	68.585.505.813,79	69.585.505.813,79	1.000.000.000,00	1,46
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dokumen RKPD Kabupaten Madiun tahun 2020 secara substantif merupakan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023. Sehingga sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Madiun pada Tahun 2020 secara periodik dan normatif merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Perubahan RKPD tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Madiun tahun 2005-2025, RPJMD 2018-2023, RKP Tahun 2020, dan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2020, utamanya yang terkait dengan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja dan Pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari Visi dan misi Kepala Daerah yang dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalnya. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Madiun periode RPJMD 2018 – 2023 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka motto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah, **AYO APIK BARENG**... Ayo Apik Bareng adalah seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Penjabaran dari Visi, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Madiun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;

- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Berangkat daripada Visi dan Misi tersebut maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana berikut ini.

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun**, maka tujuan pembangunan adalah menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara. Dengan sasaran pembangunan adalah menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik**, maka tujuan pembangunan adalah meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good government) untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah;
- c. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.

Dalam rangka pencapaian misi **Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan**, merupakan pelaksanaan pembangunan yang saling bergantung antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dimana pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dengan menjaga keutuhan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian misi **Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan**, maka tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal**, maka tujuan pembangunan adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak	Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun	Menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara.	Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat
	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good government) untuk meningkatkan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah; ▪ Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah; ▪ Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan ▪ Meningkatkan pengelolaan Lingkungan Hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya perekonomian masyarakat ▪ Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian ▪ Terkendalinya inflasi daerah ▪ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan	Meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kualitas pendidikan ▪ Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ▪ Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya nilai – nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat ▪ Meningkatnya pelestarian budaya

Sumber: RPJMD Kab Madiun 2018-2023

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Ekonomi Digital

Ekonomi digital adalah suatu hal yang kompleks dan merupakan fenomena yang baru muncul terkait dengan aspek-aspek ekonomi mikro, ekonomi makro, dan teori organisasi dan administrasi.

Di Indonesia transaksi digital semakin berkembang. Penggunaan E-banking dalam transaksi ekonomi semakin berkembang pesat. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia juga ikut bersaing dalam dunia ekonomi digital.

Revolusi Industri 4.0

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin.

Berikutnya, pada revolusi industri generasi kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (*combustion chamber*). Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dll yang mengubah wajah dunia secara signifikan.

Kemudian, revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet.

Pada revolusi industri generasi keempat, ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.

Pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-

pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia atau Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Oleh sebab itu, perusahaan harus peka dan melakukan introspeksi diri sehingga mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sustainable Development Goals (SDG's)

Konsep *Sustainable Development Goals (SDG's)* merupakan kelanjutan dari konsep *Millenium Development Goals (MDG's)*. SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan disektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan Negara-negara diseluruh dunia, baik negara maju dan negara berkembang.

Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDGs dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan *governance*. Pilar pembangunan manusia menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Upaya pencapaian SDGs di pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan. Sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh. Membangun infrstruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan.

Upaya pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumberdaya

alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati, mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sedangkan tujuan dalam bidang *governance*, upaya mencapai tujuan SDGs antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.

PANDEMI COVID-19

Pandemi Koronavirus 2019–2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh.

4.2.2. Isu Strategis Regional

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA adalah salah satu bentuk kerjasama antar anggota ASEAN dalam bidang perekonomian. Polanya adalah dengan mengintegrasikan sistem ekonomi semua negara dengan menciptakan perdagangan bebas. Tujuan dari MEA adalah agar semua negara anggota memiliki tingkat perekonomian yang sama sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan negara agar lebih maju, MEA dipersiapkan untuk mewujudkan intetasi wawasan ASEAN 2020.

Ciri – ciri sistem MEA di beberapa negara ASEAN :

1. Pembangunan bidang ekonomi yang merata

Pengertian MEA memiliki tujuan agar tiap negara memiliki kesempatan yang sama dalam perdagangan. Jadi tidak hanya negara maju saja yang bisa mengembangkan ekspansinya, yang masih berkembang pun memiliki kesempatan yang sama. Ini akan menciptakan suasana yang saling melengkapi.

2. Ekonomi bersifat kompetitif

Karena fungsi dari MEA adalah mewujudkan perdagangan yang bebas, maka kompetisi yang diciptakan pun semakin pesat karena setiap negara memiliki

kesempatan yang sama dan bebas mengembangkan kerjasama ekonomi. Inilah yang dinamakan integrasi yang mana industri bisa mengembangkan pasar tanpa batasan negara. Karena itulah negara harus memiliki modal yang cukup agar menginspirasi dampak dari MEA.

3. Daerah ekonomi terintegrasi

Dengan adanya program ini dijelaskan bahwa setiap anggota memiliki kebebasan cukup besar untuk mengembangkan pasar. Ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa negara berkembang untuk memperkenalkan produk terbaiknya ke berbagai negara. Dengan begitu maka pemerataan ekonomi bisa tercapai.

Pandemi Virus Corona COVID-19 masih terus menghantui negara-negara di dunia, khususnya Asia Tenggara. Berbagai negara memang sudah melonggarkan kebijakan pembatasan sosial, tetapi kasus masih naik di beberapa negara.

Pada perkembangan terakhir Negara Indonesia menempati urutan teratas jumlah kasus Covid-19.

4.2.3. Isu Strategis Nasional

Bonus Demografi

Transisi demografi sangat menguntungkan ketika penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) mengalami jumlah terbesar dibandingkan dengan proporsi penduduk usia non-produktif. Karena pada proporsi penduduk ini, terdapat suatu keuntungan yang bisa dinikmati oleh suatu negara sebagai batu loncatan untuk memajukan negara yang bersangkutan.

Di dalam ilmu demografi, kondisi ini disebut Bonus Demografi. Dan Indonesia diprediksi akan mengalami Bonus Demografi pada tahun 2020-2030 yang akan datang.

Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial-ekonomi. Salah satunya menyebabkan tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Hal ini sejalan dengan laporan PBB, yang menyatakan bahwa dibandingkan dengan negara Asia lainnya, angka ketergantungan penduduk Indonesia akan terus menurun sampai 2020.

Dengan adanya kondisi bonus demografi, tentu bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memajukan kesejahteraan serta memakmurkan masyarakat apabila masyarakat usia produktif memiliki kualitas sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara.

Apabila suatu negara gagal dalam memanfaatkan bonus demografi ini maka, jelas akan terjadi kerugian yang sangat besar bagi negara yang bersangkutan khususnya Indonesia.

Maka dari itu, untuk meraih manfaat dari bonus demografi ini diperlukan usaha bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait serta pemerintah sebagai *agent of development* yang ada disuatu negara agar manfaat bonus demografi ini menjadi semakin kuat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan pemerintah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- Pendidikan anak usia dini
- Pendidikan dasar
- Pendidikan kesetaraan

2. Kesehatan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- Pemenuhan kebutuhan air minum sehari – hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban

6. Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing – masing yang sekurang – kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pandemi Covid-19

Kasus virus corona terus menunjukkan peningkatan di berbagai kawasan di dunia, termasuk di negara-negara Asia Tenggara. Data hingga akhir Juni 2020, Indonesia mencatatkan kasus tertinggi di antara negara-negara lain di Asia Tenggara, khususnya yang tergabung dalam ASEAN.

Kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 54.010 kasus, jauh di atas Singapura yang sebelumnya mencatatkan kasus tertinggi dengan 43.459 kasus. Adapun Laos menjadi negara di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah kasus terendah yaitu 19 kasus.

1.2.4. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi Provinsi Jawa Timur dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Provinsi Jawa Timur :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Kinerja pada aspek pendidikan dapat dilihat antara lain pada indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif.

Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya. Peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

2. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat.

Pembangunan ekonomi Jawa Timur semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

3. Pandemi Covid-19.

Perkembangan Pandemi Covid-19 di Jawa Timur merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data 10 Juli 2020, jumlah kasus corona di Jatim mencapai 15.484 kasus. Tertinggi tingkat Nasional.

1.2.5. Isu Strategis Kabupaten Madiun

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu – isu Strategis berdasarkan Analisis permasalahan

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Madiun yang diperoleh dari analisis permasalahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Pembangunan SDM lambat

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Kinerja bidang kesehatan lambat hal ini ditunjukkan dengan relatif rendahnya AHH Kabupaten Madun dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang didasarkan pada angka kematian ibu, bayi dan balita yang masing tinggi; serta standart pelayanan kesehatan di Kabupaten Madiun yang belum optimal
- Lambatnya kinerja bidang pendidikan disebabkan oleh Kompetensi Guru / tenaga pendidik yang masih kurang serta belum optimalnya akses pendidikan yang diperlihatkan dari angka partisipasi sekolah jenjang SMP yang cenderung menurun
- Jumlah penduduk miskin masih tinggi yang disebabkan oleh keberdayaan masyarakat relatif rendah; angka pengangguran terbuka masih flutuatif;

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung naik; serta angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi

2. Pertumbuhan Ekonomi mengalami perlambatan

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Produktivitas sektor pertanian rendah yang disebabkan karena terabaikannya komoditas utama yang dimiliki oleh Kabupaten Madiun
- Sektor lain bergerak secara terfragmentasi yang disebabkan karena sektor industri kurang mampu menjadi pengungkit perkembangan sektir lainnya; sektor perdagangan dan jasa masih fluktuatif; serta kinerja sektor pariwisata tidak optimal

3. Tata Kelola Pemerintahan belum optimal

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Kinerja akuntabilitas pemerintah daerah belum optimal yang disebabkan oleh tingkat pengawasan masih rendah; tingkat kemandirian fiskal masih rendah; serta manajemen sumber daya manusia belum optimal
- Kinerja pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh sistem mekanisme pelayanan publik belum berjalan baik serta sistem informasi manajemen (E-Government) pelayanan publik belum terintegrasi
- Adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang disebabkan oleh masih adanya angka kriminalitas

4. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada permasalahan yang dihadapi daerah adalah ketimpangan wilayah yang disebabkan oleh belum terpenuhinya infrastruktur dasar dan sarana prasarana pemukiman yang layak; ketimpangan aksesibilitas dan transportasi wilayah; tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang dan kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup; serta tingginya potensi bencana dan kerusakan sarana prasarana wilayah.

5. Penanganan Covid-19

Berdasarkan peta persebaran Covid-19 di Jawa Timur pada awal Juli Tahun 2020, Kabupaten Madiun termasuk dalam zona kuning atau dikategorikan daerah daerah dengan resiko rendah dari penularan Covid-19. Namun demikian, upaya-upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 berikut dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat tetap menjadi prioritas di tahun 2020 ini.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020 harus relevan dengan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Rencana kerja dan pendanaan daerah pada perubahan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020 terdiri dari uraian tentang bidang urusan pemerintahan, program prioritas, indikator program (outcome), capaian kinerja program dan kerangka pendanaan tahun 2020, serta perangkat daerah penanggung jawab.

Program prioritas yang direncanakan pembiayaannya pada tahun 2020 disusun berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2020 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Madiun yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020 triwulan ke II serta program kegiatan penanganan COVID-19 . Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Adapun rencana kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80.01 -		3.020.216.412,00	1.915.468.946,00	(1.104.747.466,00)	(36,58)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	2	2.131.186.750,00	1.372.700.956,00	(758.485.794,00)	(35,59)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	24 -	2	889.029.662,00	507.767.990,00	(381.261.672,00)	(42,89)	
3	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini		45.34 -		2.902.539.203,00	1.897.942.250,00	(1.004.596.953,00)	(34,61)	
91	Peningkatan Mutu PAUD	Wilayah Kabupaten Madiun	55 %	5	608.260.000,00	255.251.650,00	(353.008.350,00)	(58,04)	
93	Peningkatan Mutu Kelembagaan PAUD	Wilayah Kabupaten Madiun	85.03 %	2	2.294.279.203,00	1.642.690.600,00	(651.588.603,00)	(28,40)	
15	Program Pengembangan Nilai Budaya		42.99 %		1.313.500.000,00	1.201.242.850,00	(112.257.150,00)	(8,55)	
43	Pelestarian Kesenian Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	55 -	2	462.500.000,00	350.242.850,00	(112.257.150,00)	(24,27)	
44	Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi	Wilayah Kabupaten Madiun	11 -	5	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00	
45	Pengembangan Kelembagaan Budaya	Wilayah Kabupaten Madiun	5 -	5	426.000.000,00	426.000.000,00	0,00	0,00	
18	Program Pendidikan Non Formal		100 -		1.200.682.000,00	780.231.000,00	(420.451.000,00)	(35,02)	
25	Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Wilayah Kabupaten Madiun	300 -	2	1.100.682.000,00	680.231.000,00	(420.451.000,00)	(38,20)	
30	BOP Madin (Banprop)	Wilayah Kabupaten Madiun	222 -	8	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		96.92 %		21.962.460.000,00	20.719.256.350,00	(1.243.203.650,00)	(5,66)	
61	Peningkatan Mutu Pendidik SD	Wilayah Kabupaten Madiun	2098 -	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Peningkatan Mutu Pendidik SMP	Wilayah Kabupaten Madiun	1023 -	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD dan Tenaga Administrasi	Wilayah Kabupaten Madiun	200 -	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wilayah Kabupaten Madiun		2	21.294.000.000,00	10.143.400.000,00	(11.150.600.000,00)	(52,36)	
68	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Wilayah Kabupaten Madiun		5	26.460.000,00	26.460.000,00	0,00	0,00	
69	Pembinaan, Pengembangan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wilayah Kabupaten Madiun		5	642.000.000,00	20.996.350,00	(621.003.650,00)	(96,73)	
70	Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di masa pandemi Covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	10.504.400.000,00	10.504.400.000,00	0,00	

71	Penunjang Knerja Pendidikan Dasar di masa pandemi Covid-19 (Banprop)	Wilayah Kabupaten Madiun		8	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
24	Program Pendidikan SD		100 -		27.820.918.400,00	18.469.526.053,00	(9.351.392.347,00)	(33,61)
189	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Penilaian SD	Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	2	807.497.450,00	374.098.753,00	(433.398.697,00)	(53,67)
191	Peningkatan Mutu Peserta Didik SD	Wilayah Kabupaten Madiun	31 -	2	529.796.950,00	1.811.803.300,00	1.282.006.350,00	241,98
192	Peningkatan Mutu Kelembagaan SD	Wilayah Kabupaten Madiun	89 -	5	26.483.624.000,00	16.283.624.000,00	(10.200.000.000,00)	(38,51)
25	Program Pendidikan SMP		100 -		37.030.838.750,00	16.778.589.550,00	(20.252.249.200,00)	(54,69)
192	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Penilaian Pendidikan SMP	Wilayah Kabupaten Madiun	54.39 -	2	295.358.850,00	89.287.550,00	(206.071.300,00)	(69,77)
193	Peningkatan Mutu Peserta Didik SMP	Wilayah Kabupaten Madiun	70 -	5	851.242.900,00	853.090.000,00	1.847.100,00	0,22
194	Peningkatan Mutu Kelembagaan SMP	Wilayah Kabupaten Madiun	85 -	2	35.884.237.000,00	15.836.212.000,00	(20.048.025.000,00)	(55,87)
26	Program Penguatan Karakter Keagamaan		3 -		3.183.000.000,00	3.183.000.000,00	0,00	0,00
1	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SD	Wilayah Kabupaten Madiun	3 -	2	2.508.000.000,00	627.000.000,00	(1.881.000.000,00)	(75,00)
2	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SMP	Wilayah Kabupaten Madiun	3 -	2	675.000.000,00	168.750.000,00	(506.250.000,00)	(75,00)
3	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SD di masa pandemi Covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	1.881.000.000,00	1.881.000.000,00	0,00
4	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SMP di masa pandemi Covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	506.250.000,00	506.250.000,00	0,00
				JUMLAH	98.434.154.765,00	64.945.256.999,00	(33.488.897.766,00)	(34,02)

MADIUN, 14 Juli 2020

KEPALA DINAS

Drs. P. W. WIDODO

NIP. 19610328 199003 1 002

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		1.808.721.420,00	1.296.547.170,00	(512.174.250,00)	(28,32)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawainan, dan sarana prasarana	Desa Jiwan	100 %	2	1.723.775.920,00	1.165.276.670,00	(558.499.250,00)	(32,40)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Desa Jiwan	9 -	2	84.945.500,00	84.945.500,00	0,00	0,00	
3	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	-		2	0,00	46.325.000,00	46.325.000,00	0,00	
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		20.30 -		3.181.684.000,00	2.812.460.364,00	(369.223.636,00)	(11,60)	
54	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Desa Jiwan	100 %	13	1.528.848.000,00	687.981.600,00	(840.866.400,00)	(55,00)	
82	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Desa Jiwan	75 -	5	260.400.000,00	1.227.000,00	(259.173.000,00)	(99,53)	
86	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Desa Jiwan	30 -	5	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)	
87	Penyediaan Obat Gizi (DAK Penugasan 2019)	Desa Jiwan	100 -	12	253.807.000,00	253.807.000,00	0,00	0,00	
96	Pengembangan Taman Posyandu (Banprop)	Desa Jiwan	62 -	8	55.000.000,00	3.340.500,00	(51.659.500,00)	(93,93)	
97	Pendampingan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) - (Banprop)	Desa Jiwan	10 -	8	121.029.000,00	4.425.500,00	(116.603.500,00)	(96,34)	
98	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Desa Jiwan	100 %	5	462.000.000,00	3.558.100,00	(458.441.900,00)	(99,23)	
99	Peningkatan Pelayanan dan Intervensi GiziII Masyarakat	Desa Jiwan	90.10 -	5	215.000.000,00	11.652.600,00	(203.347.400,00)	(94,58)	
101	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa Jiwan	50 -	5	234.600.000,00	81.006.934,00	(153.593.066,00)	(65,47)	
105	Jaminan Persalinan (Jampersal) (Penanganan COVID-19)	Desa Jiwan		13	0,00	840.866.400,00	840.866.400,00	0,00	
106	Pengembangan Taman Posyandu (Banprop) (Penanganan COVID-19)	Desa Jiwan		8	0,00	51.659.500,00	51.659.500,00	0,00	
107	Pendampingan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) - (Banprop) (Penanganan COVID-19)	Desa Jiwan		8	0,00	116.603.500,00	116.603.500,00	0,00	
108	Peningkatan Pelayanan Kesehatan keluarga di masa pandemi Covid-19	-		10	0,00	756.331.730,00	756.331.730,00	0,00	
22	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		100 %		4.726.879.200,00	7.875.289.201,00	3.148.410.001,00	66,61	
12	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Desa Jiwan	100 %	2	231.372.600,00	3.600.000,00	(227.772.600,00)	(98,44)	
16	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Desa Jiwan	48 -	2	866.390.600,00	549.615.201,00	(316.775.399,00)	(36,56)	
18	Peningkatan Imunisasi , Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Desa Bagi,Desa Jiwan	80 -	5	151.400.000,00	24.608.000,00	(126.792.000,00)	(83,75)	
23	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Desa Balerejo,Desa Bedoho,Desa Bibrik,Desa Jiwan		12	3.477.716.000,00	2.505.809.750,00	(971.906.250,00)	(27,95)	
24	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Penanganan COVID-19) (DAK PENUGASAN)	Desa Jiwan		12	0,00	971.906.250,00	971.906.250,00	0,00	
25	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di masa pandemi Covid-19	Desa Jiwan		10	0,00	153.600.000,00	153.600.000,00	0,00	

26	Peningkatan Surveillance, Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Covid-19	Desa Jiwan		5	0,00	3.666.150.000,00	3.666.150.000,00	0,00
25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya		13 -		13.930.351.000,00	2.310.180.810,00	(11.620.170.190,00)	(83,42)
24	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya (DAK Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar)	Desa Jiwan	100 -	12	2.125.251.000,00	2.125.251.000,00	0,00	0,00
26	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar)	Desa Jiwan	100 -	2	205.100.000,00	184.929.810,00	(20.170.190,00)	(9,83)
34	Pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Desa Jiwan	10 -	6	11.600.000.000,00	0,00	(11.600.000.000,00)	(100,00)
38	Program Pelayanan Kesehatan		79 -		17.909.091.214,00	19.011.652.395,00	1.102.561.181,00	6,16
1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Desa Jiwan	50000 -	10	13.853.660.560,00	9.964.971.000,00	(3.888.689.560,00)	(28,07)
8	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Desa Jiwan	60 %	5	90.000.000,00	3.637.300,00	(86.362.700,00)	(95,96)
11	Pelayanan Kesehatan Primer	Desa Jiwan	94 %	5	249.749.442,00	55.944.442,00	(193.805.000,00)	(77,60)
16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ponkesdes	Desa Jiwan	100 %	8	1.247.544.000,00	1.151.088.000,00	(96.456.000,00)	(7,73)
17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus	Desa Jiwan	31 -	5	460.199.212,00	113.913.354,00	(346.285.858,00)	(75,25)
24	Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Standart (Banprop)	Desa Jiwan	100 -	8	63.000.000,00	61.800.000,00	(1.200.000,00)	(1,90)
71	Akreditasi Puskesmas	Desa Jiwan	100 %	13	1.944.938.000,00	165.387.400,00	(1.779.550.600,00)	(91,50)
77	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat yang berdampak COVID-19	Desa Jiwan		10	0,00	4.881.510.299,00	4.881.510.299,00	0,00
78	Akreditasi Puskesmas (Penanganan COVID-19)	Desa Jiwan		13	0,00	1.779.550.600,00	1.779.550.600,00	0,00
79	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus Covid-19	Desa Jiwan		5	0,00	833.850.000,00	833.850.000,00	0,00
39	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan		100 %		3.192.425.400,00	2.714.586.500,00	(477.838.900,00)	(14,97)
4	Distribusi Obat dan E-Logistik	Desa Jiwan	100 -	13	145.488.000,00	88.213.500,00	(57.274.500,00)	(39,37)
5	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Desa Jiwan	100 -	2	74.995.000,00	4.950.000,00	(70.045.000,00)	(93,40)
8	Pengelolaan dan Pengawasan Alat Kesehatan	Desa Jiwan	100 -	2	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
19	Pengadaan Obat, Perbekalan Farmasi dan Sarana Kefarmasian (DAK Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian)	Desa Jiwan	100 %	12	2.494.206.000,00	0,00	(2.494.206.000,00)	(100,00)
21	Penunjang DAK Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian	Desa Jiwan	100 -	2	60.831.000,00	25.525.000,00	(35.306.000,00)	(58,04)
24	Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (pajak Rokok)	Desa Jiwan	65 %	10	75.573.000,00	0,00	(75.573.000,00)	(100,00)
28	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Obat dan Makanan (Pajak Rokok)	Desa Jiwan	66 %	10	130.000.000,00	17.300.000,00	(112.700.000,00)	(86,69)
30	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sarana Kesehatan	Desa Jiwan	75 %	2	193.332.400,00	27.117.500,00	(166.214.900,00)	(85,97)
32	Pengadaan Obat, Perbekalan Farmasi dan Sarana Kefarmasian (Penanganan COVID-19) (DAK Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian)	Desa Jiwan		12	0,00	2.494.206.000,00	2.494.206.000,00	0,00
33	Distribusi Obat dan E-Logistik (Penanganan COVID-19)	Desa Jiwan		13	0,00	57.274.500,00	57.274.500,00	0,00
42	Program Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)		100 -		17.318.043.000,00	17.318.043.000,00	0,00	0,00
27	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kebonsari (DAK Non Fisik)	Desa Singgahan	100 %	13	644.178.000,00	131.825.600,00	(512.352.400,00)	(79,54)
28	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Gantrung (DAK Non Fisik)	Desa Sidorejo	100 %	13	622.578.000,00	113.159.500,00	(509.418.500,00)	(81,82)
29	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Geger (DAK Non Fisik)	Desa Purworejo	100 %	13	661.628.000,00	88.585.050,00	(573.042.950,00)	(86,61)
30	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kaibon (DAK Non Fisik)	Desa Kaibon	100 %	13	620.178.000,00	164.793.500,00	(455.384.500,00)	(73,43)
31	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Bangunsari (DAK Non Fisik)	Desa Dolopo	100 %	13	677.778.000,00	162.745.500,00	(515.032.500,00)	(75,99)
32	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mlilir (DAK Non Fisik)	Kecamatan DOLOPO	100 %	13	580.283.000,00	75.855.250,00	(504.427.750,00)	(86,93)
33	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Dagangan (DAK Non Fisik)	Desa Dagangan	100 %	13	690.978.000,00	160.900.000,00	(530.078.000,00)	(76,71)
34	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas jetis (DAK Non Fisik)	Desa Jetis	100 %	13	672.928.000,00	83.800.000,00	(589.128.000,00)	(87,55)
35	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Wungu (DAK Non Fisik)	Kecamatan WUNGU	100 -	13	562.998.000,00	174.300.000,00	(388.698.000,00)	(69,04)

36	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mojopurno (DAK Non Fisik)	Desa Mojopurno	100 %	13	551.028.000,00	152.600.000,00	(398.428.000,00)	(72,31)
37	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kare (DAK Non Fisik)	Kecamatan KARE	100 %	13	667.078.000,00	200.000.000,00	(467.078.000,00)	(70,02)
38	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Gemarang (DAK Non Fisik)	Desa Gemarang	100 %	13	687.558.000,00	210.017.300,00	(477.540.700,00)	(69,45)
39	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Saradan (DAK Non Fisik)	Desa Sugihwaras	100 %	13	692.438.000,00	241.300.000,00	(451.138.000,00)	(65,15)
40	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Sumbersari (DAK Non Fisik)	Desa Sumbersari	100 %	13	663.172.000,00	123.451.800,00	(539.720.200,00)	(81,38)
41	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Pilangkenceng (DAK Non Fisik)	Desa Kenongorejo	100 %	13	666.953.000,00	215.000.000,00	(451.953.000,00)	(67,76)
42	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Krebet (DAK Non Fisik)	Desa Krebet	100 %	13	617.038.000,00	127.200.000,00	(489.838.000,00)	(79,39)
43	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mejayan (DAK Non Fisik)	Desa Mejayan	100 %	13	686.838.000,00	165.959.750,00	(520.878.250,00)	(75,84)
44	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Klecorejo (DAK Non Fisik)	Desa Klecorejo	100 %	13	509.178.000,00	146.800.000,00	(362.378.000,00)	(71,17)
45	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Wonoasri (DAK Non Fisik)	Desa Wonoasri	100 -	13	692.078.000,00	58.103.000,00	(633.975.000,00)	(91,60)
46	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Balerejo (DAK Non Fisik)	Desa Balerejo	100 %	13	695.908.000,00	205.131.380,00	(490.776.620,00)	(70,52)
47	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Simo (DAK Non Fisik)	Desa Simo	100 %	13	528.288.000,00	111.000.000,00	(417.288.000,00)	(78,99)
48	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Madiun (DAK Non Fisik)	Desa Tiron	100 %	13	530.028.000,00	98.000.000,00	(432.028.000,00)	(81,51)
49	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Dimong (DAK Non Fisik)	Desa Dimong	100 %	13	523.968.000,00	89.800.000,00	(434.168.000,00)	(82,86)
50	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Sawahan (DAK Non Fisik)	Desa Kajang	100 %	13	609.938.000,00	63.900.000,00	(546.038.000,00)	(89,52)
51	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Jiwan (DAK Non Fisik)	Desa Jiwan	100 %	13	611.228.000,00	143.000.000,00	(468.228.000,00)	(76,60)
52	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Klagen Serut (DAK Non Fisik)	Desa Klagenserut	100 %	13	568.448.000,00	119.100.000,00	(449.348.000,00)	(79,05)
53	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK NON FISIK)	Desa Jiwan	100 -	13	54.162.000,00	43.132.880,00	(11.029.120,00)	(20,36)
54	Bantuan Operasional Kegiatan UKM Kabupaten	Desa Jiwan	100 -	13	1.029.189.000,00	339.351.950,00	(689.837.050,00)	(67,03)
55	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kebonsari (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Singgahan		13	0,00	512.352.400,00	512.352.400,00	0,00
56	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Gantrung (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Sidorejo		13	0,00	509.418.500,00	509.418.500,00	0,00
57	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Geger (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Purworejo		13	0,00	573.042.950,00	573.042.950,00	0,00
58	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kaibon (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Kaibon		13	0,00	455.384.500,00	455.384.500,00	0,00
59	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Bangunsari (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Dolopo		13	0,00	515.032.500,00	515.032.500,00	0,00
60	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Milir (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Kelurahan Milir		13	0,00	504.427.750,00	504.427.750,00	0,00
61	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Dagangan (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Dagangan		13	0,00	530.078.000,00	530.078.000,00	0,00
62	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Jetis (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Jetis		13	0,00	589.128.000,00	589.128.000,00	0,00
63	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Wungu (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Kelurahan Wungu		13	0,00	388.698.000,00	388.698.000,00	0,00
64	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mojopurno (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Mojopurno		13	0,00	398.428.000,00	398.428.000,00	0,00
65	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kare (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Kare		13	0,00	467.078.000,00	467.078.000,00	0,00
66	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Gemarang (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Gemarang		13	0,00	477.540.700,00	477.540.700,00	0,00
67	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Saradan (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Sugihwaras		13	0,00	451.138.000,00	451.138.000,00	0,00
68	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Sumbersari (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Sumbersari		13	0,00	539.720.200,00	539.720.200,00	0,00
69	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Pilangkenceng (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Kenongorejo		13	0,00	451.953.000,00	451.953.000,00	0,00
70	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Krebet (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Krebet		13	0,00	489.838.000,00	489.838.000,00	0,00
71	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mejayan (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Mejayan		13	0,00	520.878.250,00	520.878.250,00	0,00

72	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Klecorejo (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Klecorejo		13	0,00	362.378.000,00	362.378.000,00	0,00	
73	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Wonoasri (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Wonoasri		13	0,00	633.975.000,00	633.975.000,00	0,00	
74	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Balerejo (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Balerejo		13	0,00	490.776.620,00	490.776.620,00	0,00	
75	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Simo (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Simo		13	0,00	417.288.000,00	417.288.000,00	0,00	
76	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Madiun (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Tiron		13	0,00	432.028.000,00	432.028.000,00	0,00	
77	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Dimong (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Dimong		13	0,00	434.168.000,00	434.168.000,00	0,00	
78	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Sawahan (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Kajang		13	0,00	546.038.000,00	546.038.000,00	0,00	
79	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Jiwan (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Jiwan		13	0,00	468.228.000,00	468.228.000,00	0,00	
80	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Klagen Serut (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Desa Klagenserut	196 -	13	0,00	449.348.000,00	449.348.000,00	0,00	
81	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK NON FISIK) (Penanganan COVID-19)	Desa Jiwan		13	0,00	11.029.120,00	11.029.120,00	0,00	
82	Bantuan Operasional Kegiatan UKM Kabupaten (Penanganan COVID-19)	Desa Jiwan		13	0,00	689.837.050,00	689.837.050,00	0,00	
48	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Kesehatan		100 %			4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
59	Pelatihan Tenaga Kesehatan dan atau Tenaga Administrasi pada Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Cukai)	Desa Jiwan	270 -	11	589.628.742,00	0,00	(589.628.742,00)	(100,00)	
61	Pelayanan Kesehatan Promotif/ Preventif/ Rehabilitatif (Cukai)	Desa Jiwan	45 -	11	100.000.904,00	33.850.000,00	(66.150.904,00)	(66,15)	
63	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (CUKAI)	Desa Jiwan	60 %	11	3.310.370.354,00	904.536.358,00	(2.405.833.996,00)	(72,68)	
64	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Cukai) (Penanganan COVID-19)	Desa Jiwan		11	0,00	3.061.613.642,00	3.061.613.642,00	0,00	
				JUMLAH		66.067.195.234,00	57.338.759.440,00	(8.728.435.794,00)	(13,21)

MADIUN, 14 Juli 2020
Kepala Dinas Kesehatan

dr. SOELISTYO WIDYANTONO, MM

NIP. 196305131989111001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RSUD Caruban
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RSUD Caruban

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		100 %		9.018.871.579,00	9.968.871.579,00	950.000.000,00	10,53	
18	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Desa Mejayan, Wilayah Kabupaten Madiun	51 -	5	9.018.871.579,00	8.839.071.579,00	(179.800.000,00)	(1,99)	
83	Pengadaan alat - alat kesehatan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit untuk pelayanan Covid-19	Kelurahan Bangunsari		10	0,00	538.600.000,00	538.600.000,00	0,00	
84	Pengadaan alat - alat kesehatan Rumah Sakit untuk pelayanan Covid-19	Kelurahan Bangunsari		5	0,00	591.200.000,00	591.200.000,00	0,00	
47	Program pelayanan kesehatan Rujukan (DAK)		100 %		8.986.041.472,00	8.986.041.472,00	0,00	0,00	
31	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit	Wilayah Kabupaten Madiun	99 -	12	7.790.859.000,00	7.790.859.000,00	0,00	0,00	
32	Pengadaan Prasarana Rumah Sakit	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	12	1.195.182.472,00	1.195.182.472,00	0,00	0,00	
48	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Kesehatan		100 %		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
63	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (CUKAI)	Wilayah Kabupaten Madiun	117 -	11	3.500.000.000,00	3.368.000.000,00	(132.000.000,00)	(3,77)	
64	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Cukai) (Penanganan COVID-19)	Kelurahan Bangunsari		11	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
				JUMLAH	21.504.913.051,00	22.454.913.051,00	950.000.000,00	4,42	

MADIUN, 14 Juli 2020
**DIREKTUR RSUD CARUBAN KABUPATEN
MADIUN**

dr. DJOKO SANTOSO,MM
NIP. 196208011990021003

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 RSUD Dolopo
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 01 RSUD Dolopo

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		90.63 %		17.900.000.000,00	5.900.000.000,00	(12.000.000.000,00)	(67,04)	
1	Pembangunan Rumah Sakit	Desa Bagi,Desa Dolopo	2 Paket	2	17.900.000.000,00	5.900.000.000,00	(12.000.000.000,00)	(67,04)	
47	Program pelayanan kesehatan Rujukan (DAK)		35 Paket		9.644.039.528,00	9.644.039.528,00	0,00	0,00	
64	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	Desa Dolopo	3 Paket	12	9.644.039.528,00	2.244.455.968,00	(7.399.583.560,00)	(76,73)	
65	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit untuk penanganan Covid-19 (DAK)	Kelurahan Bangunsari		12	0,00	7.399.583.560,00	7.399.583.560,00	0,00	
48	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Kesehatan		100 -		3.500.000.000,00	8.983.176.993,40	5.483.176.993,40	156,66	
63	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (CUKAI)	Desa Dolopo,Kecamatan DOLOPO	100 -	5	3.500.000.000,00	8.983.176.993,40	5.483.176.993,40	156,66	
				JUMLAH	31.044.039.528,00	24.527.216.521,40	(6.516.823.006,60)	(20,99)	

MADIUN, 14 Juli 2020
Direktur RSUD Dolopo

dr. PURNOMO HADI
NIP. 197509072009021001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		100 %	2.213.448.860,68	1.801.875.558,38	(411.573.302,30)	(18,59)		
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawainan, dan sarana prasarana	Desa Bagi,Desa Banjarsari Wetan,Wilayah Kabupaten Madiun	100 -	2	2.181.470.660,68	1.769.897.358,38	(411.573.302,30)	(18,87)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	7 -	2	31.978.200,00	31.978.200,00	0,00	0,00	
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan		100 %	1.272.776.050,00	1.157.602.050,00	(115.174.000,00)	(9,05)		
4	Pengadaan Alat-Alat Berat (DID)	Desa Banjarejo,Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	5	748.000.000,00	632.826.000,00	(115.174.000,00)	(15,40)	
10	Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Berat	Desa Babadan Lor,Wilayah Kabupaten Madiun	30 -	2	524.776.050,00	524.776.050,00	0,00	0,00	
31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah		73.33 %	21.353.447.366,00	8.683.587.200,00	(12.669.860.166,00)	(59,33)		
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Madiun (Pajak Rokok)	Desa Bader,Desa Banaran,Wilayah Kabupaten Madiun	5 -	10	4.500.240.350,00	4.500.240.350,00	0,00	0,00	
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Madiun	Wilayah Kabupaten Madiun	3 -	2	16.707.652.516,00	4.037.792.350,00	(12.669.860.166,00)	(75,83)	
45	Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-	100 %	2	145.554.500,00	145.554.500,00	0,00	0,00	
37	Program Jasa Konstruksi		40 %	341.696.950,00	17.895.500,00	(323.801.450,00)	(94,76)		
1	Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi	-	1 -	4	200.632.450,00	0,00	(200.632.450,00)	(100,00)	
5	Penyusunan Harga Bahan dan Upah Kegiatan Jasa Konstruksi	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	4	58.463.500,00	17.895.500,00	(40.568.000,00)	(69,39)	
7	Pembekalan dan uji Kompetensi Tenaga Terampil	-	60 -	4	82.601.000,00	0,00	(82.601.000,00)	(100,00)	
38	Program Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)		77.31 %	9.264.884.346,00	9.264.884.346,00	0,00	0,00		
1	Rehabilitasi/pemeliharaan Daerah Irigasi (IPDMIP)	Desa Babadan Lor,Desa Banjarejo,Kecamatan GEGER,Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	16	9.264.884.346,00	9.264.884.346,00	0,00	0,00	
39	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/kelurahan		20661 -	4.782.824.680,00	1.339.085.480,00	(3.443.739.200,00)	(72,00)		

11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK Penugasan)	Wilayah Kabupaten Madiun	5 -	12	4.590.032.000,00	1.159.676.000,00	(3.430.356.000,00)	(74,73)
12	Penunjang Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Penunjang DAK penugasan)	-	1 -	2	140.832.680,00	127.449.480,00	(13.383.200,00)	(9,50)
28	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Daerah Perkotaan dan / atau Perdesaan (DAK)	-	100 %	12	51.960.000,00	0,00	(51.960.000,00)	(100,00)
29	Penunjang Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Daerah Perkotaan dan / atau Perdesaan (DAK)	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	12	0,00	51.960.000,00	51.960.000,00	0,00
45	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan		68.65 %		86.270.798.991,50	39.260.872.448,73	(47.009.926.542,77)	(54,49)
1	Peningkatan Jalan (DAU)	Wilayah Kabupaten Madiun	14.22 -	6	23.227.915.404,50	15.192.377.024,50	(8.035.538.380,00)	(34,59)
2	Peningkatan Jalan (Pajak Rokok)	-	1 -	10	2.265.805.581,00	19.734.000,00	(2.246.071.581,00)	(99,13)
3	Peningkatan Jalan (DAK)	-	8.19 -	12	20.970.012.000,00	0,00	(20.970.012.000,00)	(100,00)
5	Pemeliharaan berkala jalan	Wilayah Kabupaten Madiun	4.28 -	6	5.000.000.000,00	1.410.841.160,00	(3.589.158.840,00)	(71,78)
6	Peningkatan Jembatan	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	6	13.908.000.000,00	5.739.723.116,00	(8.168.276.884,00)	(58,73)
7	Pembangunan Trotoar	-	2 -	5	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
8	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	-	21 -	5	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	0,00	0,00
9	Pembangunan bangunan pendukung jalan dan jembatan	Wilayah Kabupaten Madiun	6 -	6	3.956.431.465,00	2.170.000.000,00	(1.786.431.465,00)	(45,15)
10	Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan (rutin)	-	5 -	6	8.273.175.661,00	4.945.999.000,23	(3.327.176.660,77)	(40,22)
11	Penunjang peningkatan jalan (Penunjang DAK)	-	1 -	2	469.458.880,00	307.198.148,00	(162.260.732,00)	(34,56)
13	Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pola Padat Karya Tunai (Covid19 - New Normal)	-	-	2	0,00	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00	0,00
46	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan		61.65 %		9.455.106.362,21	7.210.672.535,41	(2.244.433.826,80)	(23,74)
1	Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	Wilayah Kabupaten Madiun	1.20 -	6	6.853.219.457,21	6.534.557.957,21	(318.661.500,00)	(4,65)
3	Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	6	2.601.886.905,00	676.114.578,20	(1.925.772.326,80)	(74,01)
47	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya		0.63 %		19.552.634.227,60	19.008.243.209,10	(544.391.018,50)	(2,78)
2	Pembangunan Reservoir	Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	6	1.204.500.000,00	1.204.500.000,00	0,00	0,00
3	Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi (rutin)	Wilayah Kabupaten Madiun	6 -	6	1.633.369.827,00	824.177.542,00	(809.192.285,00)	(49,54)
4	Rehabilitasi / Pemeliharaan daerah irigasi (DAK)	Wilayah Kabupaten Madiun	1640.50 -	12	5.653.198.000,00	5.532.650.000,00	(120.548.000,00)	(2,13)
5	Penunjang rehabilitasi / pemeliharaan daerah irigasi (penunjang DAK)	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	269.464.792,00	26.000.000,00	(243.464.792,00)	(90,35)
6	Rehabilitasi jaringan irigasi	Desa Brumbun, Desa Tawangrejo, Wilayah Kabupaten Madiun	4340.40 -	5	6.957.321.608,60	6.957.321.361,10	(247,50)	(0,00)
9	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Wilayah Kabupaten Madiun	9 -	6	3.834.780.000,00	3.634.780.000,00	(200.000.000,00)	(5,22)
12	Pengelolaan Jaringan Irigasi Pola Padat Karya Tunai (Covid19 - New Normal)	-	-	2	0,00	828.814.306,00	828.814.306,00	0,00
48	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang		53.33 %		843.207.500,00	197.572.300,00	(645.635.200,00)	(76,57)
4	Penyusunan RDTR	-	100 %	2	419.379.200,00	0,00	(419.379.200,00)	(100,00)
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata ruang	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	2	381.948.000,00	155.692.000,00	(226.256.000,00)	(59,24)
6	Penerbitan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR)	-	100 %	2	41.880.300,00	41.880.300,00	0,00	0,00

49	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur		100 %		2.089.378.192,00	2.089.378.192,00	0,00	0,00
1	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan menuju Kawasan Wisata	-	100 %	11	2.089.378.192,00	2.089.378.192,00	0,00	0,00
				JUMLAH	157.440.203.525,99	90.031.668.819,62	(67.408.534.706,37)	(42,82)

MADIUN, 14 Juli 2020
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Ir. GUNAWI
NIP. 19700225 199901 1 001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		100 -		1.026.374.945,00	538.033.605,00	(488.341.340,00)	(47,58)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	100 -	2	995.519.745,00	518.033.605,00	(477.486.140,00)	(47,96)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	7 -	2	30.855.200,00	20.000.000,00	(10.855.200,00)	(35,18)	
25	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemfaatan Tanah		7674 -		4.822.814.672,00	809.370.328,00	(4.013.444.344,00)	(83,22)	
3	Koordinasi dan Fasilitasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	Wilayah Kabupaten Madiun	40 -	2	19.774.000,00	0,00	(19.774.000,00)	(100,00)	
5	Penatagunan Tanah	Wilayah Kabupaten Madiun		2	19.260.000,00	0,00	(19.260.000,00)	(100,00)	
8	Pengadaan Tanah	Desa Kebonagung,Desa Kresek,Desa Krokeh,Desa Tiron,Wilayah Kabupaten Madiun	2000 -	6	4.690.379.672,00	785.870.328,00	(3.904.509.344,00)	(83,25)	
10	Koordinasi dan Fasilitasi Sengketa Pertanahan	Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	2	93.401.000,00	23.500.000,00	(69.901.000,00)	(74,84)	
26	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		40 -		407.647.660,00	725.043.160,00	317.395.500,00	77,86	
1	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Sukolilo,Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	12	183.486.000,00	183.486.000,00	0,00	0,00	
2	Pengelolaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Susun	Wilayah Kabupaten Madiun	98 -	1	180.407.160,00	137.000.000,00	(43.407.160,00)	(24,06)	
5	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman dan monumen	-		2	43.754.500,00	0,00	(43.754.500,00)	(100,00)	
6	Fasilitasi Pengelolaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rusun (COVID19-New Normal)	-		1	0,00	180.407.160,00	180.407.160,00	0,00	
7	Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (COVID19-New Normal)	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	224.150.000,00	224.150.000,00	0,00	
27	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		47.75 -		350.381.064,00	167.550.000,00	(182.831.064,00)	(52,18)	
2	Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	6	150.381.064,00	0,00	(150.381.064,00)	(100,00)	
3	Pengembangan Komunitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-		6	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
4	Fasilitasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (COVID19-New Normal)	-		2	0,00	87.850.000,00	87.850.000,00	0,00	

5	Fasilitasi Pencegahan Kawasan Kumuh (COVID19-New Normal)	-	2	0,00	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00
6	Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Pedesaan (COVID19-New Normal)	-	2	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
			JUMLAH		6.607.218.341,00	2.239.997.093,00	(4.367.221.248,00)
							(66,10)

MADIUN, 14 Juli 2020
**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

Ir. ARNOWO WIDJAJA, MM
NIP. 196112131992031011

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		843.253.236,00	734.718.475,00	(108.534.761,00)	(12,87)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	87 -	2	828.253.236,00	734.718.475,00	(93.534.761,00)	(11,29)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	4 -	2	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
21	Program pendidikan politik masyarakat		95 -		166.384.000,00	51.384.000,00	(115.000.000,00)	(69,12)	
25	Pembinaan Partai Politik	Wilayah Kabupaten Madiun	9 -	2	35.000.000,00	10.000.000,00	(25.000.000,00)	(71,43)	
29	Pembinaan Ormas dan LSM	Wilayah Kabupaten Madiun	350 -	10	131.384.000,00	41.384.000,00	(90.000.000,00)	(68,50)	
31	Program Pencegahan Penanganan Konflik		100 -		863.781.624,00	859.350.400,00	(4.431.224,00)	(0,51)	
1	Fasilitasi Kewaspadaan Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	50 -	2	150.000.000,00	142.837.500,00	(7.162.500,00)	(4,78)	
2	Rekonsiliasi Penanganan Konflik Sosial	Wilayah Kabupaten Madiun	40 -	2	53.781.624,00	0,00	(53.781.624,00)	(100,00)	
3	Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	2	500.000.000,00	692.173.000,00	192.173.000,00	38,43	
4	Sarasehan dan Pembinaan Anggota IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia) Kabupaten Madiun	Wilayah Kabupaten Madiun	200 -	2	160.000.000,00	24.339.900,00	(135.660.100,00)	(84,79)	
32	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan		40 -		919.593.874,00	782.921.024,00	(136.672.850,00)	(14,86)	
1	Pembinaan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)	Wilayah Kabupaten Madiun	150 -	2	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Wilayah Kabupaten Madiun	250 -	2	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
3	Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM)	Wilayah Kabupaten Madiun	150 -	2	50.000.000,00	73.327.150,00	23.327.150,00	46,65	
4	Sosialisasi Integrasi Bangsa	Wilayah Kabupaten Madiun	500 -	2	109.593.874,00	109.593.874,00	0,00	0,00	
5	Fasilitasi Pelaksanaan Upacara	Wilayah Kabupaten Madiun		10	700.000.000,00	600.000.000,00	(100.000.000,00)	(14,29)	
				JUMLAH	2.793.012.734,00	2.428.373.899,00	(364.638.835,00)	(13,06)	

MADIUN, 14 Juli 2020

SEKRETARIS

SIGIT BUDIARTO, S.Sos., M.Si.

NIP. 197506141994021002

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		3.168.518.266,00	2.600.373.873,00	(568.144.393,00)	(17,93)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	100 -	2	2.989.067.800,00	2.429.733.873,00	(559.333.927,00)	(18,71)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	7 -	2	15.310.666,00	0,00	(15.310.666,00)	(100,00)	
3	HUT dan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja	Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	2	164.139.800,00	10.340.000,00	(153.799.800,00)	(93,70)	
4	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	160.300.000,00	160.300.000,00	0,00	
23	Program Penegakan Produk Hukum Daerah		75 -		1.041.825.940,00	481.263.050,00	(560.562.890,00)	(53,81)	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS	Wilayah Kabupaten Madiun	80 -	10	253.764.066,00	52.882.500,00	(200.881.566,00)	(79,16)	
2	Pembinaan dan Pengawasan Perda dan Perkada	Wilayah Kabupaten Madiun	185 -	10	150.000.000,00	52.914.300,00	(97.085.700,00)	(64,72)	
6	Pemberantasan Rokok Ilegal	Wilayah Kabupaten Madiun		10	638.061.874,00	375.466.250,00	(262.595.624,00)	(41,16)	
29	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		4208 -		773.100.000,00	150.600.000,00	(622.500.000,00)	(80,52)	
1	Pengamanan, Pengawasan dan Patroli Wilayah	Wilayah Kabupaten Madiun	100 -	2	428.000.000,00	150.600.000,00	(277.400.000,00)	(64,81)	
3	Pemeberdayaan Perlindungan Masyarakat	Wilayah Kabupaten Madiun	4208 -	10	215.100.000,00	0,00	(215.100.000,00)	(100,00)	
4	Penertiban Kawasan Bebas Tanpa Asap Rokok	-		10	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)	
5	Penertiban Kawasan Bebas Tanpa Asap Rokok Dalam Masa Pandemi Covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		10	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran		80 -		863.290.350,00	678.537.950,00	(184.752.400,00)	(21,40)	
1	Peningkatan Pencegahan Kejadian Kebakaran	Wilayah Kabupaten Madiun	24 -	10	506.200.000,00	333.700.000,00	(172.500.000,00)	(34,08)	
2	Pelayanan Penanganan Kebakaran	Wilayah Kabupaten Madiun	90 -	10	357.090.350,00	344.837.950,00	(12.252.400,00)	(3,43)	
3	Peningkatan Pencegahan Kejadian Kebakaran Dalam Masa Pandemi Covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				JUMLAH	5.846.734.556,00	3.910.774.873,00	(1.935.959.683,00)	(33,11)	

MADIUN, 14 Juli 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

DIDIK HARIANTO, S.Sos, MM

NIP. 19711121 199201 1 001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		681.835.528,00	748.136.823,00	66.301.295,00	9,72	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawainan, dan sarana prasarana	Desa Banjarejo, Desa Batok, Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	2	679.835.528,00	550.704.480,00	(129.131.048,00)	(18,99)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	-	19 -	2	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
3	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	Desa Mojopurno, Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	197.432.343,00	197.432.343,00	0,00	
15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		89.16 %		433.551.674,00	53.765.674,00	(379.786.000,00)	(87,60)	
3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Wilayah Kabupaten Madiun	520 Orang	2	96.452.050,00	0,00	(96.452.050,00)	(100,00)	
9	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Bina Swadaya Masyarakat	Wilayah Kabupaten Madiun	300 Orang	2	337.099.624,00	53.765.674,00	(283.333.950,00)	(84,05)	
16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		0.14 %		1.260.000.000,00	415.419.740,00	(844.580.260,00)	(67,03)	
18	Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Wilayah Kabupaten Madiun	18 Orang	2	112.016.500,00	3.600.000,00	(108.416.500,00)	(96,79)	
19	Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Wilayah Kabupaten Madiun	50 Orang	2	75.296.500,00	12.870.000,00	(62.426.500,00)	(82,91)	
20	Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Wilayah Kabupaten Madiun	184 Orang	2	75.912.000,00	41.711.250,00	(34.200.750,00)	(45,05)	
22	Pemberdayaan dan Permakanaan Panti Asuhan, Pondok Pesantren, Panti Weda	-	16 -	2	356.060.000,00	0,00	(356.060.000,00)	(100,00)	
25	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakmis dan anak yatim piatu	Wilayah Kabupaten Madiun	900 Orang	5	640.715.000,00	172.238.490,00	(468.476.510,00)	(73,12)	
26	Pemberian santunan kepada Yatim Piatu dalam rangka penanganan covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		5	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		100 %		313.161.500,00	112.855.050,00	(200.306.450,00)	(63,96)	
0	Non Kegiatan	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
7	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Orsos dan Lansia	Wilayah Kabupaten Madiun	165 Orang	2	284.861.500,00	39.955.050,00	(244.906.450,00)	(85,97)	
17	Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan, Retorasi Sosial dan Pendampingan	Wilayah Kabupaten Madiun	49 Orang	2	28.300.000,00	0,00	(28.300.000,00)	(100,00)	
18	Pembinaan dan Pemberdayaan PSKS Penanganan Covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	

24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		89.16 -		1.232.823.364,00	1.233.808.075,00	984.711,00	0,08
18	Penanganan dan Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam	Desa Bader, Wilayah Kabupaten Madiun	135 Orang	2	245.145.000,00	113.889.475,00	(131.255.525,00)	(53,54)
20	Penanganan Korban Bencana Sosial	Desa Babadan Lor, Wilayah Kabupaten Madiun	900 Orang	2	25.680.500,00	456.216.000,00	430.535.500,00	1.676,51
22	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Wilayah Kabupaten Madiun	2200 -	2	300.327.850,00	39.001.250,00	(261.326.600,00)	(87,01)
23	Penunjang Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	Wilayah Kabupaten Madiun	42814 kpm	2	391.680.890,00	139.019.350,00	(252.661.540,00)	(64,51)
24	verifikasi, validasi dan pemutakhiran Basis data perlindungan sosial	Wilayah Kabupaten Madiun	335507 -	5	269.989.124,00	12.070.000,00	(257.919.124,00)	(95,53)
27	Penunjang Kegiatan bantuan sosial masyarakat dalam rangka penanganan covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		1	0,00	93.484.000,00	93.484.000,00	0,00
28	Penanganan Korban bencana alam di masa pandemi covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00
29	verifikasi, validasi dan pemutakhiran basis data perlindungan sosial penanganan covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	91.778.000,00	91.778.000,00	0,00
30	Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		1	0,00	163.600.000,00	163.600.000,00	0,00
31	Penanganan Korban bencana Sosial Penanganan Covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		1	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
				JUMLAH	3.921.372.066,00	2.563.985.362,00	(1.357.386.704,00)	(34,62)

MADIUN, 14 Juli 2020

KEPALA DINAS SOSIAL

Drs. SUGIHARTO

NIP. 196203071986101004

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		81 -		673.223.023,00	512.074.913,00	(161.148.110,00)	(23,94)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawain, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	8 -	1	653.223.023,00	503.324.913,00	(149.898.110,00)	(22,95)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	15 -	2	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	-		2	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	
28	Program Penanggulangan Bencana		100 %		2.084.019.333,00	942.070.550,00	(1.141.948.783,00)	(54,80)	
1	Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Wilayah Kabupaten Madiun	7 -	2	1.013.593.100,00	73.612.050,00	(939.981.050,00)	(92,74)	
2	Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana	Wilayah Kabupaten Madiun	500 -	2	986.040.233,00	325.620.000,00	(660.420.233,00)	(66,98)	
3	Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	Wilayah Kabupaten Madiun	50 -	2	84.386.000,00	7.832.600,00	(76.553.400,00)	(90,72)	
4	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Pada Masa Pandemi Covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		10	0,00	110.901.500,00	110.901.500,00	0,00	
5	Kedaruratan dan Logistik Pada Masa Pandemi Covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	424.104.400,00	424.104.400,00	0,00	
JUMLAH					2.757.242.356,00	1.454.145.463,00	(1.303.096.893,00)	(47,26)	

MADIUN, 14 Juli 2020
SEKRETARIS

SUPRIJANTO, S.Sos
NIP. 196809261992031005

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Tenaga Kerja
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		%
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		83 -		1.136.498.051,77	976.166.724,00	(160.331.327,77)	(14,11)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	12 -	2	1.010.271.299,17	854.846.724,00	(155.424.575,17)	(15,38)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	13 -	2	126.226.752,60	121.320.000,00	(4.906.752,60)	(3,89)	
15	Program pengembangan wilayah transmigrasi		100 -		53.974.298,00	20.957.962,00	(33.016.336,00)	(61,17)	
9	Pengerahan, Kerjasama, dan Fasilitas Pemindahan Transmigran	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	2	53.974.298,00	20.957.962,00	(33.016.336,00)	(61,17)	
15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		73 %		915.100.676,00	342.641.036,00	(572.459.640,00)	(62,56)	
11	Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Berbasis Kompetensi	Wilayah Kabupaten Madiun	80 -	5	849.440.540,00	276.980.900,00	(572.459.640,00)	(67,39)	
23	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Wilayah Kabupaten Madiun	60 %	5	33.189.193,00	33.189.193,00	0,00	0,00	
24	Pelatihan dan Pemantauan Peningkatan Produktivitas Kerja	Wilayah Kabupaten Madiun	150 -	5	32.470.943,00	32.470.943,00	0,00	0,00	
16	Program pengembangan industri kecil dan menengah		3.20 %		336.372.450,00	0,00	(336.372.450,00)	(100,00)	
16	Pendamping Kegiatan APP Bidang Industri	-	1 -	10	56.372.450,00	0,00	(56.372.450,00)	(100,00)	
30	Fasilitasi Pembiayaan IKM	-	34 -	10	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
31	Pembinaan Dan Pengembangan IKM Melalui Pola OVOP	-	15 -	10	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
32	Pengembangan Sentra Industri Kreatif	-	24 -	10	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
33	Fasilitasi Standarisasi Dan Desain Produk IKM	-	37 -	10	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		68 %		1.100.888.090,58	192.651.128,00	(908.236.962,58)	(82,50)	
10	Pelatihan Kewirausahaan	Wilayah Kabupaten Madiun	120 -	5	317.556.055,58	103.841.128,00	(213.714.927,58)	(67,30)	
11	Pelatihan Pengelolaan Edukasi Reminten bagi Keluarga TKI	Wilayah Kabupaten Madiun	1100 -	5	307.966.579,00	88.810.000,00	(219.156.579,00)	(71,16)	
22	Pelayanan Antar Kerja	Wilayah Kabupaten Madiun	2500 -	5	475.365.456,00	0,00	(475.365.456,00)	(100,00)	
17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		80 -		438.561.787,00	44.719.950,00	(393.841.837,00)	(89,80)	
15	Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Wilayah Kabupaten Madiun	20 -	2	311.561.787,00	44.719.950,00	(266.841.837,00)	(85,65)	
16	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	2	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
18	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	

20	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Perindustrian (Cukai)		85 -		200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)
1	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat (Pelatihan Bordir / Konveksi)	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	11	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
2	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat (Pelatihan Pengembangan Makanan/Minuman Olahan)	Wilayah Kabupaten Madiun	25 -	11	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
3	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	11	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
4	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat (Pelatihan Keterampilan Aneka Kerajinan)	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	11	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
5	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Pembuatan Paving Press dan Beton Pra Cetak)	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	11	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
21	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Tenaga Kerja (Cukai)		65 %		1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
1	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Wilayah Kabupaten Madiun	128 -	11	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
			JUMLAH		5.181.395.353,35	1.577.136.800,00	(3.604.258.553,35)	(69,56)

MADIUN, 14 Juli 2020
KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Ir. WIJANTO DJOKO POERNOMO
NIP. 196192211988031005

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		928.000.000,00	622.798.063,00	(305.201.937,00)	(32,89)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawainan, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	14 -	2	920.000.000,00	621.349.063,00	(298.650.937,00)	(32,46)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	19 -	2	8.000.000,00	1.449.000,00	(6.551.000,00)	(81,89)	
15	Program Keluarga Berencana		76 %		6.529.039.538,00	5.875.615.376,00	(653.424.162,00)	(10,01)	
3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Wilayah Kabupaten Madiun	12 -	2	45.000.000,00	22.518.620,00	(22.481.380,00)	(49,96)	
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Wilayah Kabupaten Madiun	61 -	2	171.920.038,00	79.713.696,00	(92.206.342,00)	(53,63)	
8	Pelayanan KB	Wilayah Kabupaten Madiun	23220 -	2	287.500.000,00	108.041.500,00	(179.458.500,00)	(62,42)	
16	Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)	Wilayah Kabupaten Madiun	15 -	13	4.727.692.000,00	4.363.372.000,00	(364.320.000,00)	(7,71)	
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (DAK Fisik)	Wilayah Kabupaten Madiun	5 -	12	1.220.250.000,00	1.220.250.000,00	0,00	0,00	
26	Standarisasi kapasitas tenaga kesehatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)	Wilayah Kabupaten Madiun	20 -	2	76.677.500,00	15.269.560,00	(61.407.940,00)	(80,09)	
28	Pelayanan Keluarga Berencana dalam rangka penanganan Covid 19	-		2	0,00	66.450.000,00	66.450.000,00	0,00	
20	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		51.70 %		212.836.031,00	100.977.131,00	(111.858.900,00)	(52,56)	
1	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Wilayah Kabupaten Madiun	51.70 %	2	100.000.000,00	57.328.500,00	(42.671.500,00)	(42,67)	
2	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	Wilayah Kabupaten Madiun	67 -	2	112.836.031,00	43.648.631,00	(69.187.400,00)	(61,32)	
21	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak		0.04 -		420.000.000,00	151.116.698,00	(268.883.302,00)	(64,02)	
3	Penyediaan Data Gender dan Anak	Wilayah Kabupaten Madiun	4 -	2	100.510.000,00	66.702.336,00	(33.807.664,00)	(33,64)	
12	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak	Wilayah Kabupaten Madiun	12 -	2	96.510.000,00	50.285.000,00	(46.225.000,00)	(47,90)	
13	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	2	222.980.000,00	34.129.362,00	(188.850.638,00)	(84,69)	
25	Program Pengendalian Penduduk		9.87 -		2.010.297.335,00	1.738.401.800,00	(271.895.535,00)	(13,53)	
9	Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Wilayah Kabupaten Madiun	643 -	2	1.679.800.000,00	1.629.574.800,00	(50.225.200,00)	(2,99)	
10	Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Wilayah Kabupaten Madiun	3 -	2	117.397.335,00	41.527.000,00	(75.870.335,00)	(64,63)	
22	Peningkatan Kapasitas Pengendalian Penduduk	Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	2	112.000.000,00	61.300.000,00	(50.700.000,00)	(45,27)	

23	Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun	Madiun Wilayah Kabupaten Madiun	31 -	2	101.100.000,00	6.000.000,00	(95.100.000,00)	(94,07)
26	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja		7.25 -		392.300.000,00	89.142.308,00	(303.157.692,00)	(77,28)
12	Pemberdayaan Keluarga	Wilayah Kabupaten Madiun	200 -	2	113.300.000,00	11.927.100,00	(101.372.900,00)	(89,47)
13	Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Wilayah Kabupaten Madiun	1440 -	2	279.000.000,00	77.215.208,00	(201.784.792,00)	(72,32)
JUMLAH					10.492.472.904,00	8.578.051.376,00	(1.914.421.528,00)	(18,25)

MADIUN, 14 Juli 2020

Kepala Dinas

Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.

NIP. 196907091988092001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 03 Pangan
Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		87 -		740.780.407,00	372.787.418,00	(367.992.989,00)	(49,68)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawainan, dan sarana prasarana	Desa Babadan Lor,Desa Kaligunting,Kecamatan MEJAYAN,Wilayah Kabupaten Madiun	100 -	2	660.818.257,00	296.215.268,00	(364.602.989,00)	(55,17)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	6 -	2	79.962.150,00	76.572.150,00	(3.390.000,00)	(4,24)	
15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		81 -		429.157.050,00	1.719.044.598,00	1.289.887.548,00	300,56	
1	Penanganan daerah rawan pangan	Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	10	68.902.500,00	3.040.000,00	(65.862.500,00)	(95,59)	
11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok (Pajak Rokok)	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	10	47.590.000,00	50.346.782,00	2.756.782,00	5,79	
13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Desa Garon,Wilayah Kabupaten Madiun	5 -	10	286.254.550,00	1.040.000.000,00	753.745.450,00	263,31	
47	Analisis Ketersediaan Pangan	Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	10	26.410.000,00	22.788.568,00	(3.621.432,00)	(13,71)	
59	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan	-		5	0,00	89.987.280,00	89.987.280,00	0,00	
60	Pengembangan cadangan pangan daerah untuk pembinaan kelompok lumbung dan pemberian bantuan isian lumbung	-		10	0,00	399.908.290,00	399.908.290,00	0,00	
61	Penanganan daerah rawan pangan untuk penyuluhan ketahanan pangan keluarga dan pemberian bantuan pangan sehat	-		10	0,00	68.030.278,00	68.030.278,00	0,00	
62	Laporan Berkala Dewan Ketahanan Pangan	-		10	0,00	44.943.400,00	44.943.400,00	0,00	
16	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan		76 -		437.500.000,00	362.211.750,00	(75.288.250,00)	(17,21)	
3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	10	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	
4	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	10	287.500.000,00	175.000.000,00	(112.500.000,00)	(39,13)	
22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Wilayah Kabupaten Madiun	250 -	10	50.000.000,00	9.975.000,00	(40.025.000,00)	(80,05)	
43	Pengembangan Olahan Pangan Lokal	Wilayah Kabupaten Madiun	15 -	10	35.000.000,00	3.005.050,00	(31.994.950,00)	(91,41)	
63	Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	-		10	0,00	174.231.700,00	174.231.700,00	0,00	
17	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Pangan (CUKAI)		2 -		487.225.500,00	487.225.500,00	0,00	0,00	

2	Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal (Cukai)	Desa Darmorejo,Wilayah Kabupaten Madiun	80 -	11	487.225.500,00	487.225.500,00	0,00	0,00
31	Program Pengembangan Peternakan		216 -		527.546.000,00	0,00	(527.546.000,00)	(100,00)
11	Pendistribusian Hasil Produksi Peternakan	Wilayah Kabupaten Madiun	20000 -	2	52.546.000,00	0,00	(52.546.000,00)	(100,00)
20	rehabilitasi sarana prasarana peternakan	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	5	475.000.000,00	0,00	(475.000.000,00)	(100,00)
36	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		100 -		400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veretiner) (Cukai)	Wilayah Kabupaten Madiun	315 -	11	118.810.000,00	0,00	(118.810.000,00)	(100,00)
2	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular) (Cukai)	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	11	93.590.000,00	175.000.000,00	81.410.000,00	86,99
3	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Ternak) (Cukai)	Wilayah Kabupaten Madiun	120 -	11	187.600.000,00	100.000.000,00	(87.600.000,00)	(46,70)
4	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan Pembibitan, Produksi dan Reproduksi Ternak)	-		11	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
JUMLAH					3.022.208.957,00	3.341.269.266,00	319.060.309,00	10,56

MADIUN, 14 Juli 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

drh. LILIN SYARIFAH ANIESAH

NIP. 196202181991032005

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		1.978.664.320,00	2.118.962.926,00	140.298.606,00	7,09	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	2	1.824.814.520,00	1.170.113.126,00	(654.701.394,00)	(35,88)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	14 -	2	153.849.800,00	153.849.800,00	0,00	0,00	
3	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana (COVID19-New Normal)	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	795.000.000,00	795.000.000,00	0,00	
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		36.36 %		1.193.763.468,00	382.995.711,00	(810.767.757,00)	(67,92)	
7	Pengkajian Lingkungan Hidup	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	5	578.000.000,00	200.000.000,00	(378.000.000,00)	(65,40)	
17	Pendidikan Lingkungan Hidup	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	10	142.687.300,00	35.671.825,00	(107.015.475,00)	(75,00)	
22	Evaluasi Kebersihan dan Penataan Lingkungan	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	10	51.443.048,00	0,00	(51.443.048,00)	(100,00)	
24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup (Pajak Rokok)	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	10	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	
25	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Wilayah Kabupaten Madiun	93 -	10	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
27	Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup	Wilayah Kabupaten Madiun	6 -	2	54.823.850,00	47.323.850,00	(7.500.000,00)	(13,68)	
38	Pembinaan dan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	2	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
50	pemantauan kualitas lingkungan	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	5	126.809.270,00	100.000.036,00	(26.809.234,00)	(21,14)	
24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		22.10 -		6.213.010.695,00	668.010.695,00	(5.545.000.000,00)	(89,25)	
15	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Kecamatan DAGANGAN, Kecamatan DOLOPO, Wilayah Kabupaten Madiun	3 -	6	5.200.000.000,00	0,00	(5.200.000.000,00)	(100,00)	
31	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Wilayah Kabupaten Madiun	12 -	2	1.013.010.695,00	668.010.695,00	(345.000.000,00)	(34,06)	
25	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah dan Limbah Domestik		45 %		3.070.161.150,00	1.321.873.937,00	(1.748.287.213,00)	(56,94)	
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Wilayah Kabupaten Madiun	12 -	2	1.004.917.150,00	454.917.150,00	(550.000.000,00)	(54,73)	
40	Fasilitasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Wilayah Kabupaten Madiun	60 -	5	108.555.000,00	0,00	(108.555.000,00)	(100,00)	

43	Operasional dan Pemeliharaan Persampahan	Madiun Desa Kaliabu,Desa Mejayan,Kecamata n MEJAYAN,Wilayah Kabupaten Madiun	17 -	2	1.956.689.000,00	329.189.000,00	(1.627.500.000,00)	(83,18)
47	Penanganan Persampahan (COVID19-New Normal)	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	127.522.787,00	127.522.787,00	0,00
48	Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan (COVID19-New Normal)	Wilayah Kabupaten Madiun		5	0,00	410.245.000,00	410.245.000,00	0,00
26	Program Perlindungan Fungsi, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Sumber daya Hayati dan Adaptasi serta Mitigasi Perubahan Iklim		43.40 -		2.496.867.359,00	355.000.000,00	(2.141.867.359,00)	(85,78)
6	Pengendalian Pencemaran dan Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup (DAK)	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	12	1.246.201.000,00	0,00	(1.246.201.000,00)	(100,00)
7	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber- Sumber Air	Desa Mruwak,Wilayah Kabupaten Madiun	30 -	5	550.412.500,00	0,00	(550.412.500,00)	(100,00)
10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Wilayah Kabupaten Madiun	31 -	2	120.000.000,00	105.000.000,00	(15.000.000,00)	(12,50)
47	Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup	Kecamatan MEJAYAN,Wilayah Kabupaten Madiun	2000 -	5	256.177.265,00	0,00	(256.177.265,00)	(100,00)
48	Bina Lingkungan	Wilayah Kabupaten Madiun	4 -	5	109.194.844,00	250.000.000,00	140.805.156,00	128,95
49	Gerakan Penghijauan	Wilayah Kabupaten Madiun	2000 -	5	214.881.750,00	0,00	(214.881.750,00)	(100,00)
27	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Lingkungan Hidup		100 %		1.603.046.258,00	1.602.651.578,00	(394.680,00)	(0,02)
3	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Daur Ulang Sampah)	Desa Mejayan	100 %	11	253.176.678,00	0,00	(253.176.678,00)	(100,00)
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri (Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan)	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	11	1.349.869.580,00	1.602.651.578,00	252.781.998,00	18,73
JUMLAH					16.555.513.250,00	6.449.494.847,00	(10.106.018.403,00)	(61,04)

MADIUN, 14 Juli 2020
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ENDANG SETYOWATI, SH, MM (Pit.)
NIP. 196202231983032019

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		1.663.703.836,00	760.513.836,00	(903.190.000,00)	(54,29)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawain, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	16 -	2	1.571.907.653,00	705.592.653,00	(866.315.000,00)	(55,11)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	6 -	2	91.796.183,00	54.921.183,00	(36.875.000,00)	(40,17)	
16	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk		83.50 %		1.542.830.280,00	1.291.452.680,00	(251.377.600,00)	(16,29)	
6	Pengadaan Tinta Cetak e-KTP (DAK)	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	13	477.664.102,00	477.664.102,00	0,00	0,00	
8	Pengadaan Blangko Kartu Keluarga (DAK)	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	1	486.057.384,00	234.679.784,00	(251.377.600,00)	(51,72)	
9	Penerbitan Kartu Identitas Anak	Wilayah Kabupaten Madiun	12 -	13	333.421.794,00	333.421.794,00	0,00	0,00	
45	Pemeliharaan Peralatan KTP Elektronik	Wilayah Kabupaten Madiun	12 -	2	120.950.000,00	0,00	(120.950.000,00)	(100,00)	
51	Pemeliharaan Peralatan SIAK	Wilayah Kabupaten Madiun		2	124.737.000,00	237.000,00	(124.500.000,00)	(99,81)	
52	Pemeliharaan Peralatan KTP Elektronik Pada Masa Pandemi COVID 19	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	120.950.000,00	120.950.000,00	0,00	
53	Pemeliharaan Peralatan SIAK Pada Masa Pandemi COVID 19	Wilayah Kabupaten Madiun		1	0,00	124.500.000,00	124.500.000,00	0,00	
17	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil		98.50 %		644.398.300,00	931.505.500,00	287.107.200,00	44,55	
3	Pengadaan Blangko dan Formulir Akta Catatan Sipil (DAK)	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	13	146.123.600,00	30.000.000,00	(116.123.600,00)	(79,47)	
4	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Wilayah Kabupaten Madiun	12 -	13	498.274.700,00	498.274.700,00	0,00	0,00	
42	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Era Pandemi Covid 19 (DAK non Fisik)	Wilayah Kabupaten Madiun		13	0,00	403.230.800,00	403.230.800,00	0,00	
18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		94.50 %		655.559.140,00	796.999.140,00	141.440.000,00	21,58	
2	Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)	Wilayah Kabupaten Madiun	12 -	13	238.269.830,00	238.269.830,00	0,00	0,00	
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Wilayah Kabupaten Madiun	12 -	13	166.575.250,00	166.575.250,00	0,00	0,00	
17	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Wilayah Kabupaten Madiun	12 -	2	250.714.060,00	206.754.060,00	(43.960.000,00)	(17,53)	
20	Pengelolaan Administrasi Kependudukan Pada Masa Pandemi COVID-19	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	185.400.000,00	185.400.000,00	0,00	
19	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		63.50 -		773.543.190,00	186.728.840,00	(586.814.350,00)	(75,86)	
2	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Wilayah Kabupaten	1 -	2	192.495.000,00	16.482.500,00	(176.012.500,00)	(91,44)	

3	Pendampingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Madiun Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	212.088.750,00	0,00	(212.088.750,00)	(100,00)
4	Penataan Arsip Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	198.713.100,00	0,00	(198.713.100,00)	(100,00)
5	Penerapan Go Digital dan Inovasi Pelayanan	Wilayah Kabupaten Madiun		13	170.246.340,00	170.246.340,00	0,00	0,00
JUMLAH					5.280.034.746,00	3.967.199.996,00	(1.312.834.750,00)	(24,86)

MADIUN, 14 Juli 2020
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Drs. PUDJI WAHJU WIDODO
NIP. 196103281990031002

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Unit Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -	1.682.164.668,00	840.391.351,00	(841.773.317,00)	(50,04)		
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	12 -	2	1.566.364.668,00	696.081.830,00	(870.282.838,00)	(55,56)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	19 -	2	115.800.000,00	38.194.000,00	(77.606.000,00)	(67,02)	
3	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	2	0,00	106.115.521,00	106.115.521,00	0,00	
21	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan		24 %	430.159.000,00	430.159.000,00	0,00	0,00		
6	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Wilayah Kabupaten Madiun	30 -	5	242.500.000,00	242.500.000,00	0,00	0,00	
25	Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Kabupaten	Wilayah Kabupaten Madiun	6 Desa	2	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
26	Pemberdayaan teknologi tepat guna dan sumber daya alam	Wilayah Kabupaten Madiun	30 -	5	94.659.000,00	94.659.000,00	0,00	0,00	
27	Pengembangan kawasan perdesan dan kerjasama antar desa	Wilayah Kabupaten Madiun	3 -	5	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
22	Program Peningkatan Pembangunan dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan		47 %	1.682.087.372,00	945.076.450,00	(737.010.922,00)	(43,82)		
1	Pendampingan perencanaan pembangunan desa	Wilayah Kabupaten Madiun	37 -	2	562.587.372,00	238.498.300,00	(324.089.072,00)	(57,61)	
2	Pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	747.582.426,00	288.283.450,00	(459.298.976,00)	(61,44)	
3	Pendukung pemberdayaan sosial budaya masyarakat	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	371.917.574,00	56.524.150,00	(315.393.424,00)	(84,80)	
23	Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dimasa Pandemi Covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun	115 -	2	0,00	361.770.550,00	361.770.550,00	0,00	
23	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa		38 %	954.762.000,00	464.489.488,00	(490.272.512,00)	(51,35)		
19	Pengembangan kapasitas pemerintahan dan aparatur desa	Wilayah Kabupaten Madiun	2 Orang	2	174.689.188,00	51.144.888,00	(123.544.300,00)	(70,72)	
20	Pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Wilayah Kabupaten Madiun	198 -	2	640.982.900,00	398.344.600,00	(242.638.300,00)	(37,85)	
21	Pembinaan pengelolaan administrasi dan aset desa	Wilayah Kabupaten Madiun	1 Desa	2	99.807.912,00	15.000.000,00	(84.807.912,00)	(84,97)	
22	Pengembangan kapasitas lembaga desa	Wilayah Kabupaten Madiun	198 -	2	39.282.000,00	0,00	(39.282.000,00)	(100,00)	
			JUMLAH		4.749.173.040,00	2.680.116.289,00	(2.069.056.751,00)	(43,57)	

MADIUN, 14 Juli 2020
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

JOKO LELONO, AP, M.H
NIP. 197306081993111001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -	1.547.362.545,00		1.305.334.069,00	(242.028.476,00)	(15,64)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Desa Babadan Lor,Desa Kaligunting,Desa Mejayan	100 - 2	1.521.692.959,00		1.305.334.069,00	(216.358.890,00)	(14,22)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	-	2 - 2	25.669.586,00		0,00	(25.669.586,00)	(100,00)	
22	Program Manajemen Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas		83 %	1.416.500.000,00		1.244.560.000,00	(171.940.000,00)	(12,14)	
13	Pemantauan, pengaturan, pengawalan, penegakan disiplin lalu lintas	Desa Mejayan	260 - 1	400.000.000,00		317.760.000,00	(82.240.000,00)	(20,56)	
14	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Andalalin dan Event Khusus	-	10 - 1	281.500.000,00		211.500.000,00	(70.000.000,00)	(24,87)	
15	Penanganan, pengaturan dan pengawasan titik parkir	-	100 - 1	735.000.000,00		635.000.000,00	(100.000.000,00)	(13,61)	
16	Penanganan, pengaturan dan pengawasan titik parkir (COVID19-New Normal)	Desa Mejayan	5	0,00		80.300.000,00	80.300.000,00	0,00	
24	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Kelaikan Kendaraan, Sarana Prasarana Multimoda dan Perkeretaapian		90 %	2.519.332.375,00		1.345.938.250,00	(1.173.394.125,00)	(46,58)	
1	Penyelenggaraan Manajemen Angkutan dan Keselamatan Jalan, Perkeretaapian, Sungai dan Danau	-	1 - 5	209.870.400,00		0,00	(209.870.400,00)	(100,00)	
3	Penyelenggaraan Manajemen Angkutan, Penyediaan, Pemeliharaan Alat dan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Desa Bajulan,Desa Banjarejo,Desa Mejayan,Wilayah Kabupaten Madiun	100 % 1	2.024.561.975,00		1.175.938.250,00	(848.623.725,00)	(41,92)	
4	Penyelenggaraan Keselamatan dan Perkeretaapian	Desa Mejayan	100 % 1	284.900.000,00		170.000.000,00	(114.900.000,00)	(40,33)	
26	Program Perlengkapan Sarana dan Prasarana Jalan		100 %	21.958.814.257,00		15.245.209.127,00	(6.713.605.130,00)	(30,57)	
1	Penyediaan sarana dan pemeliharaan sarana keselamatan lalu lintas	Desa Mejayan	100 % 10	757.542.995,00		100.000.000,00	(657.542.995,00)	(86,80)	
2	Pembangunan, Pengendalian daya, Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ) dan Penyediaan Jasa APJ	Desa Mejayan	100 % 1	21.201.271.262,00		15.145.209.127,00	(6.056.062.135,00)	(28,56)	
JUMLAH				27.442.009.177,00		19.141.041.446,00	(8.300.967.731,00)	(30,25)	

MADIUN, 14 Juli 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SUPRIYADI, AP., M.Si

NIP. 197406101993111002

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKAP SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		82 -	934.178.194,00	639.410.449,14	(294.767.744,86)	(31,55)		
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Desa Kebonagung,Desa Mejayan,Wilayah Kabupaten Madiun	85 - 2	887.632.932,00	625.686.839,00	(261.946.093,00)	(29,51)		
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	82 - 2	46.545.262,00	13.723.610,14	(32.821.651,86)	(70,52)		
15	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah		80 %	314.705.844,00	148.495.176,00	(166.210.668,00)	(52,81)		
17	Pengembangan Pusat Data Statistik Sektoral	Wilayah Kabupaten Madiun	55 - 2	117.790.800,00	66.457.500,00	(51.333.300,00)	(43,58)		
18	Kompilasi Data Statistik Sektoral	Wilayah Kabupaten Madiun	1 Dok 2	39.353.996,00	1.044.000,00	(38.309.996,00)	(97,35)		
20	Penyusunan Data Statistik Kewilayahan	Wilayah Kabupaten Madiun	5 Dok 2	98.458.872,00	36.923.500,00	(61.535.372,00)	(62,50)		
22	Forum Pengelolaan dan Pemanfaatan data Statistik Sektoral	Wilayah Kabupaten Madiun	55 - 2	59.102.176,00	44.070.176,00	(15.032.000,00)	(25,43)		
16	Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Infomasi		47.54 %	149.999.651,00	126.983.758,00	(23.015.893,00)	(15,34)		
1	Operasional Pengamanan Informasi Persandian	Wilayah Kabupaten Madiun	2 - 2	44.889.800,00	44.889.800,00	0,00	0,00		
2	Penyusunan Kebijakan Persandian	-	1 - 2	40.262.165,00	36.261.158,00	(4.001.007,00)	(9,94)		
3	Pengelolaan Sumber Daya Persandian	Wilayah Kabupaten Madiun	1 - 2	64.847.686,00	38.832.800,00	(26.014.886,00)	(40,12)		
5	Pengelolaan Sumber Daya Persandian (COVID19-New Normal)	Wilayah Kabupaten Madiun		0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		
19	Program Tata Kelola E-Government dan Infrastruktur Jaringan TI dan Komunikasi		19 %	3.580.737.507,82	3.374.449.353,00	(206.288.154,82)	(5,76)		
1	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Sarana prasarana Teknologi Informasi (COVID19-New Normal)	-		0,00	1.623.324.229,00	1.623.324.229,00	0,00		
3	Penguatan Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Wilayah Kabupaten Madiun	75 - 2	94.000.000,00	53.908.200,00	(40.091.800,00)	(42,65)		
4	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Sarana prasarana Teknologi Informasi	Wilayah Kabupaten Madiun	55 - 5	3.088.415.007,82	1.306.090.779,00	(1.782.324.228,82)	(57,71)		
5	Pengembangan Aplikasi	Desa Bagi	3 - 2	398.322.500,00	391.126.145,00	(7.196.355,00)	(1,81)		
20	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		325 berita	1.013.055.770,00	270.950.269,50	(742.105.500,50)	(73,25)		
1	Penyelenggaraan Kemitraan Komunikasi Publik	Wilayah Kabupaten Madiun	100 - 2	561.092.920,00	87.105.269,50	(473.987.650,50)	(84,48)		
3	Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM	Wilayah Kabupaten Madiun	24 - 2	126.908.000,00	149.075.000,00	22.167.000,00	17,47		
4	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Wilayah Kabupaten Madiun	30 - 2	169.741.350,00	10.930.000,00	(158.811.350,00)	(93,56)		
6	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	50 - 2	155.313.500,00	23.840.000,00	(131.473.500,00)	(84,65)		
			JUMLAH	5.992.676.966,82	4.560.289.005,64	(1.432.387.961,18)	(23,90)		

MADIUN, 14 Juli 2020
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

Drs. SAWUNG REHTOMO, M.Si.
NIP. 197008251990031001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		82 -	1.783.122.150,00	1.244.418.140,00	(538.704.010,00)	(30,21)		
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan BALEREJO,Kecam tan DAGANGAN,Kecam atan DOLOPO,Kecamata n MEJAYAN,Wilayah Kabupaten Madiun	2 - 2	1.722.372.150,00	1.191.495.465,00	(530.876.685,00)	(30,82)		
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan MEJAYAN	15 - 2	60.750.000,00	17.922.675,00	(42.827.325,00)	(70,50)		
3	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana di Masa Tatanan Baru Produktif dan Aman Covid 19	Wilayah Kabupaten Madiun	2	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00		
18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		634 -	2.850.382.000,00	0,00	(2.850.382.000,00)	(100,00)		
13	Revitalisasi Pasar Tradisional (DAK)	Wilayah Kabupaten Madiun	1 - 12	2.850.382.000,00	0,00	(2.850.382.000,00)	(100,00)		
20	Program Pengembangan Usaha Mikro		128140 -	197.464.000,00	313.352.400,00	115.888.400,00	58,69		
4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Wilayah Kabupaten Madiun	240 - 2	128.464.000,00	8.352.400,00	(120.111.600,00)	(93,50)		
5	Penumbuhan Wirausaha Baru	Wilayah Kabupaten Madiun	60 - 10	69.000.000,00	0,00	(69.000.000,00)	(100,00)		
6	Pelatihan Ketrampilan Skema Pemulihan Usaha Mikro di Masa Kenormalan Baru	Wilayah Kabupaten Madiun	10	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
7	Pelatihan Pelaku Usaha dalam rangka Pemanfaatan Online / Media Sosial di masa Kenormalan Baru	Wilayah Kabupaten Madiun	10	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00		
8	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dalam rangka Pemulihan Dampak Ekonomi di Masa Kenormalan Baru	Wilayah Kabupaten Madiun	10	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00		
21	Program Pembinaan dan Peningkatan Pedagang formal		7447 -	666.046.248,00	186.807.368,00	(479.238.880,00)	(71,95)		
1	Pengembangan Usaha Perdagangan	Wilayah Kabupaten Madiun	60 - 10	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)		
2	Pengembangan Dan Pemasaran Produk Unggulan	Wilayah Kabupaten Madiun	23 - 10	245.952.116,00	0,00	(245.952.116,00)	(100,00)		
4	Pelayanan Tera Dan Tera Ulang UTTP	Wilayah Kabupaten Madiun	2400 - 1	64.762.218,00	56.828.618,00	(7.933.600,00)	(12,25)		
6	Kalibrasi Dan Verifikasi Peralatan Standar Laboratorium Kemetrolgian	Wilayah Kabupaten Madiun	633 - 10	75.331.914,00	59.978.750,00	(15.353.164,00)	(20,38)		

7	Peningkatan Pengawasan pedagang tertib niaga	Wilayah Kabupaten Madiun	1500 -	10	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
8	Pengembangan Usaha Pemasaran dalam rangka Ekspor	Wilayah Kabupaten Madiun		10	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
9	Pengembangan Usaha Perdagangan dalam rangka Pemulihan Dampak Ekonomi di Masa Kenormalan Baru	Wilayah Kabupaten Madiun		10	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
21	Program Pengembangan Koperasi		689 -		812.358.000,00	544.684.600,00	(267.673.400,00)	(32,95)
13	Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Koperasi	-	337 -	10	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
14	Pengendalian dan Pengawasan Koperasi	Wilayah Kabupaten Madiun	41 -	10	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
15	Fasilitasi advokasi dan Penyuluh hukum Koperasi	-	60 -	10	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
16	Pembinaan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	-	5 -	10	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)
17	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Wilayah Kabupaten Madiun	1.68 -	10	125.000.000,00	82.326.600,00	(42.673.400,00)	(34,14)
18	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	13	417.358.000,00	417.358.000,00	0,00	0,00
22	Program Operasi Pasar		10 -		323.750.000,00	136.692.800,00	(187.057.200,00)	(57,78)
2	Monitoring Harga Sembako Dan Barang Penting Lainnya	Wilayah Kabupaten Madiun	28 -	10	53.750.000,00	0,00	(53.750.000,00)	(100,00)
3	Penyediaan Data Inflasi Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	10	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
4	operasi pasar mandiri	Wilayah Kabupaten Madiun	21 -	2	170.000.000,00	22.742.800,00	(147.257.200,00)	(86,62)
5	operasi pasar mandiri dalam rangka menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan di Masa Kenormalan Baru	Wilayah Kabupaten Madiun		5	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
6	Monitoring harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting lainnya dalam rangka menjaga rantai pasok dan distribusi di Masa Kenormalan Baru	Wilayah Kabupaten Madiun		10	0,00	78.950.000,00	78.950.000,00	0,00
23	Program Pengelolaan Pasar Daerah		2 -		1.172.843.550,00	1.160.633.988,00	(12.209.562,00)	(1,04)
1	Rehabilitasi Pasar Daerah	Kelurahan Millir, Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	5	254.663.600,00	254.663.600,00	0,00	0,00
3	Peningkatan SDM Bagi Pengelola Dan Pedagang Pasar Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	50 -	10	29.352.100,00	0,00	(29.352.100,00)	(100,00)
4	Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Rangka Pelayanan Pasar	Wilayah Kabupaten Madiun	43 -	1	305.824.300,00	256.800.000,00	(49.024.300,00)	(16,03)
5	Pengelolaan Operasional Keamanan, Kebersihan Dan Kelistrikan Pasar	Wilayah Kabupaten Madiun	37 -	2	583.003.550,00	582.300.000,00	(703.550,00)	(0,12)
6	Sosialisasi dan Peningkatan SDM Bagi Pengelola Dan Pedagang Pasar Daerah terhadap Covid 19 di masa kenormalan baru	Wilayah Kabupaten Madiun		5	0,00	66.870.388,00	66.870.388,00	0,00
24	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal		100 -		96.530.165,00	96.530.165,00	0,00	0,00
1	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran/Penjual Eceran	Wilayah Kabupaten Madiun	1000000 -	11	96.530.165,00	96.530.165,00	0,00	0,00
25	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Koperasi dan usaha Mikro (Cukai)		100 -		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
1	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat (Pelatihan Keterampilan Sablon Kaos)	-	50 -	11	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat (Pelatihan Keterampilan Kerajinan (Craft))	-	50 -	11	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
25	Program Pembinaan Lingkungan sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Perdagangan (cukai)		80 -		212.719.835,00	212.719.835,00	0,00	0,00
1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi PKL/Asongan)	Wilayah Kabupaten Madiun	80 -	11	212.719.835,00	107.120.672,00	(105.599.163,00)	(49,64)
3	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi PKL/Asongan di Masa Tatanan Baru Produktif dan Aman Covid 19)	Wilayah Kabupaten Madiun		11	0,00	105.599.163,00	105.599.163,00	0,00
				JUMLAH	8.365.215.948,00	4.145.839.296,00	(4.219.376.652,00)	(50,44)

MADIUN, 14 Juli 2020
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

ANANG SULISTIJO, S. Sos., M. Si

NIP. 197003261991011001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal
Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -	1.607.394.963,00	1.023.946.450,00	(583.448.513,00)	(36,30)		
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	5 -	2	1.522.394.963,00	1.004.641.450,00	(517.753.513,00)	(34,01)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	15 -	2	85.000.000,00	19.305.000,00	(65.695.000,00)	(77,29)	
19	Program Peningkatan Pelayanan Publik		75 %	37.277.592,00	0,00	(37.277.592,00)	(100,00)		
4	Penyusunan dan Penyajian Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Wilayah Kabupaten Madiun	5 -	2	37.277.592,00	0,00	(37.277.592,00)	(100,00)	
20	Program Peningkatan Investasi Usaha		100 -	468.877.614,00	110.851.750,00	(358.025.864,00)	(76,36)		
1	Fasilitasi Percepatan Investasi	Wilayah Kabupaten Madiun	6 -	1	300.000.000,00	3.000.000,00	(297.000.000,00)	(99,00)	
2	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	1	131.149.614,00	107.851.750,00	(23.297.864,00)	(17,76)	
3	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wilayah Kabupaten Madiun	50 %	1	37.728.000,00	0,00	(37.728.000,00)	(100,00)	
21	Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan		100 %	305.429.467,00	46.368.500,00	(259.060.967,00)	(84,82)		
1	Penyusunan Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Wilayah Kabupaten Madiun	80 %	1	155.429.697,00	39.368.500,00	(116.061.197,00)	(74,67)	
2	Penyusunan dan Penyajian Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	1	149.999.770,00	7.000.000,00	(142.999.770,00)	(95,33)	
JUMLAH					2.418.979.636,00	1.181.166.700,00	(1.237.812.936,00)	(51,17)	

MADIUN, 14 Juli 2020
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ARIK KRISDIANANTO, S.STP
NIP. 197509251996021003

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		90 -		1.447.014.651,00	1.112.014.651,00	(335.000.000,00)	(23,15)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	2	1.293.826.451,00	958.826.451,00	(335.000.000,00)	(25,89)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	2	153.188.200,00	153.188.200,00	0,00	0,00	
18	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata		13 -		4.329.344.790,00	394.074.596,00	(3.935.270.194,00)	(90,90)	
6	Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata	Wilayah Kabupaten Madiun	21 -	6	4.089.344.790,00	195.574.596,00	(3.893.770.194,00)	(95,22)	
9	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi	Wilayah Kabupaten Madiun		5	0,00	198.500.000,00	198.500.000,00	0,00	
43	Pengembangan Usaha Pariwisata Daerah	-	33 -	5	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
44	Pengembangan Daya Tarik Wisata	-		5	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	(100,00)	
19	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pemasaran Pariwisata		22 -		2.054.391.000,00	102.000.000,00	(1.952.391.000,00)	(95,04)	
6	Fasilitasi Kerjasama Pariwisata Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	7 -	2	80.880.000,00	0,00	(80.880.000,00)	(100,00)	
43	Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah (DID)	Desa Banaran,Desa Banjarejo,Desa Doho,Desa Jatisari,Desa Mejayan,Wilayah Kabupaten Madiun	21 -	5	1.773.511.000,00	12.000.000,00	(1.761.511.000,00)	(99,32)	
45	Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Wilayah Kabupaten Madiun	20 -	2	200.000.000,00	90.000.000,00	(110.000.000,00)	(55,00)	
21	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur lingkup Pariwisata(Cukai)		15 -		950.000.000,00	1.199.589.680,00	249.589.680,00	26,27	
1	Pembangunan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata (Cukai)	Wilayah Kabupaten Madiun	14 -	11	950.000.000,00	1.199.589.680,00	249.589.680,00	26,27	
22	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Pariwisata (Cukai)		80 -		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat lingkup pariwisata (Cukai)	Wilayah Kabupaten Madiun	100 -	11	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
24	Program Pengembangan Olahraga dan Kepemudaan		10 -		1.502.953.600,00	749.071.509,00	(753.882.091,00)	(50,16)	
1	Peningkatan SDM Kepemudaan	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	5	878.566.700,00	362.449.850,00	(516.116.850,00)	(58,75)	
2	Peningkatan Prestasi Olahraga	Wilayah Kabupaten Madiun	78 -	1	328.893.700,00	158.758.509,00	(170.135.191,00)	(51,73)	

3	Peningkatan Pemasarakatan Olahraga	Madiun Wilayah Kabupaten Madiun	7 -	2	295.493.200,00	227.863.150,00	(67.630.050,00)	(22,89)
				JUMLAH	10.533.704.041,00	3.806.750.436,00	(6.726.953.605,00)	(63,86)

MADIUN, 14 Juli 2020
**KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

ANANG SULISTIJONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19700326 199101 1 001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 17 Perpustakaan
Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		75 -	1.093.311.838,00		635.269.651,00	(458.042.187,00)	(41,89)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Desa Mejayan,Kecamatan n MEJAYAN	80 - 2	1.072.264.364,00		614.862.177,00	(457.402.187,00)	(42,66)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan MEJAYAN	17 - 2	21.047.474,00		20.407.474,00	(640.000,00)	(3,04)	
17	Program Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca		100 -	516.940.526,00		0,00	(516.940.526,00)	(100,00)	
2	Pengadaan Perabot Kerja	Kecamatan MEJAYAN		59.123.000,00	12	0,00	(59.123.000,00)	(100,00)	
4	Pengadaan Bahan Perpustakaan	Kecamatan MEJAYAN		200.000.000,00	12	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
28	Pelayanan Perpustakaan	Desa Mejayan,Kecamatan n MEJAYAN	600 - 2	63.876.550,00		0,00	(63.876.550,00)	(100,00)	
29	Pengembangan Minat Baca	Desa Mejayan,Kecamatan n MEJAYAN	15 - 2	193.940.976,00		0,00	(193.940.976,00)	(100,00)	
19	Program Pengelolaan Kearsipan Daerah		712.90 -	127.700.350,00		28.345.000,00	(99.355.350,00)	(77,80)	
5	Penataan Depo Arsip	Kecamatan MEJAYAN	200 - 2	84.574.100,00		22.075.000,00	(62.499.100,00)	(73,90)	
6	Pengelolaan Arsip Dinamis	Kecamatan MEJAYAN	14 - 2	43.126.250,00		6.270.000,00	(36.856.250,00)	(85,46)	
20	Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan		20 -	137.338.400,00		15.682.500,00	(121.655.900,00)	(88,58)	
10	Pengawasan kearsipan Internal	Desa Mejayan,Kecamatan n MEJAYAN	100 - 2	70.685.500,00		15.682.500,00	(55.003.000,00)	(77,81)	
11	Penyusutan Arsip OPD	Desa Mejayan	100 - 2	66.652.900,00		0,00	(66.652.900,00)	(100,00)	
JUMLAH					1.875.291.114,00	679.297.151,00	(1.195.993.963,00)	(63,78)	

MADIUN, 14 Juli 2020

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN**

Ir .B.EKO YUNianto,M.Si

NIP. 196306051995031002

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian
Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 Dinas Pertanian dan Perikanan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -	1.636.751.778,00		1.166.290.553,54	(470.461.224,46)	(28,74)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawainan, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	12 - 2	1.563.463.078,00		1.115.371.853,54	(448.091.224,46)	(28,66)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	12 - 2	73.288.700,00		50.918.700,00	(22.370.000,00)	(30,52)	
24	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku		229.69 -	250.000.000,00		250.611.250,00	611.250,00	0,24	
9	Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) Tembakau (Cukai)	Wilayah Kabupaten Madiun	16000 - 11	250.000.000,00		100.611.250,00	(149.388.750,00)	(59,76)	
10	Penerapan Budidaya Tembakau yang baik di Masa Kenormalan Baru (Cukai)	Wilayah Kabupaten Madiun	9000 - 11	0,00		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
25	Program Pengembangan Perikanan		4165.22 -	499.867.267,00		347.750.000,00	(152.117.267,00)	(30,43)	
22	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Wilayah Kabupaten Madiun	1 - 5	350.000.000,00		334.000.000,00	(16.000.000,00)	(4,57)	
26	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap	Wilayah Kabupaten Madiun	175000 - 2	48.804.706,00		0,00	(48.804.706,00)	(100,00)	
28	Kreasi Cipta Menu Olahan Berbahan Baku Ikan	Wilayah Kabupaten Madiun	2 - 5	101.062.561,00		13.750.000,00	(87.312.561,00)	(86,39)	
27	Program Pemberdayaan Penyuluh dan Lembaga Petani		67 -	287.133.990,90		95.107.324,98	(192.026.665,92)	(66,88)	
6	Penguatan Kapasitas SDM dalam membangun Ketahanan Pangan di Masa Kenormalan Baru	Wilayah Kabupaten Madiun	150 - 5	0,00		31.084.125,00	31.084.125,00	0,00	
15	Sarasehan Kelembagaan Petani	Wilayah Kabupaten Madiun	200 - 2	89.692.799,90		22.423.199,98	(67.269.599,92)	(75,00)	
30	pameran hasil produksi	Wilayah Kabupaten Madiun	50 - 5	92.129.564,00		0,00	(92.129.564,00)	(100,00)	
31	penilaian kelas kelompok	Wilayah Kabupaten Madiun	764 - 5	105.311.627,00		41.600.000,00	(63.711.627,00)	(60,50)	
30	Program Pengembangan Tanaman Pangan		2592.34 -	321.325.742,50		384.944.247,00	63.618.504,50	19,80	
1	Perlindungan Tanaman Pangan	Wilayah Kabupaten Madiun	2 - 10	250.000.000,00		178.064.747,00	(71.935.253,00)	(28,77)	
10	Pemanfaatan Pekarangan untuk mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Masa Kenormalan Baru	Wilayah Kabupaten Madiun	15 - 5	0,00		206.879.500,00	206.879.500,00	0,00	
18	Obor Pangan Lestari	Wilayah Kabupaten Madiun	1 - 2	71.325.742,50		0,00	(71.325.742,50)	(100,00)	
32	Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)		100 -	1.900.000.000,00		1.900.000.000,00	0,00	0,00	
1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (IPDMIP)	Wilayah Kabupaten Madiun	17 - 16	1.900.000.000,00		1.900.000.000,00	0,00	0,00	

34	Program Pengembangan Perkebunan		375.30 -		231.989.550,00	254.123.592,00	22.134.042,00	9,54
3	rehabilitasi tanaman perkebunan	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	2	206.989.550,00	50.893.492,00	(156.096.058,00)	(75,41)
8	Penanganan Pasca Panen Perkebunan	Wilayah Kabupaten Madiun		2	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
9	Bantuan Sarana Produksi Komoditas Perkebunan untuk Mendukung Produksi di Masa Kenormalan Baru	Wilayah Kabupaten Madiun	4150 -	5	0,00	203.230.100,00	203.230.100,00	0,00
35	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Pemberdayaan Ekonomi		4 -		250.000.000,00	249.388.750,00	(611.250,00)	(0,24)
1	Bantuan Sarana Produksi Bibit/ Benih Perkebunan (Cukai)	Wilayah Kabupaten Madiun	2000 -	11	250.000.000,00	99.388.750,00	(150.611.250,00)	(60,24)
2	Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Masa Kenormalan Baru (Cukai)	Wilayah Kabupaten Madiun	2100 -	11	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
37	Program Pengembangan Hortikultura		282 -		134.961.593,50	106.243.862,08	(28.717.731,42)	(21,28)
7	Pengembangan Kebun Bibit Hortikultura	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	134.961.593,50	106.243.862,08	(28.717.731,42)	(21,28)
38	Program Prasarana dan Sarana Pertanian		2.50 -		5.040.789.224,00	1.259.010.611,50	(3.781.778.612,50)	(75,02)
1	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Wilayah Kabupaten Madiun	175 -	2	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
2	Sarana produksi dan alat mesin pertanian	Wilayah Kabupaten Madiun	400 -	5	264.000.000,00	50.630.000,00	(213.370.000,00)	(80,82)
3	Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian	Wilayah Kabupaten Madiun	13 -	12	1.658.094.000,00	878.829.000,00	(779.265.000,00)	(47,00)
4	Pengembangan sarana prasarana infrastruktur pertanian	Wilayah Kabupaten Madiun	16 -	6	2.912.892.224,00	0,00	(2.912.892.224,00)	(100,00)
5	Rehabilitasi Infrastruktur Kebun Bibit	Wilayah Kabupaten Madiun	80 -	6	180.803.000,00	141.704.611,50	(39.098.388,50)	(21,62)
7	Sarana produksi dan alat mesin pertanian untuk mendukung Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid 19	Wilayah Kabupaten Madiun	5720 -	5	0,00	187.847.000,00	187.847.000,00	0,00
				JUMLAH	10.552.819.145,90	6.013.470.191,10	(4.539.348.954,80)	(43,02)

MADIUN, 14 Juli 2020
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

SODIK HERY PURNOMO,S.Si
NIP. 196912181997031003

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 Bagian Administrasi Pemerintahan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		322.674.872,00	219.273.722,00	(103.401.150,00)	(32,04)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawain, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	2	299.482.900,00	197.791.750,00	(101.691.150,00)	(33,96)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	20 -	2	23.191.972,00	21.481.972,00	(1.710.000,00)	(7,37)	
42	Program Penunjang Administrasi Pemerintahan		36 -		810.660.850,00	272.422.900,00	(538.237.950,00)	(66,39)	
1	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	143.488.850,00	30.041.400,00	(113.447.450,00)	(79,06)	
2	Penunjang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	100 -	2	262.150.000,00	156.317.500,00	(105.832.500,00)	(40,37)	
3	Penunjang Penyelenggaraan Perangkat Wilayah	Wilayah Kabupaten Madiun	36 -	2	355.022.000,00	36.064.000,00	(318.958.000,00)	(89,84)	
4	Peringatan Hari Jadi Provinsi	Wilayah Kabupaten Madiun	3 -	8	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH					1.133.335.722,00	491.696.622,00	(641.639.100,00)	(56,62)	

MADIUN, 11 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
NIP. 196511101992081001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 02 Bagian Hukum

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -	212.833.575,00	100.751.025,00	(112.082.550,00)	(52,66)		
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawain, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	197.493.575,00	85.411.025,00	(112.082.550,00)	(56,75)		
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	-	20 -	15.340.000,00	15.340.000,00	0,00	0,00		
26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		70 -	179.059.097,00	107.628.139,00	(71.430.958,00)	(39,89)		
3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Wilayah Kabupaten Madiun	70 -	102.782.485,00	76.005.505,00	(26.776.980,00)	(26,05)		
8	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	43 -	57.462.372,00	31.622.634,00	(25.839.738,00)	(44,97)		
44	Peningkatan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah HAM (RADHAM)	Wilayah Kabupaten Madiun	83 -	18.814.240,00	0,00	(18.814.240,00)	(100,00)		
43	Program Fasilitasi Hukum		100 %	254.148.128,00	119.760.000,00	(134.388.128,00)	(52,88)		
1	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Wilayah Kabupaten Madiun	700 -	66.182.278,00	0,00	(66.182.278,00)	(100,00)		
2	Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum	Wilayah Kabupaten Madiun	8 -	37.965.850,00	0,00	(37.965.850,00)	(100,00)		
3	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Miskin	Wilayah Kabupaten Madiun	12 -	150.000.000,00	119.760.000,00	(30.240.000,00)	(20,16)		
JUMLAH				646.040.800,00	328.139.164,00	(317.901.636,00)	(49,21)		

MADIUN, 11 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
NIP. 196511101992081001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 10 Bagian Administrasi Pembangunan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		273.618.500,00	81.666.640,00	(191.951.860,00)	(70,15)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawain, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	2	266.884.840,00	81.666.640,00	(185.218.200,00)	(69,40)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	20 -	2	6.733.660,00	0,00	(6.733.660,00)	(100,00)	
51	Program Penunjang Administrasi Pembangunan		100 %		760.504.100,00	345.336.360,00	(415.167.740,00)	(54,59)	
1	Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	-	100 %	2	460.504.100,00	258.798.095,00	(201.706.005,00)	(43,80)	
2	Pengendalian Kebijakan Pembangunan Daerah	Desa Mejayan	100 %	2	150.000.000,00	49.867.590,00	(100.132.410,00)	(66,75)	
3	Evaluasi Dan Pelaporan Kebijakan Pembangunan Daerah	-	100 %	2	150.000.000,00	36.670.675,00	(113.329.325,00)	(75,55)	
JUMLAH					1.034.122.600,00	427.003.000,00	(607.119.600,00)	(58,71)	

MADIUN, 11 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
NIP. 196511101992081001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		105.468.368,00	55.380.880,00	(50.087.488,00)	(47,49)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawain, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	2	99.912.118,00	49.824.630,00	(50.087.488,00)	(50,13)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	20 -	2	5.556.250,00	5.556.250,00	0,00	0,00	
34	Program Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah		85 %		251.682.812,00	100.078.491,00	(151.604.321,00)	(60,24)	
4	Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Wilayah Kabupaten Madiun	100 -	2	99.221.680,00	77.453.910,00	(21.767.770,00)	(21,94)	
5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Wilayah Kabupaten Madiun	4 -	2	11.834.750,00	2.184.091,00	(9.650.659,00)	(81,55)	
14	Bimbingan Teknis Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa	Wilayah Kabupaten Madiun	6 -	2	70.531.972,00	20.440.490,00	(50.091.482,00)	(71,02)	
19	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem LPSE	Wilayah Kabupaten Madiun	100 -	2	70.094.410,00	0,00	(70.094.410,00)	(100,00)	
				JUMLAH	357.151.180,00	155.459.371,00	(201.691.809,00)	(56,47)	

MADIUN, 11 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
NIP. 196511101992081001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 05 Bagian Kesejahteraan Rakyat

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -	559.666.805,00	449.250.075,00	(110.416.730,00)	(19,73)		
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawainan, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	85 - 2	544.666.805,00	438.000.075,00	(106.666.730,00)	(19,58)		
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	10 - 2	15.000.000,00	11.250.000,00	(3.750.000,00)	(25,00)		
48	Program Kesejahteraan Rakyat		100 %	3.678.665.940,82	1.399.006.408,04	(2.279.659.532,78)	(61,97)		
1	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Kehidupan Beragama	Wilayah Kabupaten Madiun	50 - 2	1.202.519.659,82	424.868.722,00	(777.650.937,82)	(64,67)		
2	Peringatan Hari Besar Agama	Wilayah Kabupaten Madiun	10360 - 2	990.158.660,00	119.913.800,00	(870.244.860,00)	(87,89)		
3	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan	Wilayah Kabupaten Madiun	5 - 2	960.934.750,00	781.252.478,04	(179.682.271,96)	(18,70)		
4	Pemberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) dan Pemulangan Jamaah Haji	Wilayah Kabupaten Madiun	4 - 2	298.060.000,00	0,00	(298.060.000,00)	(100,00)		
8	sinkronisasi pengembangan UKS	Wilayah Kabupaten Madiun	5 - 2	36.305.667,00	0,00	(36.305.667,00)	(100,00)		
9	sinkronisasi lintas OPD bidang kesejahteraan rakyat	Wilayah Kabupaten Madiun	3 - 2	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)		
10	Pengelolaan sarana prasarana peribadatan	Wilayah Kabupaten Madiun	10 - 2	121.882.204,00	72.539.408,00	(49.342.796,00)	(40,48)		
12	Fasilitasi pengembangan lokasi pemantauan rakyatul hilal	Wilayah Kabupaten Madiun	9 - 2	24.110.000,00	432.000,00	(23.678.000,00)	(98,21)		
13	Verifikasi dan validasi bantuan sosial, hibah kepada kelompok masyarakat dan keagamaan	Wilayah Kabupaten Madiun	30 - 2	4.695.000,00	0,00	(4.695.000,00)	(100,00)		
JUMLAH				4.238.332.745,82	1.848.256.483,04	(2.390.076.262,78)	(56,39)		

MADIUN, 11 Juli 2020
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Drs. NDARU PANDAMNINGTYAS, M.Hum.

NIP. 19631105 199203 1 007

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 06 Bagian Perekonomian

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		187.992.385,00	48.496.768,00	(139.495.617,00)	(74,20)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	100 -	2	183.992.385,00	0,00	(183.992.385,00)	(100,00)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	20 -	2	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	-		2	0,00	48.496.768,00	48.496.768,00	0,00	
35	Program Penunjang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		6 -		224.025.000,00	36.155.850,00	(187.869.150,00)	(83,86)	
15	Fasilitasi Pengembangan Perusahaan Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	5 -	2	148.000.000,00	27.456.250,00	(120.543.750,00)	(81,45)	
29	Penyusunan Data Hasil Produksi	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	8.000.000,00	1.382.000,00	(6.618.000,00)	(82,73)	
30	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ESDM dan LH	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	68.025.000,00	7.317.600,00	(60.707.400,00)	(89,24)	
44	Program Pengendalian Inflasi Daerah		5 -		200.000.000,00	85.350.000,00	(114.650.000,00)	(57,33)	
1	Pengawasan dan Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	5 -	2	200.000.000,00	85.350.000,00	(114.650.000,00)	(57,33)	
46	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (Cukai)		100 -		659.060.050,00	659.060.050,00	0,00	0,00	
1	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan Serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Wilayah Kabupaten Madiun	22 -	11	659.060.050,00	268.581.950,00	(390.478.100,00)	(59,25)	
2	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan Serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Perundang -undangan dibidang Cukai Pada Masa Pandemi Covid-19	-		11	0,00	390.478.100,00	390.478.100,00	0,00	
				JUMLAH	1.271.077.435,00	829.062.668,00	(442.014.767,00)	(34,77)	

MADIUN, 11 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
NIP. 196511101992081001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 07 Bagian Umum

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		9.707.992.186,00	8.756.975.656,10	(951.016.529,90)	(9,80)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan MEJAYAN, Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	2	9.501.631.486,00	7.884.997.481,10	(1.616.634.004,90)	(17,01)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	20 -	2	206.360.700,00	147.364.100,00	(58.996.600,00)	(28,59)	
3	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	-		2	0,00	724.614.075,00	724.614.075,00	0,00	
16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		86 -		1.852.979.750,00	828.714.040,00	(1.024.265.710,00)	(55,28)	
5	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Desa Babadan Lor	85 -	2	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Wilayah Kabupaten Madiun	160 -	2	1.223.000.000,00	363.474.040,00	(859.525.960,00)	(70,28)	
16	Peningkatan Pelayanan Acara-acara Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	86 -	2	519.979.750,00	355.240.000,00	(164.739.750,00)	(31,68)	
				JUMLAH	11.560.971.936,00	9.585.689.696,10	(1.975.282.239,90)	(17,09)	

MADIUN, 11 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
NIP. 196511101992081001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 08 Bagian Organisasi

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		258.224.250,00	124.558.073,00	(133.666.177,00)	(51,76)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawain, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	2	252.224.250,00	118.558.073,00	(133.666.177,00)	(52,99)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	-	20 -	2	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
50	Program Penataan Ketatalaksanaan, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi		90 %		719.366.850,00	276.871.062,00	(442.495.788,00)	(61,51)	
1	Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan	Wilayah Kabupaten Madiun	50 -	5	178.442.800,00	77.142.800,00	(101.300.000,00)	(56,77)	
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	2	86.924.050,00	74.724.050,00	(12.200.000,00)	(14,04)	
3	Peningkatan kualitas Kelambagaan	Wilayah Kabupaten Madiun	70 -	2	229.000.000,00	66.004.212,00	(162.995.788,00)	(71,18)	
4	Penguatan Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Madiun	70 -	2	225.000.000,00	59.000.000,00	(166.000.000,00)	(73,78)	
JUMLAH					977.591.100,00	401.429.135,00	(576.161.965,00)	(58,94)	

MADIUN, 11 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
NIP. 196511101992081001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 09 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -		554.974.387,00	249.755.842,00	(305.218.545,00)	(55,00)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawain, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	100 %	2	528.531.707,00	235.699.142,00	(292.832.565,00)	(55,40)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	20 -	2	26.442.680,00	14.056.700,00	(12.385.980,00)	(46,84)	
38	Program Hubungan Masyarakat dan Protokol		100 %		215.320.608,00	60.606.150,00	(154.714.458,00)	(71,85)	
8	Peningkatan Acara Keprotokolan	Wilayah Kabupaten Madiun	56 -	2	28.000.000,00	1.710.000,00	(26.290.000,00)	(93,89)	
11	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Daerah Beserta Jajaran dan Instansi Vertikal	Wilayah Kabupaten Madiun	1 berita	2	111.362.708,00	26.736.250,00	(84.626.458,00)	(75,99)	
15	Fasilitasi Peliputan Dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	240 -	2	75.957.900,00	32.159.900,00	(43.798.000,00)	(57,66)	
				JUMLAH	770.294.995,00	310.361.992,00	(459.933.003,00)	(59,71)	

MADIUN, 11 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
NIP. 196511101992081001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		85 -		4.684.406.670,00	2.888.834.137,00	(1.795.572.533,00)	(38,33)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	100 -	1	4.629.665.670,00	2.882.584.437,00	(1.747.081.233,00)	(37,74)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	19 -	2	54.741.000,00	6.249.700,00	(48.491.300,00)	(88,58)	
40	Program Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga		100 %		920.314.930,00	411.094.830,00	(509.220.100,00)	(55,33)	
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Wilayah Kabupaten Madiun	5 -	2	91.637.600,00	0,00	(91.637.600,00)	(100,00)	
3	Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD	Wilayah Kabupaten Madiun	5 -	2	606.897.330,00	328.697.330,00	(278.200.000,00)	(45,84)	
4	Peningkatan Layanan Aspirasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Wilayah Kabupaten Madiun	5 -	2	221.780.000,00	82.397.500,00	(139.382.500,00)	(62,85)	
47	Program Fasilitas Penyelenggaraan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		100 -		15.367.278.400,00	11.561.770.178,00	(3.805.508.222,00)	(24,76)	
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Desa Mejayan, Wilayah Kabupaten Madiun	11 -	2	3.474.658.072,00	2.337.247.700,00	(1.137.410.372,00)	(32,73)	
3	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Wilayah Kabupaten Madiun	9 -	2	11.297.559.928,00	7.020.903.778,00	(4.276.656.150,00)	(37,85)	
6	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	Wilayah Kabupaten Madiun	45 -	2	65.000.000,00	45.000.000,00	(20.000.000,00)	(30,77)	
7	Penunjang Kegiatan Reses DPRD	Wilayah Kabupaten Madiun	542 -	2	293.535.000,00	8.599.500,00	(284.935.500,00)	(97,07)	
10	Inspeksi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	60 -	2	131.000.000,00	60.660.000,00	(70.340.000,00)	(53,69)	
11	Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK RI	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	105.525.400,00	89.359.200,00	(16.166.200,00)	(15,32)	
13	Koordinasi/Konsultasi dalam rangka Pemulihan Bidang Pendidikan, Perekonomian, Kesehatan dan Sosial Ketenaga Kerjaan Akibat Pandemi Covid-19	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	
14	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pencegahan Atas Penyebaran Virus Covid-19 diwilayah Kabupaten Madiun	Wilayah Kabupaten Madiun		2	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
			JUMLAH		20.972.000.000,00	14.861.699.145,00	(6.110.300.855,00)	(29,14)	

MADIUN, 11 Juli 2020
SEKRETARIS DPRD

MOHAMMAD HADI SUTIKNO,S.Sos,M.Si

NIP. 197110211992011001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Balerejo
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Balerejo

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		85 -	275.800.859,86		201.725.334,00	(74.075.525,86)	(26,86)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawain, dan sarana prasarana	Kecamatan BALEREJO	81 -	2	258.687.160,00	201.725.334,00	(56.961.826,00)	(22,02)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan BALEREJO	81 -	2	17.113.699,86	0,00	(17.113.699,86)	(100,00)	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		89.35 %	487.880.957,50		92.182.814,00	(395.698.143,50)	(81,11)	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan BALEREJO	6 -	2	91.983.750,00	6.170.584,00	(85.813.166,00)	(93,29)	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan BALEREJO	3 -	2	137.733.195,00	31.095.100,00	(106.638.095,00)	(77,42)	
31	Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan BALEREJO	5 -	2	98.704.900,00	31.397.290,00	(67.307.610,00)	(68,19)	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan BALEREJO	5 -	2	107.849.112,50	9.381.750,00	(98.467.362,50)	(91,30)	
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan BALEREJO	89.35 %	2	51.610.000,00	14.138.090,00	(37.471.910,00)	(72,61)	
JUMLAH					763.681.817,36	293.908.148,00	(469.773.669,36)	(61,51)	

MADIUN, 11 Juli 2020
Camat Balerejo

Drs.BEDJO,M,Pd
NIP. 196110011982011014

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Dagangan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 Kecamatan Dagangan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		80 -	328.434.520,00	146.921.394,00	(181.513.126,00)	(55,27)		
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawain, dan sarana prasarana	Kecamatan DAGANGAN	80 -	326.426.520,00	146.921.394,00	(179.505.126,00)	(54,99)		
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan DAGANGAN	8 -	2.008.000,00	0,00	(2.008.000,00)	(100,00)		
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		89.35 %	341.574.822,00	120.633.876,00	(220.940.946,00)	(64,68)		
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan DAGANGAN	90 -	43.232.242,00	12.925.000,00	(30.307.242,00)	(70,10)		
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan DAGANGAN	90 -	97.831.700,00	29.421.700,00	(68.410.000,00)	(69,93)		
31	Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan DAGANGAN	85 -	90.583.000,00	33.932.876,00	(56.650.124,00)	(62,54)		
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan DAGANGAN	91 -	77.440.510,00	37.233.050,00	(40.207.460,00)	(51,92)		
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan DAGANGAN	85 -	32.487.370,00	7.121.250,00	(25.366.120,00)	(78,08)		
JUMLAH				670.009.342,00	267.555.270,00	(402.454.072,00)	(60,07)		

MADIUN, 11 Juli 2020
Camat Dagangan

MUHAMAD ZAHROWI, AP.
NIP. 197508191994121001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Dolopo

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		81 -		708.992.455,00	402.241.597,28	(306.750.857,72)	(43,27)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan DOLOPO	81 %	2	389.159.617,00	238.533.113,88	(150.626.503,12)	(38,71)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan DOLOPO, Wilayah Kabupaten Madiun	81 %	2	299.451.128,00	140.684.333,40	(158.766.794,60)	(53,02)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan DOLOPO	8 -	2	20.381.710,00	3.024.150,00	(17.357.560,00)	(85,16)	
3	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	Kecamatan DOLOPO		2	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		100 %		278.464.470,00	87.567.950,00	(190.896.520,00)	(68,55)	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan DOLOPO	90 -	2	55.516.578,00	22.220.250,00	(33.296.328,00)	(59,98)	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan DOLOPO	90 -	2	59.272.556,00	8.868.750,00	(50.403.806,00)	(85,04)	
31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan DOLOPO	90 -	2	58.749.100,00	23.366.850,00	(35.382.250,00)	(60,23)	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan DOLOPO	90 -	2	56.458.250,00	14.385.050,00	(42.073.200,00)	(74,52)	
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan DOLOPO	100 -	2	48.467.986,00	18.727.050,00	(29.740.936,00)	(61,36)	
30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan		100 %		1.760.309.923,00	1.252.045.893,00	(508.264.030,00)	(28,87)	
38	Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan DOLOPO	6 -	2	200.538.500,00	90.670.000,00	(109.868.500,00)	(54,79)	
39	Penyelenggaraan Pembangunan	Kecamatan DOLOPO	83 -	2	411.200.000,00	137.723.430,00	(273.476.570,00)	(66,51)	
39	Penyelenggaraan Pembangunan	Kecamatan DOLOPO	83 -	6	400.000.000,00	246.962.463,00	(153.037.537,00)	(38,26)	
40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kecamatan DOLOPO	4 -	2	16.571.423,00	2.690.000,00	(13.881.423,00)	(83,77)	
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)	Kecamatan DOLOPO	6 -	7	416.263.051,29	126.716.946,00	(289.546.105,29)	(69,56)	
42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)	Kecamatan DOLOPO	100 -	7	315.736.948,71	27.316.205,00	(288.420.743,71)	(91,35)	
43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)	-		2	0,00	18.071.000,00	18.071.000,00	0,00	
43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)	Kelurahan Mlilir		2	0,00	103.419.142,86	103.419.142,86	0,00	
44	Penyelenggaraan Pemerintahan (COVID 19 - NEW NORMAL)	-		2	0,00	10.309.000,00	10.309.000,00	0,00	

44	Penyelenggaraan Pemerintahan (COVID 19 - NEW NORMAL)	-	7	0,00	58.324.700,00	58.324.700,00	0,00
45	Penyelenggaraan Kemasyarakatan (COVID 19- NEW NORMAL)	-	7	0,00	72.605.500,00	72.605.500,00	0,00
46	Penyelenggaraan Pembangunan (COVID 19- NEW NORMAL)	-	7	0,00	8.911.250,00	8.911.250,00	0,00
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (COVID 19 - NEW NORMAL)	-	7	0,00	348.326.256,14	348.326.256,14	0,00
			JUMLAH		2.747.766.848,00	1.741.855.440,28	(1.005.911.407,72)
							(36,61)

MADIUN, 11 Juli 2020

CAMAT DOLOPO

MASHUDI S.Sos, M.Si

NIP. 196912141996021001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Geger

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		81 -		391.217.042,00	220.282.484,00	(170.934.558,00)	(43,69)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan GEGER	3 -	2	387.217.042,00	215.176.084,00	(172.040.958,00)	(44,43)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan GEGER	8 -	2	4.000.000,00	1.226.400,00	(2.773.600,00)	(69,34)	
3	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	Kecamatan GEGER		2	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		85 %		379.089.014,00	76.294.636,00	(302.794.378,00)	(79,87)	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan GEGER	88 -	2	67.707.250,00	16.348.000,00	(51.359.250,00)	(75,85)	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan GEGER	88 -	2	116.794.850,00	2.924.500,00	(113.870.350,00)	(97,50)	
31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan GEGER	88 -	2	106.470.014,00	44.924.136,00	(61.545.878,00)	(57,81)	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan GEGER	88 -	2	50.086.500,00	1.578.000,00	(48.508.500,00)	(96,85)	
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan GEGER	88 -	2	38.030.400,00	10.520.000,00	(27.510.400,00)	(72,34)	
				JUMLAH	770.306.056,00	296.577.120,00	(473.728.936,00)	(61,50)	

MADIUN, 11 Juli 2020
Camat geger

eryk
NIP. 123456789456123654

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Gemarang

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		100 -		342.216.992,50	137.620.502,00	(204.596.490,50)	(59,79)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan GEMARANG	90 %	2	331.920.892,50	137.620.502,00	(194.300.390,50)	(58,54)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan GEMARANG	90 -	2	10.296.100,00	0,00	(10.296.100,00)	(100,00)	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		93 %		115.476.584,00	30.590.064,00	(84.886.520,00)	(73,51)	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan GEMARANG	90 -	2	26.215.500,00	9.095.064,00	(17.120.436,00)	(65,31)	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan GEMARANG	90 %	2	41.056.950,00	0,00	(41.056.950,00)	(100,00)	
31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan GEMARANG	93 %	2	16.970.400,00	14.267.000,00	(2.703.400,00)	(15,93)	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan GEMARANG	90 %	2	7.427.734,00	0,00	(7.427.734,00)	(100,00)	
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan GEMARANG	90 %	2	23.806.000,00	7.228.000,00	(16.578.000,00)	(69,64)	
				JUMLAH	457.693.576,50	168.210.566,00	(289.483.010,50)	(63,25)	

MADIUN, 11 Juli 2020
CAMAT GEMARANG

AGUS JAWARI, S.Sos
NIP. 196312141986031014

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Jiwan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		81 -		345.885.020,00	172.025.814,00	(173.859.206,00)	(50,27)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan JIWAN	1 -	2	340.364.220,00	172.025.814,00	(168.338.406,00)	(49,46)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan JIWAN	13 -	2	5.520.800,00	0,00	(5.520.800,00)	(100,00)	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		75 %		283.640.163,00	68.388.000,00	(215.252.163,00)	(75,89)	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan JIWAN	3 -	2	43.625.626,00	9.992.000,00	(33.633.626,00)	(77,10)	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan JIWAN	2 -	2	73.448.912,00	7.400.000,00	(66.048.912,00)	(89,92)	
31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan JIWAN	3 -	2	59.816.225,00	28.442.000,00	(31.374.225,00)	(52,45)	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan JIWAN	3 -	2	63.098.130,00	14.504.000,00	(48.594.130,00)	(77,01)	
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan JIWAN	3 -	2	43.651.270,00	8.050.000,00	(35.601.270,00)	(81,56)	
			JUMLAH		629.525.183,00	240.413.814,00	(389.111.369,00)	(61,81)	

MADIUN, 11 Juli 2020
CAMAT JIWAN

WIDADA, SH
NIP. 196305171995031001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Kebonsari

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		81 -		340.997.015,00	183.200.059,00	(157.796.956,00)	(46,28)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan KEBONSARI	80 -	2	340.997.015,00	183.200.059,00	(157.796.956,00)	(46,28)	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		100 -		299.658.439,00	61.639.350,00	(238.019.089,00)	(79,43)	
16	Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan KEBONSARI	89 -	2	30.368.595,00	11.137.500,00	(19.231.095,00)	(63,33)	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan KEBONSARI	90 -	2	93.254.078,00	16.818.750,00	(76.435.328,00)	(81,96)	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan KEBONSARI	90 %	2	63.430.610,00	17.894.850,00	(45.535.760,00)	(71,79)	
31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan KEBONSARI	90 %	2	38.699.290,00	12.931.400,00	(25.767.890,00)	(66,58)	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan KEBONSARI	90 %	2	73.905.866,00	2.856.850,00	(71.049.016,00)	(96,13)	
				JUMLAH	640.655.454,00	244.839.409,00	(395.816.045,00)	(61,78)	

MADIUN, 11 Juli 2020
Camat Kebonsari

MOHAMMAD JAZULI, SE
NIP. 196804191993021002

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Kare

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		81 -		239.273.509,00	111.257.366,00	(128.016.143,00)	(53,50)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan KARE	92 -	1	234.273.509,00	110.257.366,00	(124.016.143,00)	(52,94)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan KARE	30 -	2	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		93 -		235.707.474,00	76.365.978,00	(159.341.496,00)	(67,60)	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan KARE	89 -	2	46.260.354,00	26.529.354,00	(19.731.000,00)	(42,65)	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan KARE	87 -	2	77.520.715,00	11.025.000,00	(66.495.715,00)	(85,78)	
31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan KARE	87 -	2	51.417.780,00	26.722.074,00	(24.695.706,00)	(48,03)	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan KARE	93 -	2	35.024.000,00	5.152.050,00	(29.871.950,00)	(85,29)	
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan KARE	94 -	2	25.484.625,00	6.937.500,00	(18.547.125,00)	(72,78)	
				JUMLAH	474.980.983,00	187.623.344,00	(287.357.639,00)	(60,50)	

MADIUN, 11 Juli 2020
CAMAT KARE

SUMARSONO, SH
NIP. 196502181993031010

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Madiun

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		83 -		618.020.210,00	287.721.854,00	(330.298.356,00)	(53,44)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan MADIUN	83 -	2	352.258.480,00	211.591.674,00	(140.666.806,00)	(39,93)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kelurahan Nglames	83 -	1	260.518.230,00	76.130.180,00	(184.388.050,00)	(70,78)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan MADIUN	81 -	2	2.003.500,00	0,00	(2.003.500,00)	(100,00)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kelurahan Nglames	81 -	2	3.240.000,00	0,00	(3.240.000,00)	(100,00)	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		85 -		245.270.506,00	67.874.650,00	(177.395.856,00)	(72,33)	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan MADIUN	100 -	2	59.663.803,00	0,00	(59.663.803,00)	(100,00)	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan MADIUN	100 -	2	98.557.390,00	11.900.000,00	(86.657.390,00)	(87,93)	
31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan MADIUN	100 -	2	37.843.400,00	17.794.150,00	(20.049.250,00)	(52,98)	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan MADIUN	100 -	2	10.162.013,00	0,00	(10.162.013,00)	(100,00)	
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan MADIUN	100 -	2	39.043.900,00	19.680.500,00	(19.363.400,00)	(49,59)	
34	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)	-	-	2	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan		78 -		825.385.270,00	806.671.375,00	(18.713.895,00)	(2,27)	
38	Penyelenggaraan Pemerintahan	Kelurahan Nglames	83 -	1	49.119.100,00	0,00	(49.119.100,00)	(100,00)	
39	Penyelenggaraan Pembangunan	Kelurahan Nglames	83 -	6	378.045.070,00	362.371.375,00	(15.673.695,00)	(4,15)	
40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kelurahan Nglames	83 -	2	32.221.100,00	1.000.000,00	(31.221.100,00)	(96,90)	
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)	Kelurahan Nglames	83 -	7	285.082.600,00	7.678.000,00	(277.404.600,00)	(97,31)	
42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)	Kelurahan Nglames	83 -	7	80.917.400,00	10.290.000,00	(70.627.400,00)	(87,28)	
43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)	-	-	2	0,00	77.300.000,00	77.300.000,00	0,00	
45	Penyelenggaraan Kemasyarakatan (COVID 19- NEW NORMAL)	-	-	7	0,00	72.227.400,00	72.227.400,00	0,00	
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (COVID 19 - NEW NORMAL)	-	-	7	0,00	275.804.600,00	275.804.600,00	0,00	
				JUMLAH	1.688.675.986,00	1.162.267.879,00	(526.408.107,00)	(31,17)	

MADIUN, 11 Juli 2020
Camat Madiun

DIDIK HARIANTO S.Sos, MM
NIP. 197111211992011001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Mejayan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		100 %		917.519.921,00	643.511.146,00	(274.008.775,00)	(29,86)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan MEJAYAN	100 %	2	241.133.850,00	147.741.021,00	(93.392.829,00)	(38,73)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan MEJAYAN, Kelurahan Bangunsari	100 %	2	203.760.900,00	131.120.562,00	(72.640.338,00)	(35,65)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan MEJAYAN, Kelurahan Krajan	100 %	2	165.486.600,00	98.986.100,00	(66.500.500,00)	(40,18)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan MEJAYAN, Kelurahan Pandean	100 %	2	307.138.571,00	265.663.463,00	(41.475.108,00)	(13,50)	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		80 %		382.823.200,00	89.013.946,00	(293.809.254,00)	(76,75)	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan MEJAYAN	80 %	2	53.751.400,00	28.712.354,00	(25.039.046,00)	(46,58)	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan MEJAYAN	80 %	2	106.204.500,00	15.627.726,00	(90.576.774,00)	(85,29)	
31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan MEJAYAN	80 %	2	92.118.500,00	41.420.836,00	(50.697.664,00)	(55,04)	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan MEJAYAN	80 -	2	104.767.400,00	1.721.212,00	(103.046.188,00)	(98,36)	
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan MEJAYAN	80 %	2	25.981.400,00	1.531.818,00	(24.449.582,00)	(94,10)	
30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan		80 %		2.565.755.326,00	1.998.658.742,41	(567.096.583,59)	(22,10)	
38	Penyelenggaraan Pemerintahan	Kelurahan Bangunsari	80 %	2	9.467.920,00	2.363.852,00	(7.104.068,00)	(75,03)	
38	Penyelenggaraan Pemerintahan	Kelurahan Krajan	80 %	2	47.685.000,00	46.425.000,00	(1.260.000,00)	(2,64)	
38	Penyelenggaraan Pemerintahan	Kelurahan Pandean	80 %	2	66.856.936,00	36.250.000,00	(30.606.936,00)	(45,78)	
39	Penyelenggaraan Pembangunan	Kecamatan MEJAYAN, Kelurahan Bangunsari	80 %	2	473.970.000,00	280.569.244,41	(193.400.755,59)	(40,80)	
39	Penyelenggaraan Pembangunan	Kelurahan Krajan	80 %	2	417.270.000,00	156.001.241,00	(261.268.759,00)	(62,61)	
39	Penyelenggaraan Pembangunan	Kelurahan Pandean	80 %	6	326.469.420,00	242.197.545,00	(84.271.875,00)	(25,81)	
40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kelurahan Bangunsari	80 -	2	26.731.800,00	8.037.330,00	(18.694.470,00)	(69,93)	
40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kelurahan Krajan, Wilayah Kabupaten Madiun	80 -	2	84.685.000,00	20.088.000,00	(64.597.000,00)	(76,28)	
40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kelurahan Pandean	80 -	2	14.619.250,00	3.172.299,00	(11.446.951,00)	(78,30)	
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau	Kecamatan	80 -	7	275.277.965,00	275.277.965,00	0,00	0,00	

	Tambahan)	MEJAYAN,Kelurahan Bangunsari							
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)	Kelurahan Krajan	80 -	7	97.341.000,00	94.543.170,00	(2.797.830,00)	(2,87)	
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)	Kelurahan Pandean	80 -	7	331.941.914,00	331.941.914,00	0,00	0,00	
42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)	Kecamatan MEJAYAN,Kelurahan Bangunsari	80 %	7	90.722.035,00	5.811.000,00	(84.911.035,00)	(93,59)	
42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)	Kelurahan Krajan,Wilayah Kabupaten Madiun	80 %	7	268.659.000,00	0,00	(268.659.000,00)	(100,00)	
42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)	Kelurahan Pandean	80 %	7	34.058.086,00	34.058.086,00	0,00	0,00	
43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)	Desa Mejayan,Kecamatan		1	0,00	42.989.381,00	42.989.381,00	0,00	
		Mejayan,Kecamatan							
		MEJAYAN,Kelurahan Bangunsari							
43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)	Kelurahan Krajan		2	0,00	32.767.350,00	32.767.350,00	0,00	
43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)	Kelurahan Pandean		2	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (COVID 19 - NEW NORMAL)	Kecamatan MEJAYAN		7	0,00	78.708.535,00	78.708.535,00	0,00	
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (COVID 19 - NEW NORMAL)	Kelurahan Krajan		7	0,00	271.456.830,00	271.456.830,00	0,00	
					JUMLAH	3.866.098.447,00	2.731.183.834,41	(1.134.914.612,59)	(29,36)

MADIUN, 11 Juli 2020

CAMAT MEJAYAN

BIBIT PURWANTO, S.Sos. M.Si.

NIP. 196606061986031014

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Pilangkenceng

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		82 -		399.812.717,00	205.505.122,00	(194.307.595,00)	(48,60)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan PILANGKENCENG	12 -	2	388.683.465,00	205.505.122,00	(183.178.343,00)	(47,13)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan PILANGKENCENG	13 -	2	11.129.252,00	0,00	(11.129.252,00)	(100,00)	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		100 %		349.348.774,00	90.409.400,00	(258.939.374,00)	(74,12)	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan PILANGKENCENG	3 -	2	77.631.370,00	22.740.000,00	(54.891.370,00)	(70,71)	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan PILANGKENCENG	6 -	2	87.707.955,00	10.650.394,00	(77.057.561,00)	(87,86)	
31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan PILANGKENCENG	5 -	2	78.433.388,00	28.851.106,00	(49.582.282,00)	(63,22)	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan PILANGKENCENG	4 -	2	60.777.536,00	12.406.500,00	(48.371.036,00)	(79,59)	
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan PILANGKENCENG	5 -	2	44.798.525,00	15.761.400,00	(29.037.125,00)	(64,82)	
				JUMLAH	749.161.491,00	295.914.522,00	(453.246.969,00)	(60,50)	

MADIUN, 11 Juli 2020
Camat Pilangkenceng

EDY DJUWARI, S.Sos.,M.A
NIP. 198608021986031020

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Sawahan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		81 -		343.280.040,00	171.122.620,00	(172.157.420,00)	(50,15)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan SAWAHAN	100 %	2	332.367.170,00	170.222.620,00	(162.144.550,00)	(48,78)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan SAWAHAN	100 %	2	10.912.870,00	900.000,00	(10.012.870,00)	(91,75)	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		10 -		257.433.550,00	72.792.800,00	(184.640.750,00)	(71,72)	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan SAWAHAN	100 %	2	55.775.500,00	10.568.000,00	(45.207.500,00)	(81,05)	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan SAWAHAN	100 %	2	64.301.950,00	14.630.000,00	(49.671.950,00)	(77,25)	
31	Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan SAWAHAN	100 %	2	58.122.800,00	25.151.800,00	(32.971.000,00)	(56,73)	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan SAWAHAN	100 %	2	37.283.000,00	9.170.600,00	(28.112.400,00)	(75,40)	
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan SAWAHAN	100 %	2	41.950.300,00	13.272.400,00	(28.677.900,00)	(68,36)	
				JUMLAH	600.713.590,00	243.915.420,00	(356.798.170,00)	(59,40)	

MADIUN, 11 Juli 2020
CAMAT SAWAHAN

TARJI, S.STP, M.H
NIP. 197805231997011001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Saradan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		87 -		250.578.115,00	252.492.215,00	1.914.100,00	0,76	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan SARADAN	80 -	2	250.578.115,00	252.492.215,00	1.914.100,00	0,76	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		100 %		414.424.000,00	414.424.000,00	0,00	0,00	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan SARADAN	12 -	2	82.555.710,00	82.555.710,00	0,00	0,00	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan SARADAN	12 -	2	85.801.474,00	85.801.474,00	0,00	0,00	
31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan SARADAN	12 -	2	79.885.644,00	79.885.644,00	0,00	0,00	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan SARADAN	12 -	2	96.259.069,00	96.259.069,00	0,00	0,00	
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan SARADAN	12 -	2	69.922.103,00	69.922.103,00	0,00	0,00	
				JUMLAH	665.002.115,00	666.916.215,00	1.914.100,00	0,29	

MADIUN, 11 Juli 2020
Camat Saradan

Setiyono
NIP. 789654123698523698

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Wungu

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		81 -		870.247.633,03	609.794.142,03	(260.453.491,00)	(29,93)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan WUNGU	83 - 2		437.460.315,03	364.410.165,03	(73.050.150,00)	(16,70)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan WUNGU, Wilayah Kabupaten Madiun	83 - 2		377.099.818,00	217.118.977,00	(159.980.841,00)	(42,42)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan WUNGU	84 - 2		55.687.500,00	28.265.000,00	(27.422.500,00)	(49,24)	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		93 %		222.104.700,00	34.691.500,00	(187.413.200,00)	(84,38)	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan WUNGU, Kelurahan Wungu	90 - 2		49.015.300,00	7.182.000,00	(41.833.300,00)	(85,35)	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan WUNGU	90 - 2		69.735.200,00	0,00	(69.735.200,00)	(100,00)	
31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan WUNGU, Kelurahan Wungu	85 - 2		70.130.500,00	27.509.500,00	(42.621.000,00)	(60,77)	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan WUNGU	91 - 2		16.765.000,00	0,00	(16.765.000,00)	(100,00)	
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan WUNGU	85 - 2		16.458.700,00	0,00	(16.458.700,00)	(100,00)	
30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan		93 -		1.690.004.184,97	1.129.147.018,32	(560.857.166,65)	(33,19)	
38	Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan WUNGU	7 - 2		80.960.250,00	16.307.500,00	(64.652.750,00)	(79,86)	
38	Penyelenggaraan Pemerintahan	Wilayah Kabupaten Madiun	7 - 2		33.233.925,00	24.785.000,00	(8.448.925,00)	(25,42)	
39	Penyelenggaraan Pembangunan	Kecamatan WUNGU	12 - 6		302.914.637,97	111.507.965,82	(191.406.672,15)	(63,19)	
39	Penyelenggaraan Pembangunan	Kecamatan WUNGU, Wilayah Kabupaten Madiun	12 - 6		400.061.502,00	104.847.840,00	(295.213.662,00)	(73,79)	
40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kecamatan WUNGU	7 - 2		140.833.870,00	10.154.837,00	(130.679.033,00)	(92,79)	
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)	Kecamatan WUNGU	8 - 7		299.485.850,00	251.526.912,00	(47.958.938,00)	(16,01)	
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)	Kecamatan WUNGU, Kelurahan Munggut	8 - 7		328.139.525,00	91.086.970,94	(237.052.554,06)	(72,24)	
42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)	Kecamatan WUNGU	5 - 7		37.860.475,00	0,00	(37.860.475,00)	(100,00)	
42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)	Wilayah Kabupaten Madiun	5 - 2		66.514.150,00	7.089.250,00	(59.424.900,00)	(89,34)	

		Madiun					
43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)	-	2	0,00	55.947.925,50	55.947.925,50	0,00
44	Penyelenggaraan Pemerintahan (COVID 19 - NEW NORMAL)	-	2	0,00	66.105.000,00	66.105.000,00	0,00
46	Penyelenggaraan Pembangunan (COVID 19- NEW NORMAL)	-	2	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (COVID 19 - NEW NORMAL)	-	2	0,00	113.974.788,00	113.974.788,00	0,00
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (COVID 19 - NEW NORMAL)	-	7	0,00	274.913.029,06	274.913.029,06	0,00
			JUMLAH		2.782.356.518,00	1.773.632.660,35	(1.008.723.857,65)
							(36,25)

MADIUN, 11 Juli 2020

Camat Wungu

Achmadi, S.Sos.,M.Si

NIP. 196104241989031009

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 Kecamatan Wonoasri

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		81 -		253.530.340,00	134.480.060,00	(119.050.280,00)	(46,96)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kecamatan WONOASRI	1 -	2	250.030.340,00	133.930.060,00	(116.100.280,00)	(46,43)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kecamatan WONOASRI	13 -	2	3.500.000,00	550.000,00	(2.950.000,00)	(84,29)	
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		75 %		278.510.690,00	68.074.300,00	(210.436.390,00)	(75,56)	
29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan WONOASRI	4 -	2	46.913.720,00	23.375.400,00	(23.538.320,00)	(50,17)	
30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan WONOASRI	6 -	2	68.577.080,00	2.806.500,00	(65.770.580,00)	(95,91)	
31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan WONOASRI	5 -	2	78.048.370,00	20.256.400,00	(57.791.970,00)	(74,05)	
32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan WONOASRI	4 -	2	38.611.800,00	7.487.000,00	(31.124.800,00)	(80,61)	
33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan WONOASRI	5 -	2	46.359.720,00	14.149.000,00	(32.210.720,00)	(69,48)	
				JUMLAH	532.041.030,00	202.554.360,00	(329.486.670,00)	(61,93)	

MADIUN, 11 Juli 2020
CAMAT WONOASRI

Drs. HAQUL MUNAWAR, M.Si
NIP. 196804211995031006

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		75 -		2.131.871.893,00	970.825.215,00	(1.161.046.678,00)	(54,46)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun	17 -	2	2.028.709.751,00	898.510.215,00	(1.130.199.536,00)	(55,71)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	8 -	2	103.162.142,00	72.315.000,00	(30.847.142,00)	(29,90)	
23	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100 %		1.510.603.450,00	1.259.509.200,00	(251.094.250,00)	(16,62)	
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	45 -	2	50.775.000,00	2.825.000,00	(47.950.000,00)	(94,44)	
12	Evaluasi Penerapan SPIP di OPD	Wilayah Kabupaten Madiun	10 -	2	92.930.000,00	92.930.000,00	0,00	0,00	
36	Pengawasan Pelayanan Publik	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	352.644.250,00	330.000.000,00	(22.644.250,00)	(6,42)	
37	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Wilayah Kabupaten Madiun	85 %	2	583.450.000,00	507.950.000,00	(75.500.000,00)	(12,94)	
38	Review Laporan Keuangan	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	149.525.000,00	144.525.000,00	(5.000.000,00)	(3,34)	
39	Penilaian Integritas	Wilayah Kabupaten Madiun	4 -	2	281.279.200,00	181.279.200,00	(100.000.000,00)	(35,55)	
24	Program Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah		60 %		789.865.997,00	807.672.197,00	17.806.200,00	2,25	
4	Monitoring Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	14.970.802,00	180.970.802,00	166.000.000,00	1.108,83	
7	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	5	380.385.195,00	380.385.195,00	0,00	0,00	
9	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	211.880.000,00	140.486.200,00	(71.393.800,00)	(33,70)	
10	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	182.630.000,00	105.830.000,00	(76.800.000,00)	(42,05)	
JUMLAH					4.432.341.340,00	3.038.006.612,00	(1.394.334.728,00)	(31,46)	

MADIUN, 11 Juli 2020

INSPEKTUR

Drs. BASITO, M.Si

NIP. 196001231981031006

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		1 -	2.510.800.930,00	1.260.297.168,00	(1.250.503.762,00)	(49,80)		
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawainan, dan sarana prasarana	Desa Mejayan,Wilayah Kabupaten Madiun	17 - 2	2.426.395.880,00	1.088.549.398,00	(1.337.846.482,00)	(55,14)		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun	4 - 2	84.405.050,00	38.514.500,00	(45.890.550,00)	(54,37)		
3	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	Wilayah Kabupaten Madiun	2	0,00	133.233.270,00	133.233.270,00	0,00		
21	Program Penelitian dan Pengembangan		100 -	1.118.355.050,00	577.372.884,00	(540.982.166,00)	(48,37)		
14	Optimalisasi Hasil Kelitbangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Desa Mejayan,Wilayah Kabupaten Madiun	3 Bk 2	495.135.917,00	359.618.634,00	(135.517.283,00)	(27,37)		
15	Optimalisasi Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, SOSBUD, PEN MAS	Desa Mejayan,Wilayah Kabupaten Madiun	3 Bk 2	375.549.156,00	100.142.000,00	(275.407.156,00)	(73,33)		
16	Inovasi Dan Penerbitan Hasil - Hasil Kelitbangan	Wilayah Kabupaten Madiun	16 License 2	247.669.977,00	17.612.250,00	(230.057.727,00)	(92,89)		
17	Inovasi Daerah pada Tatanan Normal Baru dan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun	100 License 5	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
21	Program perencanaan pembangunan daerah		80 %	1.785.215.350,00	1.042.351.150,00	(742.864.200,00)	(41,61)		
8	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Desa Bagi,Wilayah Kabupaten Madiun	6 - 2	892.192.004,00	401.906.854,00	(490.285.150,00)	(54,95)		
12	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Wilayah Kabupaten Madiun	150 - 2	191.591.700,00	181.514.900,00	(10.076.800,00)	(5,26)		
98	Pengumpulan, Verifikasi dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Desa Mejayan,Wilayah Kabupaten Madiun	30 - 2	484.405.189,00	346.837.439,00	(137.567.750,00)	(28,40)		
99	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Kab. Madiun	Wilayah Kabupaten Madiun	4 - 2	217.026.457,00	112.091.957,00	(104.934.500,00)	(48,35)		
26	Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		80 %	2.398.587.621,00	1.061.332.369,00	(1.337.255.252,00)	(55,75)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Kelurahan Bangunsari	2 - 5	475.275.368,00	191.731.331,00	(283.544.037,00)	(59,66)		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan PU, Perhubungan dan Penataan Ruang	Wilayah Kabupaten Madiun	2 - 2	536.625.982,00	5.000.000,00	(531.625.982,00)	(99,07)		
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kominfo	Wilayah Kabupaten Madiun	2 - 2	832.602.673,00	555.265.529,00	(277.337.144,00)	(33,31)		
80	Pendukung Kegiatan Integrated Participatory Development and management of Irrigation Sector Project (IPDMIP)	Kelurahan Bangunsari,Wilaya h Kabupaten	16	554.083.598,00	309.335.509,00	(244.748.089,00)	(44,17)		

		Madiun						
27	Program Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA		80 %		810.902.049,00	195.007.000,00	(615.895.049,00)	(75,95)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaani Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	94.129.374,00	16.557.000,00	(77.572.374,00)	(82,41)
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Pariwisata	Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	2	443.641.818,00	100.000.000,00	(343.641.818,00)	(77,46)
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pertanian, Pangan dan LH	Wilayah Kabupaten Madiun	5 -	2	273.130.857,00	78.450.000,00	(194.680.857,00)	(71,28)
28	Program Perencanaan Bidang Sosbud dan Penmas		50 -		578.217.062,00	47.133.756,00	(531.083.306,00)	(91,85)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	Wilayah Kabupaten Madiun	3 -	2	304.145.256,00	29.342.756,00	(274.802.500,00)	(90,35)
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia	Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	2	155.596.206,00	0,00	(155.596.206,00)	(100,00)
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur	Wilayah Kabupaten Madiun	2 -	5	118.475.600,00	17.791.000,00	(100.684.600,00)	(84,98)
				JUMLAH	9.202.078.062,00	4.183.494.327,00	(5.018.583.735,00)	(54,54)

MADIUN, 11 Juli 2020
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KURNIA AMINULLOH
NIP. 19700702 199003 1 001

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Pelayanan Kesekretariatan		100 -		4.338.968.270,00	2.391.130.671,00	(1.947.837.599,00)	(44,89)	
1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Desa Mejayan,Kecamatan n MEJAYAN,Wilayah Kabupaten Madiun	100 -	2	3.301.716.270,00	1.428.796.389,00	(1.872.919.881,00)	(56,73)	
2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	-	256 -	2	1.037.252.000,00	675.231.200,00	(362.020.800,00)	(34,90)	
3	operasional kesekretariatan (covid 19 new normal)	-		2	0,00	287.103.082,00	287.103.082,00	0,00	
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100 %		1.918.177.202,00	1.282.806.850,00	(635.370.352,00)	(33,12)	
105	Perencanaan Anggaran	Desa Mejayan	80 -	2	391.849.652,00	219.287.300,00	(172.562.352,00)	(44,04)	
106	Penyusunan Anggaran	-	480 -	2	445.190.000,00	145.167.000,00	(300.023.000,00)	(67,39)	
107	Pengendalian Anggaran	Desa Babadan Lor,Desa Darmorejo	256 -	2	1.081.137.550,00	918.352.550,00	(162.785.000,00)	(15,06)	
19	Program Penatausahaan Aset dan Akuntansi		100 %		1.740.717.316,00	820.385.141,00	(920.332.175,00)	(52,87)	
62	Inventarisasi dan Penghapusan Aset	Wilayah Kabupaten Madiun	1 -	2	451.709.000,00	210.041.025,00	(241.667.975,00)	(53,50)	
63	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	Wilayah Kabupaten Madiun	85 -	2	737.390.100,00	441.708.100,00	(295.682.000,00)	(40,10)	
64	Akutansi dan Laporan Keuangan	Wilayah Kabupaten Madiun	240 -	2	551.618.216,00	168.636.016,00	(382.982.200,00)	(69,43)	
23	Program Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %		994.726.498,00	511.895.816,00	(482.830.682,00)	(48,54)	
4	Penatausahaan penerbitan SP2D	Wilayah Kabupaten Madiun	12500 -	2	121.618.400,00	46.189.164,00	(75.429.236,00)	(62,02)	
5	Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah, SPD dan DTH/RTH	Desa Darmorejo,Wilayah Kabupaten Madiun	4 -	2	613.440.258,00	371.359.152,00	(242.081.106,00)	(39,46)	
6	Rekonsiliasi Pengelolaan Gaji PNS	Wilayah Kabupaten Madiun	100 -	2	259.667.840,00	94.347.500,00	(165.320.340,00)	(63,67)	
				JUMLAH	8.992.589.286,00	5.006.218.478,00	(3.986.370.808,00)	(44,33)	

MADIUN, 11 Juli 2020

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah**

Drs. RORI PRIAMBODO,M.Si

NIP. 195908021986031013

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2,2**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

Bidang Pemerintahan

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4 . 04 Keuangan

4.04.02 Badan Pendapatan Daerah

4.04.02 . 01 Badan Pendapatan Daerah

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN
1	2	3	4
8		Program Pelayanan Kesekretariatan	
	1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun
	2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun
	3	operasional kesekretariatan (covid 19 new normal)	Wilayah Kabupaten Madiun
10		Program Pengembangan dan Penetapan Pendapatan	
	3	Penilaian Obyek Khusus dan Pemutakhiran Data PBB-P2	Wilayah Kabupaten Madiun
	5	Pengelolaan BPHTB	Wilayah Kabupaten Madiun
	16	Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Wilayah Kabupaten Madiun
	17	Pendataan dan Penyelenggaraan penetapan pajak daerah	Wilayah Kabupaten Madiun
21		Program Penatausahaan, Verifikasi dan Penagihan Pendapatan	
	37	Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan PBB Dan PAD	Wilayah Kabupaten Madiun
	40	Penagihan dan monitoring PBB-2	Wilayah Kabupaten Madiun
	41	Verifikasi piutang dan pelayanan wajib pajak	Wilayah Kabupaten Madiun

pririfcd **By SimDa**

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN
1	2	3	4
JUMLAH			

MADIUN, 11 Juli 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

INDRA SETYAWAN, SE, M.Si.

NIP. 197002221998031006

Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 2

pririTfed **Bid SiriD8**

TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
5	6	7	8
81 -		1.842.046.868,00	1.071.545.425,00
100 %	2	1.831.747.642,00	936.056.558,00
18 -	2	10.299.226,00	0,00
	1	0,00	135.488.867,00
10.61 %		539.104.254,00	113.336.100,00
2 -	1	76.621.800,00	0,00
3000 -	1	44.018.450,00	37.099.250,00
0.50 -	1	111.854.704,00	2.160.000,00
410000 -	1	306.609.300,00	74.076.850,00
100 %		1.551.538.877,00	247.803.050,00
24 -	1	364.620.500,00	137.393.050,00
342350 -	1	1.180.872.400,00	110.410.000,00
1 -	1	6.045.977,00	0,00

TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
5	6	7	8
		3.932.689.999,00	1.432.684.575,00

BERTAMBAH/(BERKURANG)	
(Rp)	%
9	10
(770.501.443,00)	(41,83)
(895.691.084,00)	(48,90)
(10.299.226,00)	(100,00)
135.488.867,00	0,00
(425.768.154,00)	(78,98)
(76.621.800,00)	(100,00)
(6.919.200,00)	(15,72)
(109.694.704,00)	(98,07)
(232.532.450,00)	(75,84)
(1.303.735.827,00)	(84,03)
(227.227.450,00)	(62,32)
(1.070.462.400,00)	(90,65)
(6.045.977,00)	(100,00)

BERTAMBAH/(BERKURANG)	
(Rp)	%
9	10
(2.500.005.424,00)	(63,57)

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKAP SKPD
2,2

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan

Bidang Pemerintahan

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4.05 Kepegawaian

4.05.01 Badan Kepegawaian Daerah

4.05.01 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN
1	2	3	4
8		Program Pelayanan Kesekretariatan	
	1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Wilayah Kabupaten Madiun
	2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Wilayah Kabupaten Madiun
	3	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	-
29		Program Penyusunan, Penetapan, Kebutuhan dan Pengadaan serta Pengembangan Karier dan Kompetensi Pegawai	
	1	Penyusunan, Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN	Wilayah Kabupaten Madiun
	2	Pengembangan Kompetensi ASN	Wilayah Kabupaten Madiun
	3	Penyelenggaraan Diklat dan Tugas Belajar	Wilayah Kabupaten Madiun
	4	Pendidikan Karakter Dasar ASN menuju Birokrasi Pancasila	Wilayah Kabupaten Madiun
30		Program Mutasi Pegawai	
	1	Kenaikan Pangkat dan Perpindahan Pegawai	Wilayah Kabupaten Madiun
	2	Promosi dan Mutasi Jabatan PNS	Wilayah Kabupaten Madiun
31		Program Pembinaan, Data, dan Kesejahteraan Pegawai	
	3	Pembinaan dan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Wilayah Kabupaten Madiun

Formulir RKAP SKPD 2.2

Halaman 1

pririfcd By SimDa

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN
1	2	3	4
	7	Administrasi Pensiun dan Kegiatan Pelepasan ASN Purna Bakti (DID)	Madiun Wilayah Kabupaten Madiun
	9	Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN	Wilayah Kabupaten Madiun
JUMLAH			

MADIUN, 11 Juli 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ENDANG SETYOWATI SH, MM

NIP. 196202231983032018

Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 2

[pririTfed Bid SiriD8]

TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
5	6	7	8
80 -		1.514.165.436,00	1.197.748.823,00
2 -	2	1.454.517.256,00	933.838.811,00
12 -	2	59.648.180,00	59.648.180,00
	1	0,00	204.261.832,00
1 -		3.950.042.220,00	788.489.969,00
1 -	2	1.199.900.835,00	535.957.469,00
200 -	2	407.758.057,00	0,00
85 -	5	1.580.001.148,00	252.532.500,00
300 -	2	762.382.180,00	0,00
500 -		620.928.398,00	571.698.190,00
95 -	2	130.743.368,00	108.343.468,00
85 -	2	490.185.030,00	463.354.722,00
7000 -		415.165.105,00	168.623.085,00
145 -	2	69.182.717,00	5.502.217,00

89 -	2	134.394.350,00	59.047.830,00
------	---	----------------	---------------

TARGET KINERJA	Sumber Dana	SEBELUM PERUBAHAN
		7
5	6	
482 -	5	186.539.738,00
459 -	2	25.048.300,00
		6.500.301.159,00

BERTAMBAH/(BERKURANG)	
(Rp)	%
9	10
(316.416.613,00)	(20,90)
(520.678.445,00)	(35,80)
0,00	0,00
204.261.832,00	0,00
(3.161.552.251,00)	(80,04)
(663.943.366,00)	(55,33)
(407.758.057,00)	(100,00)
(1.327.468.648,00)	(84,02)
(762.382.180,00)	(100,00)
(49.230.208,00)	(7,93)
(22.399.900,00)	(17,13)
(26.830.308,00)	(5,47)
(246.542.020,00)	(59,38)
(63.680.500,00)	(92,05)

(75.346.520,00)

(56,06)

JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	(Rp)	%
8	9	10
104.073.038,00	(82.466.700,00)	(44,21)
0,00	(25.048.300,00)	(100,00)
2.726.560.067,00	(3.773.741.092,00)	(58,05)

BAB VI

PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2020 ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2020, selain itu Perubahan RKPD Tahun 2020 dipergunakan sebagai pedoman :

- a. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Madiun Tahun 2020;
- b. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun 2020;
- c. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.